

Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan :

Studi Kasus di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Lela Dina Pertiwi

Nomor Mahasiswa : 02313141

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan :

Studi Kasus di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1

Program Studi Ekonomi Pembangunan,

Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Lela Dina Pertiwi

Nomor Mahasiswa : 02313141

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Agustus 2006

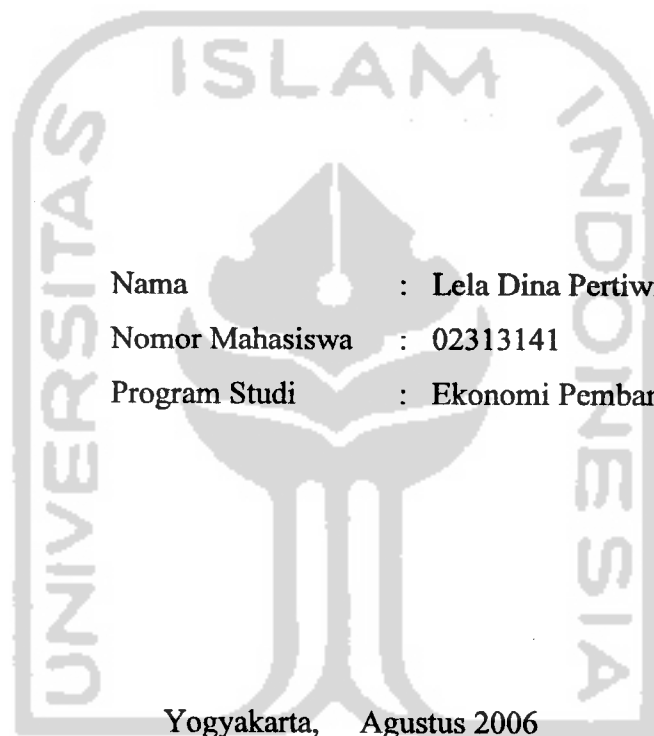
Penulis,

Lela Dina Pertiwi

PENGESAHAN

Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan :

Studi Kasus di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002



Nama : Lela Dina Pertiwi

Nomor Mahasiswa : 02313141

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Agustus 2006

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Agus Widarjono', is written over the printed name.

Drs. Agus Widarjono, MA

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Efisiensi Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan: Studi Kasus di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002

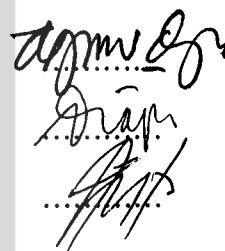
**Disusun Oleh: LELA DINA PERTIWI
Nomor mahasiswa: 02313141**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 21 September 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Drs. Agus Widarjono, MA

Penguji I : Dra. Diana Wijayanti, M.Si

Penguji II : Drs. Moh. Bekti Hendrie Anto, M.Sc



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Asmai Ishak, M.Bus, Ph.D

HALAMAN MOTTO


*"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah
Dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"
(Q.S. Asy Syarah : 6-8)*

*"Judikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat
kecuali bagi orang-orang yang khushyuk"
(Q.S. Al-Baqarah : 45)*

*"Ilmu adalah senjata, Sabar adalah pakaian, Yakin adalah penolong, Taat adalah kecintaan, Sholat adalah Kebahagiaan"
(Suri Tauladan Rasulullah)*

*"Hidup tidak mengharuskan kita untuk menjadi yang terbaik
Melainkan hanya supaya kita harus berupaya sebaik mungkin"
(H.Jackson Brown Jr)*

HALAMAN PERSEMBAHAN



*"Segala sesuatu yang aku kerjakan di dunia ini seluruhnya
Ku persembahkan kepada-Mu.....
Yaa Rabbul 'alamiin"*

*"Melalui Ayahanda..... Kau ajarkan kepadaku
Makna setiap "Kata", setiap Senyuman
Dan arti sebuah Kehidupan"*

*"Melalui Ibunda..... Kau kenalkan kepadaku
Artinya sebuah ketabahan, kesabaran, dan ketegaran
Menghadapi kehidupan"*

*"Melalui Kakak-kakak dan Adikku.... Kau berikan kepadaku
Makna indahny kehidupan bersama
Canda, Tawa, dan Tunggismu"*

*"Melalui Kekasihku.... Kau cerahkan hari-hariku
Dengan kasih sayang dan ketulusan cintamu
Semoga kan Abadi....."*

*"Mereka adalah anugerah dan cinta terindah
Dari-Mu, Allahu Yaa Karim....."*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan : Studi Kasus Di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002” yang merupakan suatu prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonom jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Shalawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada semua orang yang mengikuti ajarannya hingga hari akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan baik bersifat moril, materiil, dorongan, serta motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada :

1. Bapak Agus Widarjono, Drs.,MA., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan sabar serta memberikan arahan, motivasi dan dorongan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak dan Ibu Dosen di jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan khususnya Ibu Diana Wijayanti, Dra, M.Si, yang sudi kiranya menyibukkan diri mencari data yang saya minta, dan memberikan masukan berupa ide, kritik dan saran dalam penulisan skripsi ini.
3. Seluruh staf dan karyawan khususnya karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Seluruh staf dan karyawan Biro Pusat Statistik DIY yang telah membantu dalam pengumpulan data-data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, doa, dorongan, perhatian, kritik baik bersifat moril maupun materiil sehingga penulis dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (***Lela sayang kalian.....***)

6. Kakak, Abang dan Adekku : Bang Kur n Kak Mes, Kak Winda, Kak Deni, & adek July, n keponakanku Jimmy and Putri, nenekku Thx to dukungannya Lela kangen banget nech.....
7. Keluarga wa' Wage : Kak Butet, Muklis, Ali, Surya and Adek, Makasih dah ngejagain orang tua lela di sana.
8. Beny makacih to kasih sayang, perhatian, nasehat, kesabarannya ngadepin aku, setia nemeni aku kemana aja . (*Moga Kita Jodoh Yank.....* 😊)
9. Sahabat-sahabatku, Yulia,V3, Sari, Asep, Leny, Supra, Andre, Ipu, Endut (ata),Falah, Rudy & Jangan lupain aku yach...😊
10. Teman KKN KP 110 : Dodo (kodok), Abg Adam, Linda, Wiwin, Ika n Mba' Yanti, Ingat & *Kenangan Terindah kita lalui di Nguntuk-Untuk...*
11. Teman-teman Kostku, Ula, Anry, Mina, Herlin, Ika, Ve, Vivi, Endang, kita bakal pisah nech..... 😊
12. Untuk para ojekku : Asep, Sayank ku, Abang Adam, n Eko makacih banget, kalian emang baik banget.....😊
13. Teman-teman EP '02, klo yang udah lulus buruan cari kerja n bagi yang belum buruan nyusul jangan mo jadi mahasiswa abadi he..he...
14. Mas Fajar, he...he...makacih to kenangannya, aku ga bakalan ngelupain Mas (Jadi malu nech...😊)
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sebagai wacana dan menambah wawasan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis tidak menutup diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat membangun.

Wassalu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, September 2006

Penulis

Lela Dina Pertiwi

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pengesahan Ujian.....	iv
Halaman Kata Pengantar.....	v
Halaman Daftar Isi.....	vii
Halaman Daftar Tabel.....	xi
Halaman Daftar Gambar.....	xiv
Halaman Daftar Lampiran.....	xv
Halaman Abstraksi.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN.....	11
2.1. Keadaan Geografis Di Propinsi Jawa Tengah.....	11

2.2. Penduduk Di Jawa Tengah.....	13
2.2.1. Pendidikan.....	15
2.2.2. Kesehatan.....	16
2.3. Perekonomian Di Jawa Tengah.....	18
2.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	18
2.3.2. Peranan Sektor.....	19
2.4. Keuangan Pemerintah Daerah Di Jawa Tengah.....	21
2.4.1. Penerimaan Daerah.....	22
2.4.2. Pengeluaran Daerah.....	23
2.4.2.1. Pengeluaran Pendidikan.....	23
2.4.2.2. Pengeluaran Kesehatan.....	26
BAB III KAJIAN PUSTAKA.....	30
BAB IV LANDASAN TEORI.....	45
4.1. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	45
4.1.1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	46
4.1.2. Hukum Wagner.....	47
4.1.3. Teori Peacock dan Wiseman.....	51
4.1.4. Keynesian.....	54
4.2. Kebijakan Keuangan Daerah.....	55
4.3. Efisiensi.....	59
4.3.1. Pengertian Efisiensi.....	59
4.3.2. Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	60

BAB V METODE PENELITIAN.....	63
5.1. Jenis Dan Sumber Data.....	63
5.2. Definisi Variabel.....	64
5.3. Metode Analisis Data.....	65
5.3.1. Konsep Dasar DEA (<i>Data Envelopment Analysis</i>).....	65
5.3.2. Formulasi DEA (<i>Data Envelopment Analysis</i>).....	66
5.3.3. Nilai Manajerial DEA.....	68
5.3.4. Keterbatasan DEA.....	69
BAB VI ANALISIS DATA.....	71
6.1. Diskripsi Data.....	71
6.2. Analisa Data.....	72
6.2.1. Tingkat Efisiensi.....	73
6.2.1.1. Pengeluaran Pendidikan.....	73
6.2.1.2. Pengeluaran Kesehatan.....	74
6.2.2. Penyebab Inefisiensi Dan Cara Mengatasinya.....	76
6.2.2.1. Mengatasi Inefisiensi dengan Meminimumkan Input.....	77
6.2.2.2. Mengatasi Inefisiensi dengan Memaksimumkan Output.....	85
BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	96
7.1. Kesimpulan.....	96
7.2. Implikasi.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



DAFTAR TABEL

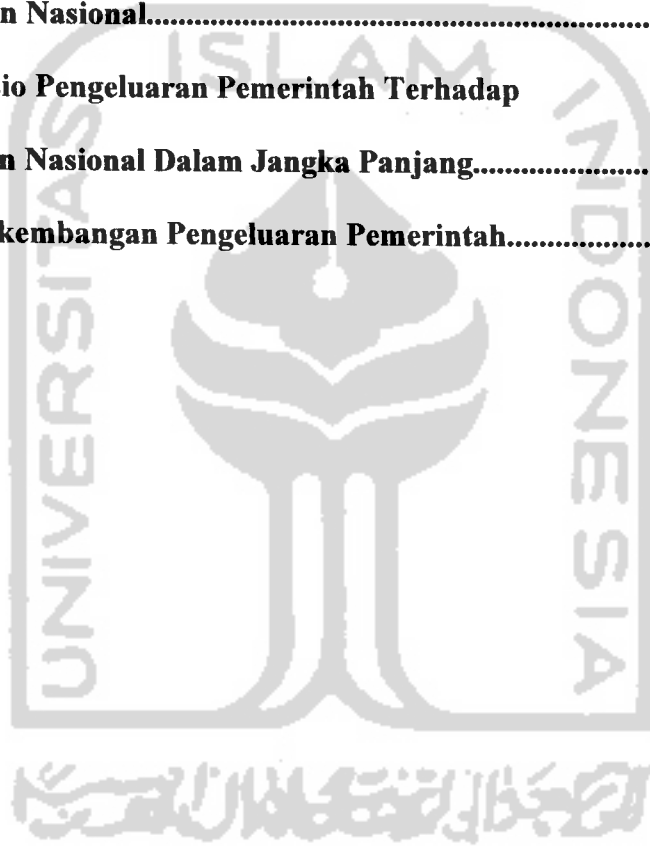
Tabel	Halaman
1.1. Realisasi Pengeluaran Terbesar Untuk Pendidikan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2001-2002 (Juta Rupiah).....	3
1.2. Realisasi Pengeluaran Terbesar Untuk Kesehatan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2001-2002 (Juta Rupiah).....	5
2.1. Penggunaan Lahan Di Jawa Tengah Tahun 1999-2002.....	12
2.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002.....	14
2.3. Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Tahun Ajaran 2002/2003.....	15
2.4. Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002.....	16
2.5. Jumlah Balita Kurang Gizi Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2002.....	17
2.6. PDRB Dan Laju Pertumbuhan Di Propinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 1993 Tahun 1997-2002.....	19
2.7. Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998-2002.....	20

2.8. Realisasi Penerimaan Daerah Otonomi Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2002 (Juta Rupiah).....	22
2.9. Realisasi Pengeluaran Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2001-2002 (Juta Rupiah).....	25
2.10. Realisasi Pengeluaran Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2001-2002 (Juta Rupiah).....	28
3.1. Jenis Input dan Output Yang Digunakan Dalam Model Penelitian.....	35
6.1. Tingkat Efisiensi Pengeluaran Pendidikan Tahun 1999 dan 2002.....	73
6.2. Tingkat Efisiensi Pengeluaran Kesehatan Tahun 1999 dan 2002.....	74
6.3. Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai dengan Meminimumkan Input di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 1999.....	78
6.4. Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai dengan Meminimumkan Input di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2002.....	80
6.5. Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai dengan Meminimumkan Input di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 1999.....	82

6.6. Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai dengan Meminimumkan Input di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2002.....	84
6.7. Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai dengan Memaksimumkan Output pada Sektor Pendidikan Tahun 1999.....	86
6.8. Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai dengan Memaksimumkan Output pada Sektor Pendidikan Tahun 2002.....	89
6.9. Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai dengan Memaksimumkan Output pada Sektor Kesehatan Tahun 1999.....	92
6.10. Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai dengan Memaksimumkan Output pada Sektor Kesehatan Tahun 2002.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Kurva Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional.....	49
4.2. Kurva Rasio Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Nasional Dalam Jangka Panjang.....	50
4.3. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- I. **Data Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan (1999 dan 2002), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup**
- II. **Tabel Efisiensi Sektor Pendidikan Tahun 1999**
- III. **Tabel Peer Sektor Pendidikan dengan Meminimumkan Input Tahun 1999**
- IV. **Tabel Target Sektor Pendidikan dengan Meminimumkan Input Tahun 1999**
- V. **Tabel Efisiensi Sektor Kesehatan Tahun 1999**
- VI. **Tabel Peer Sektor Kesehatan dengan Meminimumkan Input Tahun 1999**
- VII. **Tabel Target Sektor Kesehatan dengan Meminimumkan Input Tahun 1999**
- VIII. **Tabel Efisiensi Sektor Pendidikan Tahun 2002**
- IX. **Tabel Peer Sektor Pendidikan dengan Meminimumkan Input Tahun 2002**
- X. **Tabel Target Sektor Pendidikan dengan Meminimumkan Input Tahun 2002**
- XI. **Tabel Efisiensi Sektor Kesehatan Tahun 2002**

- XII. Tabel Peer Sektor Kesehatan dengan Meminimumkan Input Tahun 2002**
- XIII. Tabel Target Sektor Kesehatan dengan Meminimumkan Input 2002**
- XIV. Tabel Peer Sektor Pendidikan dengan Memaksimumkan Output Tahun 1999**
- XV. Tabel Target Sektor Pendidikan dengan Memaksimumkan Output Tahun 1999**
- XVI. Tabel Peer Sektor Kesehatan dengan Memaksimumkan Output Tahun 1999**
- XVII. Tabel Target Sektor Kesehatan dengan Memaksimumkan Output Tahun 1999**
- XVIII. Tabel Peer Sektor Pendidikan dengan Memaksimumkan Output Tahun 2002**
- XIX. Tabel Target Sektor Pendidikan dengan Memaksimumkan Output Tahun 2002**
- XX. Tabel Peer Sektor Kesehatan dengan Memaksimumkan Output Tahun 2002**
- XXI. Tabel Target Sektor Kesehatan dengan Memaksimumkan Output Tahun 2002**

ABSTRAKSI

Dengan diberlakukannya Otonomi daerah berdasar Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah akan semakin banyak. Karena berkaitan dengan adanya Otonomi Daerah tersebut masing-masing Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam mengatur pemerintahannya, termasuk dalam memperoleh dan mengelola dana untuk membiayai pengeluaran, juga untuk melaksanakan pembangunannya.

Pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam berbagai bidang diharapkan akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Meningkatnya efisiensi sebagai dampak positif dari desentralisasi fiskal didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintahan pusat sehingga diharapkan setiap Rupiah yang dibelanjakan lebih mengena sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Penganggaran di daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini kurang berorientasi pada pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran pembangunan. Terlebih lagi ketidaksiapan kelembagaan di pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin menjauhkan pencapaian-pencapaian yang seharusnya bisa dicapai melalui otonomi daerah dengan masih maraknya praktik-praktik korupsi.

Oleh karena itu perlu dikembangkan pengukuran prestasi daerah dalam mengelola keuangannya yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran pembangunan. Penelitian ini yang berjudul "Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan: Studi Kasus Di Jawa Tengah Tahun 1999 dan 2002", diharapkan dapat sebagai acuan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah di masing-masing daerah.

Untuk mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di kabupaten/kota Jawa Tengah digunakan alat analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) yang mengukur tingkat efisiensi relatif di setiap Unit Kegiatan Ekonomi (UKE). Hasil yang diperoleh dari perhitungan DEA tersebut menunjukkan tingkat efisiensi yang menurun. Di tahun 1999 tingkat efisiensi terbaik pada sektor pendidikan terletak di Kota Salatiga, sedangkan tahun 2002 pencapaian efisiensi terbaik di Kabupaten Boyolali. Di sektor kesehatan pencapaian efisiensi sempurna di Kota Salatiga, sedangkan pada tahun 2002 di Kota Surakarta.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses *multidimensional* yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pada hakekatnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro, 2003: 21).

Dengan diberlakukannya Otonomi daerah berdasar Undang-Undang No. 22 tahun 1999, maka tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah akan semakin banyak. Karena berkaitan dengan adanya Otonomi Daerah tersebut masing-masing Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam mengatur pemerintahannya, termasuk dalam memperoleh dan mengelola dana untuk membiayai pengeluaran, juga untuk melaksanakan pembangunannya.

Dalam hal pembangunan perekonomian daerah, peranan pemerintah dapat dikaji dari sisi anggarannya (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

merupakan instrumen kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan. Instrumen ini diharapkan berfungsi sebagai salah satu komponen pemicu tumbuhnya perekonomian daerah. Pemahaman akan betapa pentingnya peran anggaran sebagai salah satu instrumen kebijakan yang berfungsi memacu perekonomian suatu daerah harus berhadapan dengan kondisi di lapangan yang tidak dapat menjamin berjalannya fungsi tersebut dengan baik. Besar kecilnya pengeluaran pembangunan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah akan menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu daerah.

Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia masih relatif kecil. Menurut Todaro (2003: 404) pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar; terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal ini merupakan hal yang penting. Pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara sedang berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input fungsi produksi agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi.

Tabel 1.1
Realisasi Pengeluaran Terbesar Untuk Pendidikan
Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah
Tahun 2001-2002 (Juta Rupiah)

2001		2002	
Kab/Kota	Pengeluaran (Juta Rp)	Kab/Kota	Pengeluaran (Juta Rp)
Kab. Kendal	14.320,35	Kab. Kendal	41.067,56
Kab. Jepara	14.314,89	Kab. Jepara	26.265,03
Kab. Brebes	11.588,09	Kab. Brebes	14.800,00
Kab. Pekalongan	8.798,12	Kab. Blora	14.450,00
Kab. Banyumas	7.860,05	Kab. Grobogan	9.661,65
Kab. Tegal	7.760,43	Kab. Tegal	8.491,20
Kab. Blora	7.035,02	Kab. Pekalongan	7.658,75

Sumber : BPS, *Statistik Keuangan Pemda Kab/Kota*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat, ada tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang merealisasikan pengeluaran pendidikan dengan pengeluaran terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah. Pada tahun 2001, pengeluaran pendidikan terbesar dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kendal sebesar Rp 14.320,35 juta, pada posisi yang sama di tahun 2002 Kabupaten Kendal masih di level teratas dengan jumlah pengeluaran sebesar Rp 41.067,56 juta, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 187,78 persen. Di peringkat kedua, pengeluaran terbesar dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Jepara sebesar Rp 14.314,89 juta (tahun 2001) dan pada tahun 2002 masih pada Kabupaten yang sama, Kabupaten Kendal meningkatkan pengeluarannya menjadi Rp 26.265,03 juta atau sebesar 83,48 persen. Begitu juga pada Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, masih mempertahankan posisinya masing-masing yaitu di posisi ketiga dan keenam. Perubahan terjadi pada Kabupaten Pekalongan, dimana pengeluaran pengeluarannya menurun hingga ke posisi ketujuh di tahun 2002 menjadi Rp 7.658,75 juta dibanding tahun

sebelumnya berada diposisi keempat sebesar Rp 8.798,12 juta. Perubahan juga terjadi pada Kabupaten Blora, namun pada kabupaten tersebut di tahun 2002 malah mengalami peningkatan pengeluaran hingga sebesar Rp 14.450,00 juta sehingga mengantarkannya pada posisi keempat. Sedangkan di Tahun 2002 untuk Kabupaten Banyumas tidak memasuki posisi teratas dan digantikan oleh Kabupaten Grobogan dengan pengeluaran sebesar Rp 9.661,65 juta.

Untuk pengeluaran kesehatan (lihat tabel 1.2), pada tahun 2002 Kabupaten Jepara merupakan Kabupaten yang mengeluarkan dana terbesar untuk kesehatan sebesar Rp 18.445,89 juta, sedangkan di tahun 2001 Kabupaten Kendal yang menduduki posisi tersebut sejumlah Rp 15.077,35 juta. Untuk Kabupaten Tegal tahun 2002 mengalami penurunan pengeluaran menjadi Rp 9.913,50 juta sehingga di tahun ini posisinya menurun menjadi peringkat keempat. Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Purbalingga, pada tahun 2001 pengeluaran untuk kesehatan sebesar Rp 8.753,68 juta sedangkan tahun 2002 menurun menjadi Rp 7.399,32 juta dan penurunan tersebut membuat posisinya menurun dari yang keempat menjadi keenam. Kabupaten Pemalang dan Cilacap di tahun 2002 tidak lagi termasuk sebagai daerah yang merealisasikan pendapatan terbesar untuk kesehatan. Sedangkan Kota Salatiga menduduki peringkat kelima dengan pengeluaran sebesar Rp 7.871,85 juta (tahun 2002). Kabupaten Semarang masih mempertahankan posisinya akan tetapi pengeluaran yang dilakukan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 5.550,21 juta menjadi Rp 7.075,00 juta atau meningkat sebesar 27,47 persen.

Tabel 1.2
 Realisasi Pengeluaran Terbesar Untuk Kesehatan
 Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah
 Tahun 2001-2002 (Juta Rupiah)

2001		2002	
Kab/Kota	Pengeluaran (Juta Rp)	Kab/Kota	Pengeluaran (Juta Rp)
Kab. Kendal	15.077,35	Kab. Jepara	18.445,89
Kab. Tegal	10.383,80	Kota Tegal	9.995,09
Kab. Jepara	10.053,33	Kab. Tegal	9.913,50
Kab. Purbalingga	8.753,68	Kota Salatiga	7.871,85
Kab. Pemalang	8.097,68	Kab. Wonosobo	7.445,00
Kab. Cilacap	6.546,91	Kab. Purbalingga	7.399,32
Kab. Semarang	5.550,21	Kab. Semarang	7.075,00

Sumber : Statistik Keuangan Pemda Kab/Kota

Desentralisasi pada dasarnya adalah penataan mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar diberikan kepada daerah agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan lebih efektif dan efisien (Kartasmita, 1996 : 342). Pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kebutuhan dan kondisi daerahnya, keinginan masyarakat di daerah masing-masing dibandingkan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat merealisasikan pendapatan yang mereka punya dengan membelanjakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Dengan anggapan bahwa pemerintah daerah lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing, maka seharusnya desentralisasi fiskal mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Tingginya efisiensi pengeluaran daerah, maka output akan bisa ditingkatkan dengan sumber daya yang ada dan pencapaian indikator-indikator pembangunan pun akan bisa lebih terakselerasi.

Namun, otonomi daerah yang telah berjalan sejak Januari 2001, dimaknai dengan berlomba-lombanya semua daerah untuk menggenjot sumber penerimaan

tanpa memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkannya seperti penurunan tingkat pendapatan dan karenanya kesejahteraan petani dan UKM, menurunnya minat investor untuk melakukan investasi di sektor-sektor tertentu karena banyaknya biaya yang harus ditanggung, degradasi kualitas lingkungan hidup, dan sebagainya.

Selain beberapa dampak negatif di atas, dampak lain juga signifikan dalam konteks praktek pemerintahan dan pembangunan nasional adalah penyempitan ruang ekonomi menjadi ruang administrasi yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Setiap daerah berlomba-lomba mengeluarkan regulasi untuk meningkatkan pendapatan daerahnya tanpa memperhitungkan konsekuensinya bagi daerah lain. Secara langsung, tipikal regulasi yang demikian telah membatasi transaksi ekonomi lintas batas, bahkan di dalam lingkup wilayah yang sebenarnya saling tergantung satu sama lain. Praktek yang demikian sekaligus mengingkari bingkai besar dalam pembangunan nasional yang seharusnya berada dalam payung negara kesatuan. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa implementasi otonomi telah diiringi oleh pembentukan “negara-negara boneka” di dalam negara kesatuan (Tarigan, 2005 :46).

Disahkannya PP No. 105 tahun 2000 dan Kepmendagri No. 29 tahun 2002 yang intinya adalah mengatur anggaran berbasis kinerja menjadi momentum penting dalam pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan akselerasi pencapaian sasaran pembangunan. UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara semakin memberikan artikulasi akan pentingnya anggaran berbasis kinerja ini. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja, maka prestasi setiap daerah

dalam pengelolaan keuangannya seharusnya bukan ditekankan hanya pada kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah saja, namun yang juga tidak kalah pentingnya adalah terakselerasinya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan .

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh peran pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah melalui kebijakan pengeluaran pembangunan terutama pada sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Serta mengukur efisiensi kinerja pemerintah khususnya dalam pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah, oleh karena itu penulis mengambil judul **“EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN DAN KESEHATAN : STUDI KASUS DI JAWA TENGAH TAHUN 1999 DAN 2002”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, permasalahannya adalah:

1. Berapa besar tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada sektor pendidikan?
2. Berapa besar tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada sektor kesehatan?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis besarnya tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada sektor pendidikan.
2. Untuk menganalisis besarnya tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah pada sektor kesehatan.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (instansi terkait) sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi dalam penelitiannya yang terkait dengan penelitian ini.
4. Bagi Universitas, sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai pengeluaran pemerintah di Jawa Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi tujuh bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, adapun penyusunan bab tersebut adalah :

BAB I. Latar Belakang Masalah

Bab ini berisi deskripsi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Umum Subyek Yang Diteliti

Bab ini menyajikan tentang tinjauan umum yaitu mengenai administrasi wilayah, letak geografis, keadaan penduduk, keadaan pendidikan, keadaan perekonomian.

BAB III. Kajian Pustaka

Bab ini berisi pengkajian hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

BAB IV. Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai teori yang akan digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti.

BAB V. Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI. Analisis Data dan Pembahasan.

Bab ini berisi analisis dan pembahasan dari hasil analisis.

BAB VII. Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini berisi kesimpulan yang telah diambil dari tulisan yang dibuat serta implikasi yang dikemukakan oleh penulis terhadap hasil yang dibuat.



BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. Keadaan Geografis di Propinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu propinsi di Indonesia yang letaknya cukup strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa, diapit oleh dua propinsi besar Jawa Barat dan Jawa Timur, dan satu Daerah Istimewa Yogyakarta. Sepanjang bagian Utara dan Selatan terbentang pantai yang cukup panjang.

Dengan luas wilayah di kurang lebih 3.254.412 Hektar propinsi Jawa Tengah terbagi dalam 29 Kabupaten dan 6 kota dengan 563 kecamatan 8.553 desa/kelurahan. Daerah yang terluas adalah Kabupaten Cilacap dengan luas 213.851 Hektar atau sekitar 6,57 persen dari luas total propinsi Jawa Tengah. Sedangkan Kota Magelang merupakan daerah yang memiliki wilayah paling kecil yaitu hanya seluas 1.812 Hektar. Topografi Propinsi Jawa Tengah terdiri dari wilayah daratan sebagai berikut :

- Ketinggian antara 0-100 m dari permukaan laut yang memanjang disepanjang Pantai Utara dan Selatan seluas 53,3 %.
- Ketinggian 100-500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau seluas 27,4 %.
- Ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut seluas 14,7 %.
- Ketinggian diatas 1000 m dari permukaan laut seluas 4,6 %.

Luas penggunaan lahan di Jawa Tengah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Penggunaan Lahan di Jawa Tengah
Tahun 1999-2002

Tahun	Lahan sawah (Ha)	Bukan Lahan Sawah (Ha)
1999	1.002.306	2.252.106
2000	998.008	2.256.404
2001	999.136	2.255.276
2002	998.456	2.255.956

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2003

Luas lahan sawah di propinsi Jawa Tengah sebesar 995,47 ribu hektar (30,59 %) dan lahan bukan sawah sebesar 2,26 juta hektar (69,41 persen). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, luas lahan sawah tahun 2002 menurun sebesar 0,07 persen, sebaliknya luas bukan lahan sawah mengalami perkembangan sebesar 0,03 persen. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan teknis (39,26 persen), berpengairan setengah teknis, sederhana, pengairan desa/non PU, tadah hujan dan lain-lain.

Suhu udara rata-rata maksimum dan minimum menurut stasiun di Jawa Tengah tahun 2002 yaitu maksimum 33,9 °C dan minimum 18,1 °C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata dari 73 – 86 %. Curah hujan tertinggi tercatat di Kebumen yaitu 3.5578 mm dan hari hujan terbanyak di Cilacap sebesar 204 hari (Jawa Tengah Dalam Angka, 2003 : 3).

2.2. Penduduk di Jawa Tengah

Berdasarkan data dari BPS Propinsi Jawa Tengah (lihat tabel 2.2), jumlah penduduk di Jawa Tengah tahun 2002 adalah 31.691.866 jiwa. Dibandingkan tahun 2001 (31.063.818 jiwa) terjadi penambahan jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 628.048 jiwa (2,02 persen). Penyebaran penduduk Jawa Tengah belum secara merata. Rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tercatat sebesar 973,81 jiwa setiap kilometer persegi, dimana wilayah terpadat adalah Kota Surakarta dengan tingkat kepadatan sekitar 11 ribu setiap kilometer persegi. Sementara itu, jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2002 di Kabupaten Brebes sebanyak 1.728.808 jiwa dan terendah di Kota Magelang sebanyak 116.498 jiwa. Jumlah rumah tangga di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari sebesar 7,99 juta pada tahun 2001 menjadi 8,18 juta pada tahun 2002 atau naik sekitar 2,38 persen. Berdasarkan data banyaknya rumah tangga dan rata-rata anggota rumah tangga menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, tahun 2002 rata-rata penduduk per rumah tangga tercatat sebesar 3,9 jiwa (Jawa Tengah Dalam Angka, 2003 : 55-56).

Tabel 2.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Km ²)
Kabupaten :			
1. Cilacap	2.138,51	1.630.832	762,60
2. Bayumas	1.327,59	1.472.122	1.108,87
3. Purbalingga	777,65	795.874	1.023,43
4. Banjarnegara	1.069,74	848.317	793,01
5. Kebumen	1.282,74	1.176.102	916,87
6. Purworejo	1.034,82	705.272	681,54
7. Wonosobo	984,68	750.939	762,62
8. Magelang	1.085,73	1.127.714	1.038,67
9. Boyolali	1.015,07	906.530	893,07
10. Klaten	655,56	1.167.613	1.781,09
11. Sukoharjo	466,66	799.493	1.713,22
12. Wonogiri	1.822,37	974.353	534,66
13. Karanganyar	772,20	786.557	1.018,59
14. Sragen	946,49	855.948	904,34
15. Grobogan	1.975,85	1.289.837	652,85
16. Blora	1.794,40	821.588	457,86
17. Rembang	1.014,10	566.288	558,41
18. Pati	1.491,20	1.171.785	785,80
19. Kudus	425,17	718.253	1.689,33
20. Jepara	1.004,16	999.635	995,49
21. Demak	897,43	1.009.863	1.125,28
22. Semarang	946,86	842.242	889,51
23. Temanggung	870,23	710.991	817,02
24. Kendal	1.002,27	859.471	857,52
25. Batang	788,95	674.307	854,69
26. Pekalongan	836,13	819.397	979,99
27. Pemasang	1.011,90	1.343.951	1.328,15
28. Tegal	879,70	1.410.057	1.602,88
29. Brebes	1.657,73	1.728.808	1.042,88
Kota :			
30. Magelang	18,12	116.498	6.429,25
31. Surakarta	44,03	488.168	11.087,17
32. Salatiga	52,96	163.079	3.079,29
33. Semarang	373,67	1.455.994	3.896,47
34. Pekalongan	44,96	265.829	5.912,57
35. Tegal	34,49	238.059	6.902,26
Jumlah (Provinsi)	32.544,12	31.691.866	65.877,30

Sumber : BPS, Provinsi Jawa Tengah

2.2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya dasar untuk menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, pengajaran, dan atau peranannya di masa yang akan datang. Peran pendidikan dalam pembangunan sangat penting dalam rangka upaya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu berkompetisi dalam tatanan kehidupan global serta menghadapi persaingan di masa depan.

Data pendidikan merupakan salah satu dasar indikator pembangunan manusia. Dengan tingginya indikator pembangunan manusia diharapkan dapat memberikan input bagi perekonomian melalui pengembangan usaha mandiri, UKM, serta inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Data pendidikan yang bersumber dari dinas pendidikan mencakup data pendidikan pra sekolah dasar, sekolah dasar, lanjutan pertama dan lanjutan atas. Berikut ini tabel jumlah sekolah, kelas, guru dan murid tahun ajaran 2002/2003.

Tabel 2.3
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid
Tahun Ajaran 2002/2003

NO	Tingkat Pendidikan	Sekolah			Guru			Murid		
		negeri	swasta	jumlah	Negeri	swasta	Jumlah	Negeri	swasta	Jumlah
1	TK	28	10.916	10.944	164	24.546	270.710	2.532	411.426	413.958
2	SD	20.100	629	20.729	147.424	6.098	153.522	3.431.418	121.129	3.552.547
3	SLTP	1.407	1.250	2.657	43.045	326.313	369.358	832.399	326.313	1.158.712
4	SLTA	416	1.138	1.554	18.970	29.943	48.913	296.713	465.104	761.817

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2003

2.2.2. Kesehatan

Peningkatan status kesehatan dari gizi dalam suatu masyarakat sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas manusia dalam aspek lainnya, seperti pendidikan dan produktivitas tenaga kerja. Tercapainya kualitas kesehatan dan gizi yang baik tidak hanya penting untuk generasi sekarang tetapi juga bagi generasi berikutnya.

Tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai sangat diperlukan dalam upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat. Hal ini akan terwujud bila adanya dukungan pemerintah dan swasta sekaligus.

Tabel 2.4
Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan
Di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2002

NO	FASILITAS KESEHATAN	JUMLAH
1.	Rumah Sakit	140
2.	Rumah Sakit Jiwa	10
3.	Rumah Sakit Bersalin	19
4.	Lainnya	20
5.	Puskesmas	845
6.	Puskesmas Pembantu	1.854
7.	Puskesmas Keliling	768
8.	Posyandu	45.845
9.	Polindes	4.041
10.	Rumah Bersalin	407
11.	Balai Pengobatan/Klinik	939
12.	Apotik	976
13.	Toko Obat	387
14.	GFK	35
15.	Industri Obat Tradisional	115
16.	Industri Kecil Obat Tradisional	479
17.	Praktek Dokter Bersama	38
18.	Praktek Dokter Perorangan	5.802

Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota

Sejumlah penyakit akan menjadi sangat mematikan jika dikombinasikan dengan penyakit lain. Kekurangan gizi adalah sebuah bentuk penyakit, dan keberadaannya merupakan faktor penting yang membuat seorang anak mudah tertular penyakit dan meninggal karenanya. Meskipun didalam surat kematian diterangkan bahwa penyebab kematiannya adalah dehidrasi karena diare, atau karena penyakit menular, namun dalam banyak hal kematian tidak akan terjadi tanpa kekurangan gizi sebagai faktor penunjangnya.

Tabel 2.5
Jumlah Balita Kurang Gizi
Menurut Kabupaten/Kota Jawa Tengah
Tahun 2002

Kabupaten/Kota	Balita Kurang Gizi (%)	Kabupaten/Kota	Balita Kurang Gizi (%)
Kab. Cilacap	28,0	Kab. Kudus	23,9
Kab. Banyumas	22,2	Kab. Jepara	27,2
Kab. Purbalingga	27,6	Kab. Demak	38,7
Kab. Banjarnegara	20,8	Kab. Semarang	14,8
Kab. Kebumen	19,0	Kab. Temanggung	23,0
Kab. Purworejo	21,3	Kab. Kendal	26,2
Kab. Wonosobo	23,7	Kab. Batang	29,9
Kab. Magelang	24,4	Kab. Pekalongan	26,2
Kab. Boyolali	11,8	Kab. Pemasang	31,2
Kab. Klaten	19,7	Kab. Tegal	32,1
Kab. Sukoharjo	22,1	Kab. Brebes	37,0
Kab. Wonogiri	20,1	Kota Magelang	17,8
Kab. Karanganyar	13,7	Kota Surakarta	11,9
Kab. Sragen	17,6	Kota Salatiga	9,9
Kab. Grobogan	27,8	Kota Semarang	19,1
Kab. Blora	36,5	Kota Pekalongan	24,3
Kab. Rembang	28,4	Kota Tegal	25,5
Kab. Pati	26,3		

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2003

Pada tabel 2.5 dapat dilihat, persentase tertinggi balita kurang gizi terdapat di Kabupaten Demak sebesar 38,7 persen, disusul oleh Kabupaten Brebes sebesar 37,0 persen dan Kabupaten Blora sebesar 36,5 persen. Sedangkan persentase terendah terdapat di Kota Salatiga sebesar 9,9 persen. Untuk Kabupaten/Kota lainnya rata-rata persentase balita kekurangan gizi dibawah 30 persen.

2.3. Perekonomian di Jawa Tengah

Secara nasional, perbaikan ekonomi pasca krisis sudah nampak beberapa tahun terakhir, meskipun masih diwarnai kondisi politik yang belum kondusif. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi memberikan tanda ke arah perbaikan ekonomi yang lebih baik.

Sama halnya dengan kondisi ekonomi nasional, kinerja ekonomi Jawa Tengah tahun 2002 mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,48 persen, sedikit lebih baik dibanding tahun 2001 (3,33 persen). Secara keseluruhan sektor ekonomi tahun 2002 mengalami peningkatan (tumbuh positif).

2.3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi yang diperlukan untuk evaluasi dan perencanaan ekonomi makro, biasanya dilihat dari pertumbuhan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun berdasarkan atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan penambahan barang dan jasa di suatu wilayah.

Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan yang di dalamnya sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

Perkembangan PDRB Jawa Tengah setiap tahunnya semakin meningkat. PDRB Jawa Tengah pada tahun 2002 atas dasar harga berlaku sebesar Rp 156.418,30 milyar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2001 (Rp 136.131,48 milyar). PDRB tahun 2002 atas dasar harga konstan 1993 juga mengalami peningkatan menjadi Rp 43.775,69 milyar dibandingkan tahun 2001 sebesar Rp 42.305,18 milyar.

Tabel 2.6
PDRB dan Laju Pertumbuhan di Propinsi Jawa Tengah
Atas Dasar Harga Konstan 1993
Tahun 1997-2002

Tahun	PDRB (Miyar Rp)	Pertumbuhan (%)
1997	43.129,84	
1998	38.065,27	-11,74
1999	39.394,51	3,49
2000	40.941,67	3,93
2001	42.305,18	3,33
2002	43.775,69	3,48

Sumber : Pendapatan Regional Jawa Tengah Tahun 2002

Pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2002 secara agregat cukup dinamis. Sejak terjadinya krisis pada pertengahan tahun 1997 dan tahun 1998, pertumbuhan ekonomi tahun tersebut menurun drastis sekitar minus 11,74 persen. Namun pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi sudah menunjukkan gejala pemulihan dengan pertumbuhan yang mencapai angka positif sebesar 3,49 persen. Pada tahun 2000 pertumbuhan ekonomi terus mengalami kenaikan hingga 3,93 persen. Walaupun pada tahun berikutnya mengalami penurunan namun tidak terlalu besar, rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh diatas sekitar

3 persen. Ini merupakan proses perbaikan dari kondisi perekonomian yang mulai stabil yang berdampak peningkatan pada segala sektor ekonomi di Propinsi Jawa Tengah.

2.3.2. Peranan Sektor

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk dari suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing sektor ekonomi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Hal tersebut menggambarkan ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi dari masing-masing sektor ekonomi.

Tabel 2.7
Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 1998-2002

Sektor	1998	1999	2000	2001	2002
1. Pertanian	-3,35	3,07	3,31	1,69	0,80
2. Pertambangan dan Penggalian	-7,11	5,49	2,49	8,82	3,98
3. Industri Pengolahan	-14,61	2,82	3,19	3,21	4,33
4. Listrik, Gas dan Air Minum	3,64	10,28	9,66	3,12	10,82
5. Bangunan	-32,10	11,93	1,49	2,58	4,42
6. Pedagang, Hotel, dan Restoran	-9,00	3,20	6,71	4,77	3,64
7. Pengangkutan dan Komunikasi	-0,09	10,29	5,45	8,13	5,39
8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	-34,20	3,77	2,99	1,04	3,22
9. Jasa-jasa	-9,60	-0,20	1,27	1,71	3,71
PDRB Total	-11,74	3,49	3,93	3,33	3,48

Sumber : Pendapatan Regional Jawa tengah Tahun 2002

Pada tabel 2.7 terlihat laju pertumbuhan seluruh sektor ekonomi pada tahun 1998-2002. tahun 1998, dimana pada tahun tersebut terjadi puncak krisis ekonomi, hampir semua sektor mengalami laju pertumbuhan negatif. Dalam tahun 1999 ditandai mulai membaiknya perekonomian, seluruh sektor ekonomi berhasil

bangkit dengan laju pertumbuhan positif kecuali sektor jasa-jasa masih mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -0,20 persen. Selanjutnya tahun 2000 sampai dengan 2002 seluruh sektor ekonomi sudah menunjukkan pertumbuhan ke arah positif.

Pada tahun 2002, sektor Listrik, Gas, dan Air Minum mengalami pertumbuhan yang paling besar dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 10,82 persen. Kenaikan sektor Listrik, Gas dan Air Minum diakibatkan terkait langsung oleh kenaikan sektor industri yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 4,33 persen. Sedangkan sektor pertanian merupakan sektor dengan pertumbuhan terendah yaitu sebesar 0,80 persen. Rendahnya pertumbuhan sektor Pertanian ini disebabkan kurang bagusnya musim dan iklim yang terjadi pada tahun 2002 dibandingkan dengan tahun 2001.

2.4. Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

Keuangan daerah merupakan tatanan keseluruhan atas perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan pembelanjaan daerah (APBD). Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang (Suparmoko, 2002 : 26).

2.4.1. Penerimaan Daerah

Untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh daerah diperlukan penerimaan daerah yang dapat merealisasikan pembangunan di daerahnya. Penerimaan daerah sebagian besar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditingkat propinsi merupakan sumber pendapatan murni daerah untuk mempercepat kemandirian daerah Tk.I dibanding pendanaan, dalam arti kata mampu membiayai, mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri, maka Pemerintah Daerah Tk. I meningkatkan kemampuannya agar semakin dapat mengusahakan penggalian sumber Pendapatan Asli Daerahnya terlebih dahulu sesuai dengan keadaan dan potensi perekonomian di daerah masing-masing. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) penerimaan daerah diperoleh dari Bagian Sisa lebih Perhitungan Tahun Yang Lalu, Bagian Dana Perimbangan, Bagian Penerimaan Lainnya dan Bagian Pinjaman Pemerintah Daerah.

Tabel 2.8
Realisasi Penerimaan Daerah Otonomi Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2001-2002
(Juta Rupiah)

Rincian	2001	2002
1. Bagian Sisa lebih Perhitungan Anggaran	216,07	377,17
2. Bagian Pendapatan Asli Daerah	674,13	746,00
a. Pajak Daerah	199,71	232,85
b. Retribusi Daerah	342,51	388,26
c. Bagian Laba BUMD	13,34	20,24
d. Penerimaan PAD Lainnya	118,57	104,64
3. Dana Perimbangan	8.036,03	8.733,83
4. Penerimaan Lainnya	311,64	242,21
5. Pinjaman Pemerintah Daerah	78,63	38,68
Jumlah/Total	9.999,63	10.883,88

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Kab/Kota

Pada tabel 2.8 menunjukkan penerimaan daerah di Propinsi Jawa Tengah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2002, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp 746,00 juta atau sebesar 10,66 persen dibanding tahun 2001 (Rp 674,13 juta). Penerimaan terbesar disumbangkan dari Dana Perimbangan, dimana jumlah penerimaan tahun 2002 mencapai Rp 8.733,83 juta . Kemudian penerimaan terendah di peroleh dari Pinjaman Pemerintah Daerah sebesar Rp 38,68 Juta.

2.4.2. Pengeluaran Daerah

Daerah yang telah memiliki wewenang penuh dan sebagai badan hukum mempunyai otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dalam hal ini pengeluaran daerah terdiri dari dua jenis yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari sembilan komponen diantaranya belanja pegawai, belanja barang, biaya pemeliharaan dan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan dirinci menurut sektoral.

2.4.2.1. Pengeluaran Pendidikan

Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang mungkin lebih penting dari investasi modal fisik. Ditemukan dalam berbagai penelitian di sejumlah negara, pendidikan memberi sumbangan amat besar bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah

berkembangnya kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan, pengetahuan, keterampilan, keahlian kemampuan dan wawasan mereka agar mampu bekerja lebih produktif baik secara perorangan maupun kelompok. Pendidikan juga berfungsi dalam meningkatkan kesadaran sosial, politik dan budaya serta memacu penguasaan dan pendayagunaan teknologi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan sosial. Karena itu hampir semua negara di dunia menempatkan pembangunan pendidikan sebagai kebijakan yang memiliki prioritas tertinggi. Untuk negara yang sedang berkembang, pendidikan yang baik hanya bisa dicapai jika adanya campur tangan pemerintah di bidang pendidikan. Pengeluaran di bidang pendidikan yang terjadi selama ini pada negara-negara berkembang relatif kecil (Andrianus, 2003 : 124).

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang relatif besar mutlak dilakukan terutama untuk mengejar ketertinggalan pendidikan negara Indonesia dan negara-negara lain. Selain itu peningkatan pendidikan akan membawa dampak yang positif terhadap penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan penduduk serta dampak positif lainnya.

Pada saat ini disadari bahwa sektor pendidikan merupakan sektor berperan besar dalam pembangunan ekonomi suatu negara termasuk Indonesia. Sebagai wujud kepedulian terhadap sektor ini, maka pemerintah meluncurkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu pasal menyebutkan tentang aspek alokasi *budgeting* dalam sektor pendidikan yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan

kedinasan harus dialokasikan minimal 20 % dari APBN dan APBD (Wahyudi, 2004 : 46).

Tabel 2.9
Realisasi Pengeluaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Kab/Kota Jawa Tengah
Tahun 2001-2002 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Pendidikan	
	2001	2002
1. Kab. Cilacap	4.587,77	-
2. Kab. Banyumas	7.860,05	5.461,6
3. Kab. Purbalingga	6.685,51	58.47,32
4. Kab. Banjarnegara	2.717,00	4.538,00
5. Kab. Kebumen	3.645,49	4.552,50
6. Kab. Purworejo	3.482,41	2.555,99
7. Kab. Wonosobo	1.901,12	3.407,00
8. Kab. Magelang	2.110,88	2.670,00
9. Kab. Boyolali	2.137,35	1.091,25
10. Kab. Klaten	1.817,99	3.062,92
11. Kab. Sukoharjo	3.749,87	3.392,13
12. Kab. Wonogiri	4.582,61	3.614,27
13. Kab. Karanganyar	586,47	2.345,72
14. Kab. Sragen	3.358,69	1.863,66
15. Kab. Grobogan	832,71	9.661,65
16. Kab. Blora	7.035,02	14.450,00
17. Kab. Rembang	6.597,57	4.973,69
18. Kab. Pati	2.565,19	-
19. Kab. Kudus	3.995,06	4.227,15
20. Kab. Jepara	14.314,89	26.265,03
21. Kab. Demak	658,38	-
22. Kab. Semarang	5.861,79	4.550,18
23. Kab. Temanggung	2.967,97	4.237,20
24. Kab. Kendal	14.320,35	41.067,56
25. Kab. Batang	6.904,42	6.078,50
26. Kab. Pekalongan	8.798,12	7.658,75
27. Kab. Pemasang	4.679,44	6.426,00
28. Kab. Tegal	7.760,43	8.491,20
29. Kab. Brebes	11.588,09	14.800,00
30. Kota Magelang	1.063,32	1.824,21
31. Kota Surakarta	624,9	2.982,40
32. Kota Salatiga	806,31	1.571,80
33. Kota Semarang	6.928,72	4.343,87
34. Kota Pekalongan	2.673,87	5.814,93
35. Kota Tegal	1.832,01	6.160,05

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Kab/Kota

Berdasarkan tabel 2.8 Kabupaten Kendal masih menduduki urutan pertama tertinggi terhadap pengeluaran pemerintah daerah untuk pendidikan, dan mengalami lonjakan yang sangat tajam dari Rp 14.320,35 juta pada tahun 2001 menjadi 41.067,56 juta pada tahun 2002. Hal sama juga terjadi pada Kabupaten Jepara yang mengalami peningkatan pada pengeluaran pendidikan dari Rp 14.314,89 juta di tahun 2001 meningkat sebesar 83,84 persen hingga menjadi Rp 26.265,03 juta di tahun 2002. Sedangkan untuk Kota Surakarta pengeluaran untuk pendidikan cenderung rendah, ini dapat dilihat dari jumlah pengeluaran pendidikan di tahun 2001 hanya sebesar Rp 624,90 juta jauh tertinggal dari kabupaten/kota yang lain di Jawa Tengah, walaupun di tahun 2002 mengalami peningkatan sebesar 377,26 persen sehingga menjadi Rp 2.982,40 juta. Hal yang serupa terjadi pada Kota Salatiga, pada tahun 2001 pengeluaran untuk pendidikan sebesar Rp 806,31 juta meningkat pada tahun 2002 menjadi Rp 1.571,80 juta.

2.4.2.2. Pengeluaran Kesehatan

World Health Organization (WHO), sebuah lembaga penting PBB yang menangani masalah kesehatan global, mencantumkan definisi kesehatan pada halaman web-nya : “sebuah kondisi kesejahteraan fisik, mental, serta sosial, dan bukan sekedar bebas penyakit serta kelemahan fisik” (Todaro, 2003 : 440). Kesehatan merupakan hal yang sentral dalam mengentaskan kemiskinan, karena masyarakat sering kurang mendapat informasi mengenai kesehatan akibat kemiskinan. Seperti sistem pendidikan, pelayanan kesehatan publik ini sering kali

lebih memihak pada orang-orang kaya dan mempunyai koneksi kuat. Akibatnya, sistem kesehatan sering menggunakan dana publik secara tidak efisien.

Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan merupakan proiritas dalam pembangunan. Kesehatan bukan hanya tujuan utama, tetapi juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap tingkat pendapatan. Strauss dan Thomas menyimpulkan bahwa “bukti-bukti yang ada menunjukkan dampak positif dari perbaikan gizi terhadap upah, paling tidak diantara orang-orang yang mengalami kurang gizi”. Masyarakat yang sehat adalah prasyarat dari keberhasilan pembangunan (Todaro, 2003 : 451).

Untuk menanggulangi masalah ini, pemerintah Indonesia tidak hanya berpangku tangan saja. Berbagai upaya telah dilaksanakan dalam pembangunan kesehatan, antara lain upaya peningkatan dan perbaikan terhadap derajat kesehatan masyarakat, upaya pelayanan kesehatan, sarana kesehatan dan sumber daya kesehatan. Pemerintah daerah juga turut memperhatikan kesejahteraan masyarakat di daerahnya salah satunya dengan memberikan kontribusi dana di bidang kesehatan.

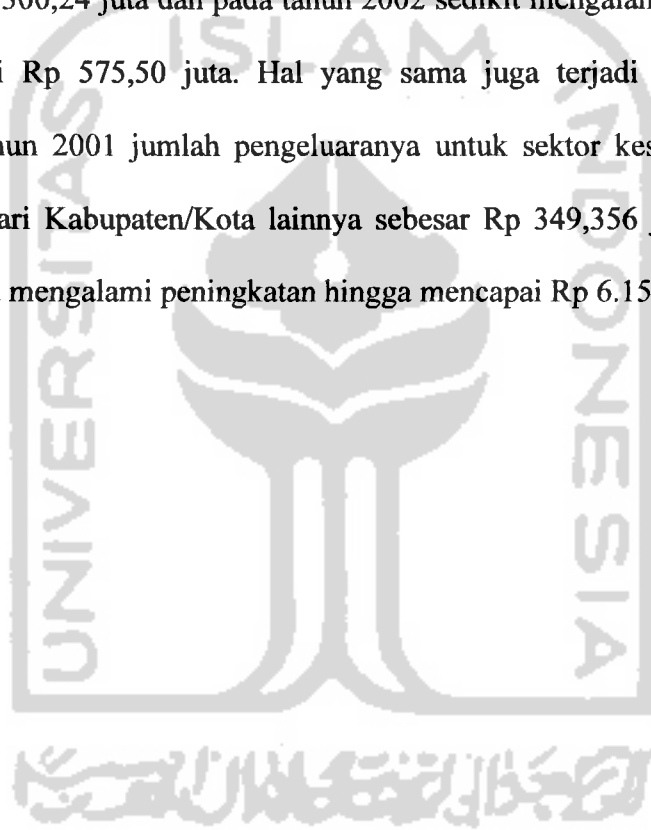
Pemerintah daerah di Jawa Tengah telah mengupayakan pembangunan kesehatan dan menunjukkan hasil yang cukup baik, namun masih ada beberapa program kesehatan yang belum mencapai optimal. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan juga direalisasikan ke daerah-daerah di Jawa Tengah. Di Kabupaten/kota Jawa Tengah menyisihkan pendapatannya untuk pengeluaran kesehatan, guna memperkecil penyebaran penyakit khususnya untuk orang miskin.

Tabel 2.10
Realisasi Pengeluaran Kesehatan
Pemerintah Daerah Kab/Kota Jawa Tengah
Tahun 2001-2002 (Juta Rupiah)

Kabupaten/Kota	Kesehatan	
	2001	2002
1. Kab. Cilacap	6.546,91	5.369,60
2. Kab. Banyumas	3.960,11	1.321,23
3. Kab. Purbalingga	8.753,68	7.399,32
4. Kab. Banjarnegara	3.170,50	2.595,00
5. Kab. Kebumen	1.290,90	2.331,15
6. Kab. Purworejo	3.305,63	1.348,32
7. Kab. Wonosobo	1.389,96	7.445,00
8. Kab. Magelang	1.159,53	1.518,81
9. Kab. Boyolali	3.795,50	1.954,79
10. Kab. Klaten	3.053,20	2.342,72
11. Kab. Sukoharjo	3.018,26	2.771,27
12. Kab. Wonogiri	1.984,04	2.006,60
13. Kab. Karanganyar	1.384,03	844,25
14. Kab. Sragen	2.085,83	1.609,00
15. Kab. Grobogan	349,36	6.157,53
16. Kab. Blora	3.651,56	4.905,50
17. Kab. Rembang	4.816,87	5.669,00
18. Kab. Pati	3.806,02	-
19. Kab. Kudus	3.042,39	2.730,27
20. Kab. Jepara	10.053,33	18.445,89
21. Kab. Demak	0	311,00
22. Kab. Semarang	5.550,21	7.075,00
23. Kab. Temanggung	2.494,78	5.470,60
24. Kab. Kendal	15.077,35	2.816,31
25. Kab. Batang	4.594,08	2.850,50
26. Kab. Pekalongan	1.102,00	1.157,49
27. Kab. Pemasang	8.097,68	2.145,00
28. Kab. Tegal	10.383,80	9.913,50
29. Kab. Brebes	5.475,96	3.146,50
30. Kota Magelang	1.079,06	2.258,65
31. Kota Surakarta	300,24	575,50
32. Kota Salatiga	1.219,52	7.871,85
33. Kota Semarang	4.824,57	5.878,96
34. KotaPekalongan	2.189,68	1.672,49
35. KotaTegal	992,83	9.955,09

Sumber : BPS, Statistik Keuangan Pemda Kab/Kota

Berdasarkan Tabel 2.10 pengeluaran pemerintah untuk kesehatan di Kabupaten Kendal pada tahun 2001 menduduki posisi tertinggi sebesar Rp 15.077,35 juta. Namun di tahun 2002 pengeluaran terbesar dilakukan oleh pemerintah daerah di Kabupaten Jepara sebesar Rp 18.445,89 juta. Pengeluaran terendah berada pada Kota Surakarta, pada tahun 2001 pengeluarannya hanya senilai Rp 300,24 juta dan pada tahun 2002 sedikit mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 575,50 juta. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Grobogan, di tahun 2001 jumlah pengeluarannya untuk sektor kesehatan sangat jauh tertinggal dari Kabupaten/Kota lainnya sebesar Rp 349,356 juta namun di tahun 2002 justru mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 6.157,53 juta.



BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Guna menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki arti penting sehingga diketahui kontribusi penelitian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, maka penulis mengambil beberapa acuan ataupun pedoman dari penelitian sebelumnya. Dibawah ini disajikan beberapa penelitian sebelumnya yang erat kaitannya dengan penelitian ini, antara lain :

1. Penelitian Akhmad Syakir Kurnia

Akhmad Syakir Kurnia mengadakan penelitian mengenai “Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik, *Metode Free Disposable Hull (FDH)* Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2001-2002”. Menurutnya, pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam berbagai bidang diharapkan akan meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah. Meningkatnya efisiensi sebagai dampak positif dari desentralisasi fiskal didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah daerah dianggap lebih tahu akan kebutuhan dan kondisi daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat sehingga diharapkan setiap Rupiah yang dibelanjakan lebih mengena sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi

pengeluaran belanja pemerintah daerah diartikan ketika setiap Rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien.

Namun, otonomi daerah di Indonesia yang telah berjalan hampir lima tahun sejak efektif dimulai tahun 2001 sejauh ini lebih diterjemahkan oleh pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi penerimaan daerah. Banyak sekali peraturan-peraturan daerah (PERDA) dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menarik PAD dari sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang dampaknya seringkali justru tidak kondusif bagi perekonomian daerah dan kontraproduktif terhadap tujuan desentralisasi fiskal. Penganggaran di daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini kurang berorientasi pada pencapaian kinerja yaitu pencapaian sasaran pembangunan. Terlebih lagi ketidaksiapan kelembagaan di pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin menjauhkan pencapaian-pencapaian yang seharusnya bisa dicapai melalui otonomi daerah dengan masih maraknya praktek-praktek korupsi.

Oleh karena itu, perlu dikembangkan model-model pengukuran prestasi pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran pembangunan. Model yang dikembangkan untuk mengukur efisiensi dan kinerja sektor publik ini diharapkan bisa menjadi salah satu kriteria untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik melalui pengeluaran belanja tampak dari alokasi pengeluaran belanja pemerintah daerah. Penyediaan layanan publik yang maksimal ini seharusnya menjadi tujuan dari setiap Rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain seberapa efisien setiap rupiah yang dibelanjakan untuk mencapai sasaran pembangunan menjadi satu permasalahan yang penting dalam alokasi pengeluaran pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis, dimana nantinya dapat menyempurnakan penggunaan alat analisis *Free Disposable Hull* (FDH). Alat-alat analisis tersebut adalah *Public Sector Performance* (PSP) dan *Public Sector Efficiency* (PSE).

Nilai PSP tergantung pada indikator-indikator kinerja ekonomi tertentu, yang terdiri dari indikator “musgravian” standar dan variabel sosial ekonomi.

$$PSP_i = \sum_{j=1}^n PSP_{ij}$$

dimana :

- i : unit pemerintah i atau dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah i.
- j : kinerja unit pemerintah pada sektor j atau dalam penelitian ini adalah kinerja pemerintah daerah pada sektor j.

Nilai PSP merupakan fungsi dari berbagai kinerja sosio ekonomi.

$$PSP_{ij} = f(I_k)$$

dimana :

- i : indikator “musgravian” standar dan variabel sosio ekonomi.
- k : indikator-indikator dalam masing-masing variabe sosio-ekonomi.

Oleh karena itu, perubahan pada *public sector performance*, tergantung pada perubahan nilai-nilai indikator standar musgravian dan indikator sosio-ekonomi yang relevan, atau dapat dinotasikan sebagai berikut :

$$\Delta PSP_{ij} = \sum_{i=k}^n \frac{\partial f}{\partial I_k} \Delta I_k$$

Untuk menaksir PSP penelitian ini menggunakan 5 sub indikator kinerja publik, yaitu kesehatan, pendidikan, distribusi, stabilitas dan kinerja ekonomi. Dua sub indikator pertama adalah indikator sosio-ekonomi. Sedangkan tiga indikator berikutnya adalah indikator kinerja yang memacu pada indikator kinerja publik *Musgrave (Standard Musgravian Indicators)*.

Tahap berikutnya adalah menghitung indikator efisiensi sektor publik. Indikator efisiensi publik dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$PSE_i = \frac{PSP_i}{PEX_i}$$

$$\frac{PSP_i}{PEX_i} = \sum_{j=1}^n \frac{PSP_{ij}}{PEX_{ij}}$$

Marginal productivity dari pengeluaran publik bernilai positif dan menurun, maka ;

$$\frac{\partial PSE_{ij}}{\partial PEX_{ij}} > 0, \frac{\partial^2 PSE_{ij}}{\partial PEX_{ij}^2} < 0$$

Dimana, PEX : Rata-rata pengeluaran publik (normalisasi).

Metode perhitungan efisiensi sektor publik (PSE) dengan menggunakan metode diatas terbatas hanya untuk menghasilkan skor efisiensi tetap tidak bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan dengan melakukan simulasi manajerial

untuk meningkatkan nilai efisiensi. Oleh karena itu, dalam tulisan ini pengukuran skor efisiensi juga dilakukan dengan menggunakan metode *Free Disposable Hull (FDH)*. FDH digunakan untuk mengukur efisiensi relatif unit-unit produksi. Dalam analisis FDH, seorang produsen dikatakan relatif tidak efisien jika terdapat produsen lain yang mampu menghasilkan tingkat output yang sama dengan menggunakan input yang lebih sedikit.

Dengan mengambil studi kasus Kabupaten/Kota di Jawa Tengah maka, berdasarkan hasil perhitungan indikator kinerja pemerintah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, *PSP Indicators*, terlihat bahwa ternyata Kabupaten/Kota yang proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB nya tinggi tidak serta merta memiliki angka indikator yang tinggi. Demikian pula dalam perhitungan efisiensi dengan *Pubic Sector Efficiency* maupun *Free Disposable Hull*, kabupaten/kota yang proporsi pengeluaran pemerintah terhadap PDRB tidak selalu relatif efisien dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya alokasi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah tidak berkorelasi dengan efisiensi dalam penggunaannya.

2. Penelitian Tri Kunawangsih

Tri Kunawangsih mengadakan penelitian mengenai “ Efisiensi Unit-unit Kegiatan Ekonomi Industri Logam Dasar Non Besi dan Baja (ISIC 372) Indonesia Tahun 1996 dan 1998”. Pengukuran efisiensi industri logam dasar pada penelitian ini menggunakan metode DEA (*Data Envelopment Analysis*). Dengan metode ini

maka pengukuran efisiensi suatu organisasi atau unit kegiatan ekonomi (UKE) yang banyak melibatkan input ataupun output lebih mudah untuk dianalisis.

Tabel 3.1
Jenis input dan output yang digunakan dalam model penelitian

VARIABEL	KETERANGAN	Kode
A	UKE Industri pembuatan logam dan bukan besi (ISIC 37201)	
B	UKE Industri pengecoran logam bukan besi (ISIC 37202)	
C	UKE Industri penggilingan logam bukan besi (ISIC 37203)	
D	UKE Industri ekstrusi bukan besi (ISIC 37204)	
E	UKE Industri penempaan logam bukan besi (ISIC 37205)	
	INPUT	
X ₁	Bahan baku (Rp 000)	Bhn baku
X ₂	Bahan penolong (Rp 000)	Tinput
X ₃	Upah pekerja produksi (Rp 000)	WPKJPROD
X ₄	Upah pekerja nonproduksi (Rp 000)	WPKJNPROD
X ₅	Pekerja produksi (orang)	PKJPROD
X ₆	Pekerja non produksi (orang)	PKJPNPROD
X ₇	Bahan Bakar (Rp 000)	Bh bakar
X ₈	Modal (Rp 000)	Investasi
	OUTPUT	
Q ₁	Nilai produksi	NPROD
Q ₂	Total output	TOUTPUT
Q ₃	Nilai tambah	VALUEAD

Secara matematis formulasi DEA dapat ditunjukkan sebagai berikut :

$$\text{Maksimumkan } Z_k = \sum_{r=1}^s Ur_k.Yr_k$$

Dengan batasan/kendala :

$$(Pk) \sum_{r=1}^s Ur_k.Yr_j - \sum_{i=1}^m Vik.Xij : j = 1, \dots, n$$

$$(Qk) Vik.Xik = 1$$

$$Ur_k \geq 0 ; r = 1, \dots, s$$

$$Vik \geq 0 ; i = 1, \dots, m$$

Vik = bobot yang diberikan pada input i oleh UKE k

Ur_k = bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program DEA terhadap tingkat efisiensi pada lima unit kegiatan ekonomi pada industri logam dasar non besi dan baja (ISIC 372) pada tahun 1996 dan 1998 adalah sebagai berikut :

- ISIC 37201 yakni industri pembuatan logam dan bukan besi (UKE A) telah efisien .
- ISIC 37202 yakni industri pengecoran logam bukan besi (UKE B) telah efisien.
- ISIC 37203 yakni industri penggilingan logam bukan besi (UKE C) belum efisien. Pada tahun 1996 efisiensinya mencapai 90,17 %, dan pada tahun 1998 mengalami peningkatan menjadi 92,84 %. Inefisien industri ini terjadi karena pemborosan penggunaan bahan baku, bahan penolong, upah non produksi, biaya bahan bakar dan investasi.
- ISIC 37204 yakni industri bukan besi (UKE D) telah efisien.
- ISIC 37205 yakni industri penempaan logam bukan besi (UKE E) telah efisien.

3. Penelitian Rinaldi Rustam

Rinaldi Rustam mengadakan penelitian mengenai “ Analisis Efisiensi Teknis Bank Devisa Nasional Dengan Menggunakan Metode Non Parametrik : *Data Envelopment Analysis (DEA)*”. Menurutnya dalam beberapa dekade terakhir, peranan pemerintah dalam membiayai pembangunan semakin terbatas, sejalan dengan semakin terbatasnya penerimaan pemerintah. Keadaan ini memaksa

pemerintah berusaha meningkatkan peran perhimpunan dana masyarakat di sektor keuangan, termasuk sektor perbankan. Pemerintah mengeluarkan berbagai paket kebijakan deregulasi di sektor perbankan, diantaranya Paket 1 Juni 1983 (Pakjun 83) dan Paket 27 Oktober 1988 (Pakto 88); Pakjun 83 memberikan kebebasan dalam penetapan tingkat bunga oleh masing-masing bank, yang sebelumnya dipagu oleh pemerintah. Melalui Pakto 88 diberikan kemudahan pendirian Bank, dengan modal hanya Rp 10 Milyar dapat didirikan Bank Umum dan dengan modal Rp 50 Juta dapat didirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Kedua paket kebijakan deregulasi telah dapat meningkatkan kinerja perbankan nasional, dan mendorong perkembangan perbankan secara cepat. Berbagai penelitian yang kemudian dilakukan juga mendukungnya. Berbagai paket kebijakan deregulasi ini telah dapat meningkatkan Jumlah Bank, dari 70 Bank (tahun 1988) menjadi 240 Bank pada tahun 1996, dengan kantor cabang 5.919, belum termasuk BPR dan Lumbung Desa. Begitu juga dengan jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan perbankan meningkat sepuluh kali lipat pada periode yang sama.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat efisiensi teknis perbankan nasional dari segi biaya secara individu sebelum dan sesudah krisis dengan menggunakan metode DEA dan mengetahui apakah ada perbedaan tingkat efisiensi teknis masing-masing bank dibandingkan sebelum krisis dengan setelah krisis. Disamping itu penelitian ini juga secara khusus bertujuan membandingkan hasil penelitian ini/metode non Parametrik dengan penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode parametrik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan deskriptif analisis, guna menganalisis tingkat efisiensi teknis masing-masing individu perbankan devisa nasional dengan menggunakan pendekatan non parametric *data envelopment analysis* (DEA). Dalam hal ini menggunakan data 27 perbankan devisa nasional.

Adapun penggunaan data Bank devisa nasional karena bank tersebut relatif mempunyai input dan output yang lebih variatif dibanding bank non devisa, disamping struktur permodalannya relatif kuat. Faktor lain yang penulis pertimbangkan dalam penggunaan data bank nasional karena bank ini relatif lengkap data yang mereka laporkan ke bank Indonesia sebagai lembaga yang ditugasi mengawasi bank di Indonesia.

Pengukuran efisiensi teknis Bank devisa Nasional ini merupakan Metode Non Parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA). Dengan metode DEA ini maka pengukuran tingkat efisiensi teknis suatu organisasi atau suatu unit kegiatan ekonomi (UKE), banyak melibatkan berbagai input maupun juga output, sehingga hasil skor efisiensi teknis perbankan yang didapat diharapkan lebih akurat dibanding metode lainnya. Karena data input dan output yang digunakan lebih variatif. Disamping itu penggunaan metode non parametrik DEA dan juga diharapkan dapat lebih mudah dianalisis dalam menentukan tingkat efisiensi teknis dari perbankan nasional.

Dari hasil empiris *Data Envelopment Analysis* (DEA) dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Penelitian dengan metode non parametrik DEA ini menggunakan data 27 bank devisa nasional, karena bank mempunyai struktur input maupun output yang lebih variatif dibanding bank non devisa. Disamping itu bank devisa relatif lengkap melaporkan datanya ke Bank Indonesia.
- 2) Dari hasil empiris, sebelum krisis/ tahun 1993 terdapat 62,5 % bank devisa nasional (45 bank) yang mencapai tingkat efisiensi relatifnya tinggi/dengan skor efisiensi 100% (sempurna). Sedangkan 27 bank devisa nasional mempunyai skor efisiensi dibawah 100% (kurang efisien).
- 3) Setelah terjadinya krisis perbankan/tahun 1997 terjadi penurunan tingkat efisiensi perbankan devisa nasional secara rata-rata, hanya 37,5% Bank yang mencapai skor efisiensi 100 %. Secara rinci; terdapat 42 bank yang skor efisiensinya menurun (sebagian besar mengalami penurunan kurang dari 30 %), 22 bank skor efisiensinya tetap. Dan yang menarik terdapat 8 Bank yang skor efisiensinya malah meningkat pada saat krisis (Bank BTN, Panin, Bira, Sahid Gajah Perkasa, Namura, Hastin).
- 4) Namun secara rata-rata skor efisiensi teknis perbankan devisa nasional masih relatif tinggi pada kedua periode, dengan skor efisiensi masih diatas 70 %. Tahun 1993/sebelum krisis 98,61 % dan pada tahun 1997 (setelah krisis perbankan) sebesar 83,33 %.
- 5) Dengan membandingkan hasil empiris pengukuran efisiensi teknis perbankan menggunakan DEA ini (non parametrik), dengan penelitian

sebelumnya (parametrik) dengan data yang relatif yang sama, secara umum dapat disimpulkan bahwa kedua pendekatan memberikan hasil yang relatif sama.

- 6) Dari hasil empiris terlihat juga beberapa bank yang kemudian hari dibangkrutkan pemerintah ternyata mempunyai tingkat efisiensi tinggi dari segi biaya baik sebelum maupun sesudah krisis, seperti halnya Bank Alfa, Bali, Bank Yama, Bank Parahiyangan, BDN. Menarik dari hasil penelitian ini juga, bahkan beberapa Bank tingkat efisiensinya malah meningkat pada saat krisis seperti Hasta, Namura, Panin, Bira, namun bank tersebut juga dibangkrutkan pemerintah. Keadaan ini terjadi karena ketidak konsistenan kriteria suatu bank dilikuidasi pemerintah pada saat ini.

4. Penelitian Asnita Frida Sebayang

Asnita Frida Sebayang melakukan penelitian mengenai “Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah Di Indonesia Pasca Krisis”. Penelitian ini menggunakan alat analisis *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Adapun Variabelnya terdiri atas variabel input dan Output. Variabel yang dikategorikan sebagai variabel input adalah :

- Dana Alokasi Umum (DAU) yang sering disebut dengan *General Purpose Grant*. Variabel ini digunakan sebagai indikator penerimaan di daerah yang mempunyai kontribusi penting dalam pembangunan.

- Belanja Rutin: sebagai alokasi anggaran terbesar di daerah yang juga digunakan sebagai proksi terhadap penggunaan sumber daya manusia di daerah.
- Pengeluaran Transportasi : sebagai proksi terhadap perhatian pemerintah terhadap keberadaan infrastruktur. Pengeluaran untuk sektor ini dapat dikategorikan sebagai belanja pembangunan terbesar di daerah.

Selanjutnya, disusul pula dua variabel output yakni pajak dan retribusi daerah. Variabel ini dijadikan variabel output mengingat pentingnya penerimaan kedua penerimaan ini pada perekonomian dan kapasitas fiskal daerah.

Pengukuran efisiensi di dasarkan pada pengembangan programasi linear pada empat titik pengamatan (1999-2002). Pemilihan periode ini didasarkan pada pengamatan perilaku efisiensi kebijakan fiskal periode krisis. Banyaknya propinsi yang diteliti adalah 26 propinsi di Indonesia.

Pengukuran biasa terhadap efisiensi relatif dapat dinyatakan sebagai berikut :

Efisiensi Kebijakan Fiskal	=	$\frac{\text{Jumlah Output yang Dibobot}}{\text{Jumlah Input yang Dibobot}}$
----------------------------------	---	--

Yang dapat dinotasikan berikut :

<i>Efisiensi Kebijakan</i> <i>Fiskal</i> <i>di Daerah j</i>	=	$\frac{u_1 y_{1j} + u_2 y_{2j} + \dots + u_n y_{nj}}{v_1 x_{1j} + v_2 y_{2j} + \dots + v_n y_{nj}}$
---	---	---

Dimana : u_l = bobot untuk output 1
 y_{lj} = jumlah output 1 dari unit j
 V_l = bobot untuk input 1
 X_{lj} = jumlah input 1 untuk unit j

Bobot unit kegiatan ekonomi (UKE) yang didefinisikan mencapai efisiensi teknis adalah 1 (satu), sementara UKE yang tidak terletak pada frontier efisiensi ditandai dengan pencapaian bobot kurang dari 1 (satu) namun lebih besar dari 0 (nol). Semakin rendah angka yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat inefisiensi. Solusi optimal untuk memperoleh efisiensi relatif ditunjukkan oleh model aljabar sebagai berikut :

Maksimasi efisiensi Daerah h_0 , dengan kendala seluruh unit adalah ≤ 1

$$\text{Maksimumkan } = h_0 = \frac{\sum_r u_r Y_{rj_0}}{\sum_i v_i X_{ij_0}}$$

$$\text{Kendala : } \frac{\sum_r u_r Y_{rj}}{\sum_i v_i X_{ij}} \leq 0 \text{ untuk unit } j$$

$$\sum_i v_i X_{ij} = 1$$

$$u_r, v_i \leq 1$$

Model DEA diatas harus diubah dalam bentuk linear sehingga metode *linear programming* dapat diterapkan. Bentuk programasinya adalah berikut :

$$\text{Maksimumkan } h_0 = \sum_r u_r Y_{rj_0}$$

$$\text{Kendala : } \sum_r u_r Y_{rj} - \sum_i v_i X_{ij} \leq 0 \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$\sum_i v_i X_{ij} = 1$$

Y_r ($r=1,2,\dots$) adalah berbagai output yang dihasilkan, X ($i=1,2,\dots$) adalah berbagai input yang digunakan u_r dan v_i adalah bobot yang diperoleh dari proses maksimasi.

Berdasarkan pengolahan data dengan menggunakan program *Data Envelopment Analysis* (DEA) pada 26 propinsi di Indonesia kinerja kebijakan fiskal daerah di Indonesia tahun 1999-2002 adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas Fiskal daerah di Indonesia sangat bervariasi bahkan cenderung menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah. Pada periode 1999-2002, wilayah yang mampu membiayai belanja rutin bersumber dari PAD hanya Jawa Timur dan Bali. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar daerah mampu “membiayai” pengeluarannya.
2. Dari perhitungan kinerja kebijakan fiskal menunjukkan adanya variasi bobot kinerja yang tinggi. Terdapat dua wilayah yang konsisten mencapai efisiensi tertinggi pada pungutan yakni DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kedua daerah ini kemudian bisa menjadi referensi bagi daerah lain untuk peningkatan kinerja kebijakan fiskalnya. Kedua wilayah ini mampu mencapai efisiensi 100 persen selama empat periode.
3. Pada wilayah yang belum efisien memiliki sumber inefisiensi yang relatif beragam. Konsekuensinya, kebijakan untuk masing-masing daerah harus spesifik dengan tetap membandingkan terhadap perkembangan wilayah lain.
4. Dengan mengaitkan kapasitas fiskal dan kinerja kebijakan terdapat kategori daerah. *Pertama*, memiliki kapasitas fiskal dan kinerja kebijakan yang tinggi.

Kedua, kinerja yang baik namun kapasitas fiskal rendah. *Ketiga*, kinerja dan kapasitas fiskal sedang. *Keempat*, kinerja dan kapasitas fiskal sama-sama rendah.



BAB IV

LANDASAN TEORI

4.1. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan nasional dengan pendekatan pengeluaran pemerintah menyatakan bahwa $Y = C + I + G + X - M$. Formulasi ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional (dalam artian luas), sekalipun mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (*Government expenditures*). Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional (Dumairy, 1996 :157).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 1993 : 169).

4.1.1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran

Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta menengah sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit (*complicated*). Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka (Mangkoesoebroto, 1993 : 170).

Dalam suatu proses pembangunan, menurut Musgrave, rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan mengecil. Sementara itu Rostow berpendapat bahwa pada tahap lanjut pembangunan terjadi peralihan aktivitas pemerintah, dari penyediaan prasarana ekonomi ke pengeluaran-pengeluaran untuk layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan (Dumairy, 1996 : 163).

Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas, apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi dalam tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

4.1.2. Hukum Wagner

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP yang juga didasarkan pula pengamatan di negara-negara Eropa, U.S. dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud oleh Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum wagner adalah sebagai berikut : Dalam suatu

perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat (Mangkoesoebroto, 1993: 171).

Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (USA, German, Jepang), tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintahan harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Pengamatan empiris oleh Adolph Wagner terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19 menunjukkan bahwa aktivitas pemerintah dalam perekonomian cenderung semakin meningkat. Ekonom Jerman ini mengukurnya dari perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional. Temuannya kemudian oleh Richard A. Musgrave dinamakan “hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat” (*law of growing public expenditures*). Wagner sendiri menamakannya “hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat” (*law of ever increasing state activity*). Hukum tersebut dapat dirumuskan dengan notasi :

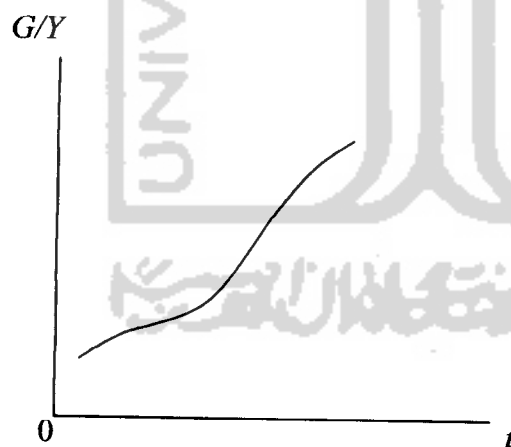
$$\frac{GpC_t}{YpC_t} > \frac{GpC_{t-1}}{YpC_{t-1}} > \frac{GpC_{t-2}}{YpC_{t-2}} > \dots > \frac{GpC_{t-n}}{YpC_{t-n}}$$

GpC : pengeluaran pemerintah per kapita

YpC : produk atau pendapatan nasional per kapita

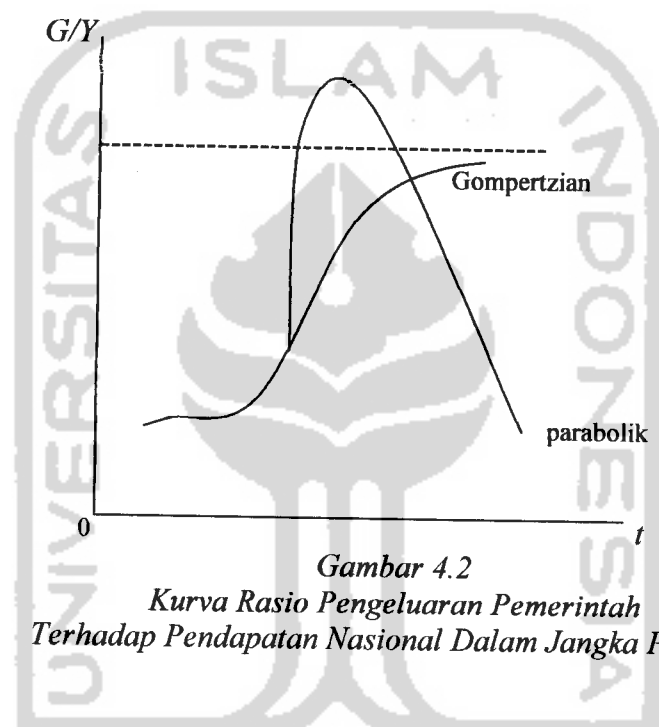
t : indeks waktu

Menurut Wagner ada lima hal yang menyebabkan pengeluaran pemerintah selalu meningkat. Kelima penyebab dimaksud adalah tuntutan peningkatan perlindungan keamanan dan pertahanan; kenaikan tingkat pendapatan masyarakat; urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi; perkembangan birokrasi; dan ketidakefisienan birokrasi yang mengiringi perkembangan pemerintahan. Secara Grafik, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (GpC/YpC atau G/Y) ditunjukkan oleh sebuah kurva yang eksponensial, sebagaimana terlihat pada gambar 4.1.



Gambar 4.1
*Kurva Rasio Pengeluaran Pemerintah
Terhadap Pendapatan Nasional*

Persoalan yang belum terpecahkan ialah apakah dalam jangka panjang kurva tersebut akan berpola *Gompertziana* (berarti akan terdapat suatu “batasan maksimum” tertentu rasio G/Y), ataukah akan berpola parabolik (berarti sampai dengan satu titik waktu tertentu rasio G/Y akan kembali menurun), sebagaimana diisyaratkan oleh Gambar 4.2.



Gambar 4.2
Kurva Rasio Pengeluaran Pemerintah
Terhadap Pendapatan Nasional Dalam Jangka Panjang

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Mangkoesoebroto, 1993 :172).

4.1.3. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi pajak ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

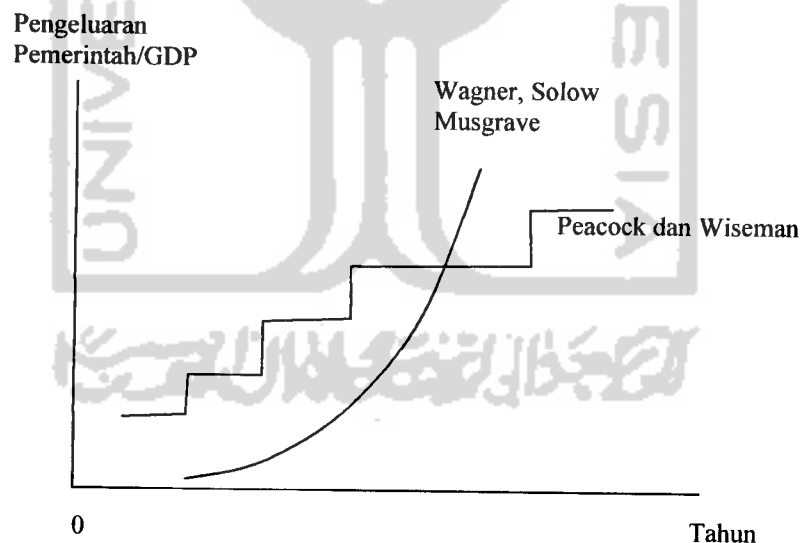
Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut :

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah ; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Perang tidak bisa dibiayai hanya dengan pajak, sehingga pemerintah juga harus meminjam dari negara lain untuk membiayai perang. Setelah perang selesai, sebetulnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pajak pada tingkat sebelum adanya gangguan. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlaksanakan oleh karena pemerintah harus mengembalikan bunga pinjaman dan angsuran utang yang digunakan untuk membiayai perang, sehingga pengeluaran pemerintah setelah perang selesai meningkat tidak hanya karena GNP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya. Selain itu, banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang, dan ini disebut dengan efek inspeksi (*inspection effect*). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah sebagian kegiatan ekonomi yang tadinya dilaksanakan oleh swasta. Ini adalah apa yang dinamakan efek konsentrasi atau *concentration effect*. Adanya ketiga efek diatas menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai, tingkat pajak tidak turun kembali pada tingkat sebelum terjadinya perang.

Efek atau akibat lain dari adanya suatu gangguan sosial adalah apa yang disebut dengan efek inspeksi (*inspection effect*) yang timbul karena masyarakat sadar akan adanya hal-hal yang perlu ditangani oleh pemerintah setelah selesainya gangguan sosial tersebut. Misalnya dalam hal perang, setelah perang timbul masalah banyak yatim piatu, cacat veteran, dan sebagainya yang terjadi atau timbul sebelum adanya perang. Setelah perang selesai, pemerintah harus bertindak untuk menangani masalah tersebut dan masyarakat pun dapat memaklumi tindakan pemerintah tersebut sehingga toleransi pajakpun meningkat.

Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman mendapat kritikan dari Bird. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke

aktivitas yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah dalam persentasenya terhadap GNP. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, persentase pengeluaran pemerintah terhadap GNP perlahan-lahan akan menurun kembali kepada tingkat sebelum terjadinya gangguan. Jadi menurut Bird, efek pengalihan hanya merupakan gejala dalam jangka pendek, tetapi tidak terjadi dalam jangka panjang.

Suatu hal yang perlu dicatat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapakah toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan sebesar 25 persen dari pendapatan nasional. Apabila limit tersebut dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan sosial lainnya.

4.1.4. Keynesian

Identitas keseimbangan pendapatan nasional $Y = C + I + G + X - M$ merupakan “sumber legitimasi” pendapatan kaum *Keynesian* akan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Dari notasi yang sangat sederhana tersebut dengan gamblang dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional.

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan

sasaran antara yang akan menikmati atau terkena kebijakan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus pula diperhitungkan siapa (masyarakat lapisan mana) yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan peranannya dalam perekonomian tidak justru melemahkan kegiatan pihak swasta.

4.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan daerah merupakan tatanan keseluruhan atas perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan pembelanjaan daerah (APBD). Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan (atau pendapatan) di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang (Suparmoko, 2002 : 26).

Sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, berbagai kebijaksanaan keuangan daerah yang diambil, diarahkan agar pemerintah daerah dapat semakin meningkatkan kemampuannya dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, keuangan daerah terdiri dari :

a. Penerimaan Daerah

Daerah sebagai badan hukum mempunyai otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunan daerah. Dalam usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah tersebut, diupayakan dengan berbagai cara, yaitu dengan berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun penerimaan daerah dapat dilihat pada pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Penerimaan daerah dapat diperoleh dari; pertama dari sumber-sumber yang dapat dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, memperoleh pendapatan dari pemberian pemerintah atau instansi yang lebih tinggi yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, subsidi daerah otonom, bantuan pembangunan, dan penerimaan lainnya. Ketiga adalah berasal dari pinjaman yang diperoleh dari pemerintah daerah, baik dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah propinsi maupun berasal dari instansi pusat. Adapun penerimaan daerah tersebut terdiri dari :

1. Bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Dana Perimbangan
4. Penerimaan Lainnya, dan
5. Pinjaman Pemerintah Daerah.

b. Pengeluaran Daerah

Daerah yang telah memiliki wewenang penuh dan sebagai badan hukum mempunyai otonomi dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dimana daerah membutuhkan sumber-sumber pendapatan sebagai kekayaan untuk membiayai pembangunan daerahnya. Dalam hal ini pengeluaran daerah terdiri dari :

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin tidak hanya digunakan untuk pembiayaan aparatur pemerintah, tetapi juga untuk mendanai pengeluaran bantuan keuangan kepada daerah bawahan, membantu pemerintah daerah, membiayai kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan program-program pemerintah yang dilakukan di daerah.

Pengeluaran rutin dapat dirinci menurut sembilan jenis belanja rutin yaitu :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang
- Biaya Pemeliharaan
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja lain-lain
- Angsuran Pinjaman/ Hutang dan Bunga
- Bantuan Keuangan
- Pengeluaran Yang tidak Termasuk Bagian Lain
- Pengeluaran Tidak Tersangka

2. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai proses perubahan. Yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang diinginkan. Pengeluaran pembangunan yang meliputi pembiayaan rupiah dan proyek, dialokasikan ke berbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijaksanaan pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam GBHN.

Secara sektoral pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai berbagai proyek di setiap sektor yang terdiri dari sektor Industri; Pertanian dan Kehutanan; Sumber Daya Air dan Irigasi; Tenaga Kerja, Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi; Transportasi, Meteorologi dan Geofisika; Pertambangan dan Energi; Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi; Pembangunan Daerah dan Pemukiman; Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; Pendidikan, Kebudayaan, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Pemuda dan Olahraga; Kependudukan dan Keluarga Sejahtera; Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peran Wanita, Anak dan Remaja; Agama; Hukum; dan sektor lainnya.

4.3. Efisiensi

4.3.1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan output terhadap input, atau jumlah output per unit input (jumlah output/unit input). Dalam banyak pusat pertanggungjawaban, efisiensi diukur dengan cara membandingkan biaya-biaya aktual dengan standar dimana biaya-biaya tersebut harus diukur dengan output yang terukur.

Efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Suatu aktivitas dapat dikatakan efisien apabila dapat memperoleh hasil yang sama dengan aktivitas lain tetapi sumber daya yang digunakan lebih sedikit.

Tingkat efisiensi diukur dengan indikator yang dihitung dari rasio antara nilai tambah (*value added*) dengan nilai output. Ini berarti semakin tinggi nilai rasio tersebut semakin tinggi tingkat efisiensinya, karena semakin rendah biaya input yang diperlukan untuk menghasilkan suatu unit output. Dalam istilah umum, efisiensi sering diartikan sebagai : dengan biaya sekecil-kecilnya diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang sebesar-besarnya.

Menurut Pareto dan Koopmans (1950) sebuah organisasi atau perusahaan dikatakan efisiensi bila dapat hasilkan lebih banyak output dengan sejumlah input yang sama atau dengan menurunkan penggunaan input dapat dihasilkan output yang sama. Konsep dan pengertian efisiensi diatas kemudian diperluas oleh Farel (1957), Kopp(1981), Koop&Diewart (1982) yang mencoba menganalisis bagaimana respon antara perencanaan produksi dengan nilai input serta nilai output itu sendiri dipasar. Bisa jadi kita dapat hasilkan output yang sama dengan menggunakan input yang sedikit, akan tetapi output yang kita hasilkan ternyata

lebih mahal harganya dipasar dibanding output yang sama dihasilkan pesaing. Permasalahan mahalnya harga jual produk padahal dengan komposisi input yang semakin berkurang dapat disebabkan diantaranya; penurunan penggunaan input karena keterpaksaan, disebabkan harga input yang semakin mahal (Rustam, 2005 : 175).

Secara umum ada dua komponen pengukuran efisiensi :

1. *Technical Efficiency* atau efisiensi teknis

Efisiensi ini mencoba mengukur tingkat penggunaan dari sarana Ekonomi/sejumlah input untuk menghasilkan sejumlah output tertentu.

2. *Allocative Efficiency* atau efisiensi alokatif

Mengukur sampai sejauh mana kombinasi optimal dari ragam input yang digunakan dalam proses produksi pada tingkat harga relatif.

4.3.2. Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah

Efisiensi dalam pengeluaran belanja pemerintah daerah didefinisikan sebagai suatu kondisi ketika tidak mungkin lagi realokasi sumber daya yang dilakukan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi pengeluaran belanja pemerintah daerah diartikan ketika setiap rupiah yang dibelanjakan oleh pemerintah daerah menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang paling optimal. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka dikatakan pengeluaran pemerintah telah mencapai tingkat yang efisien (Kurnia, 2005 : 4).

Dalam kaitannya dengan pengeluaran belanja pemerintah daerah, ada tiga jenis efisiensi yang penting untuk dilihat yaitu (Kurnia, 2005 : 5) :

a. Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi adalah efisiensi menyangkut biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan output tertentu. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal. Efisiensi produksi bisa dicapai karena sumber daya yang ada dialokasikan diantara berbagai pengeluaran yang dihasilkan output yang paling maksimal. Pengukuran dan perbandingan relatif efisiensi produksi ini bisa dilakukan secara langsung dengan kategori-kategori tertentu yang akan dilihat misalnya, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan lain-lain.

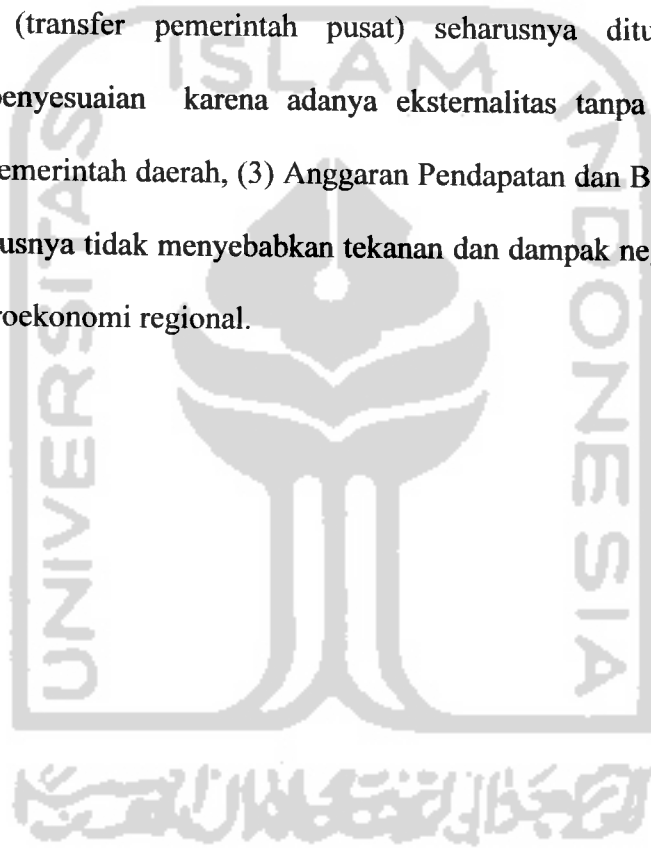
b. Efisiensi Alokasi.

Efisiensi alokasi adalah efisiensi yang menyangkut kesesuaian pengeluaran belanja dengan preferensi masyarakat. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, efisiensi alokasi bisa karena sumber daya yang ada dialokasikan diantara berbagai jenis pengeluaran belanja yang sesuai dengan preferensi masyarakat daerah. Pengukuran efisiensi alokasi ini tidak bisa dilakukan secara langsung karena ukuran preferensi marginal masyarakat sulit untuk diketahui.

c. Efisiensi Fiskal

Efisiensi Fiskal adalah efisiensi yang menyangkut sumber penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran belanja pemerintah daerah. Secara umum sumber penerimaan pemerintah daerah berasal dari dua komponen utama, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana

perimbangan (transfer dari pemerintah pusat). Efisiensi fiskal dalam kaitannya dengan sumber penerimaan ini menyangkut tiga hal : (1) apakah pajak dan retribusi daerah yang dipungut merupakan pajak yang tepat dalam artian bahwa pajak dan retribusi daerah yang dipungut dari objek pajak tertentu langsung terkait dengan target-target pengeluaran tertentu pula? (2) Dana perimbangan (transfer pemerintah pusat) seharusnya ditujukan untuk penyesuaian-penyesuaian karena adanya eksternalitas tanpa mengganggu kepentingan pemerintah daerah, (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya tidak menyebabkan tekanan dan dampak negatif terhadap stabilitas makroekonomi regional.



BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis data sekunder. Pendekatan kepustakaan dilakukan dengan cara mengambil teori-teori umum dari berbagai literatur maupun studi empiris untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan dan diterbitkan oleh lembaga atau organisasi tertentu untuk masyarakat pengguna data. Penelitian ini menggunakan data 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah pada tahun 1999 dan 2002. Data tersebut berupa laporan pengeluaran pembangunan daerah dalam APBD kabupaten/kota di Jawa Tengah, data dan Informasi kemiskinan menurut kabupaten/kota.

Data dan informasi tersebut diperoleh dari :

- Badan Pusat Statistik Jawa Tengah
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah
(www.Djpkpd.go.id)

5.2. Definisi Variabel

Variabel data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. *Data Input*

- Pengeluaran pembangunan sektor pendidikan adalah pengeluaran/belanja pembangunan pemerintah pada sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 1999/2000 dan 2002. Tahun anggaran 1999/2000 disamakan dengan tahun kalender melalui metode interpolasi sehingga menjadi tahun 1999.
- Pengeluaran/belanja pembangunan sektor kesehatan adalah besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah daerah pada sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja yang tercermin dalam realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 1999/2000 dan 2002. Tahun anggaran 1999/2000 disamakan dengan tahun kalender melalui metode interpolasi sehingga menjadi tahun 1999 .

2. *Data Output*

- Angka Harapan Hidup merupakan lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Angka Melek Huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih.

- Rata-rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani.

5.3. Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan non parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan menggunakan data 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 1999 dan 2002. Analisis ini dimaksudkan untuk pengukuran efisiensi suatu organisasi atau unit kegiatan ekonomi (UKE) yang melibatkan banyak input dan banyak output (*multi-input multi-output*).

5.3.1. Konsep Dasar DEA (*Data Envelopment Analysis*)

DEA merupakan prosedur yang dirancang secara khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan banyak input dan banyak output, dimana penggabungan input dan output tersebut tidak mungkin dilakukan. Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi suatu UKE dibanding dengan UKE lain dalam sampel (sekelompok UKE yang saling diperbandingkan) yang menggunakan jenis input dan output yang sama.

Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbang (*total weighted output/ total weighted input*). Inti dari DEA adalah menentukan bobot (*weights*) atau timbangan untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat; (1)

tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (*total weighted output/total weighted input*) dan rasio tersebut tidak boleh lebih dari 1 (*total weighted output/total weighted input* ≤ 1).

DEA berasumsi bahwa setiap UKE akan memilih bobot yang memaksimalkan rasio efisiensinya (*maximize total weighted output/total weighted input*). Karena setiap UKE menggunakan kombinasi input yang berbeda untuk menghasilkan kombinasi output yang berbeda pula, maka setiap UKE akan memilih seperangkat bobot yang mencerminkan keragaman tersebut. Secara umum UKE akan menetapkan bobot yang tinggi untuk input yang penggunaannya sedikit dan untuk output yang diproduksi dengan banyak. Bobot-bobot tersebut bukan merupakan nilai ekonomis dari input dan outputnya, melainkan sebagai penentu untuk memaksimalkan efisiensi dari suatu UKE.

5.3.2. Formulasi DEA

Dalam analisis DEA perlu menggunakan teknik linear programming. Misal kita akan membandingkan efisiensi dari sejumlah UKE, misalkan n . Setiap UKE menggunakan m jenis input untuk menghasilkan s jenis output. Misal, $X_{ij} > 0$ merupakan jumlah input i yang digunakan oleh UKE j ; dan $Y_{rj} > 0$ merupakan jumlah output r yang dihasilkan oleh UKE j . Variabel keputusan dari kasus tersebut adalah bobot yang harus diberikan pada setiap input dan output oleh UKE k .

Misal v_{ik} adalah bobot yang diberikan pada input i oleh UKE k , dan u_{rk} adalah bobot yang diberikan pada output r oleh UKE k . Sehingga v_{ik} dan u_{rk} merupakan variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya akan ditentukan melalui iterasi program linear. Diformulasikan sejumlah n program linear fraksional, satu formulasi program linear untuk setiap UKE di dalam sampel. Fungsi tujuan dari setiap program linear fraksional tersebut adalah rasio dari output tertimbang total dari UKE k dibagi dengan input tertimbang totalnya.

Formulasi fungsi tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{Maksimumkan } Z_k = \frac{\sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rk}}{\sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ik}}$$

Kriteria universalitas mensyaratkan DMU k untuk memilih bobot dengan batasan/kendala bahwa tidak ada UKE lain yang akan memiliki efisiensi lebih besar dari 1 atau 100% jika UKE lain tersebut menggunakan bobot yang dipilih oleh UKE k .

Sehingga formulasi selanjutnya adalah :

$$\frac{\sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rj}}{\sum_{i=1}^m v_{ik} \cdot X_{ij}} \leq 1; j = 1, \dots, n$$

Bobot yang dipilih tidak boleh bernilai negatif :

$$U_{rk} \geq 0; r = 1, \dots, s$$

$$V_{ik} \geq 0; i = 1, \dots, m$$

Transformasi program linear, yang kita sebut dengan DEA (*Data Envelopment Analysis*), sebagai berikut :

$$(DEA) \text{ Maksimumkan } Z_k = \sum_{r=1}^s u_{rk} \cdot Y_{rk}$$

Dengan batasan/kendala :

$$[p_{kj}] \quad \sum_{r=1}^s u_{rk} Y_{rj} - \sum_{i=1}^m v_{ik} X_{ij} \leq 0; j = 1, \dots, n$$

$$[q_k] \quad \sum_{i=1}^m v_{ik} X_{ik} = 1$$

$$u_{rk} \geq 0; r=1, \dots, s$$

$$v_{ik} \geq 0; i=1, \dots, m$$

5.3.3. Nilai Manajerial DEA

Data Envelopment Analysis (DEA) memiliki beberapa nilai manajerial :

1. DEA menghasilkan efisiensi untuk setiap UKE, relatif terhadap UKE yang lain di dalam sampel. Angka efisiensi ini memungkinkan seorang analis untuk mengenali UKE yang paling membutuhkan perhatian dan merencanakan tindakan perbaikan bagi UKE yang tidak/ kurang efisien.
2. Jika suatu UKE kurang efisien (efisien < 100%), DEA menunjukkan sejumlah UKE yang memiliki efisiensi sempurna (*efficient reference set*, efisiensi = 100 %) dan seperangkat angka pengganda (*multipliers*) yang dapat digunakan oleh manajer untuk menyusun strategi perbaikan. Informasi tersebut memungkinkan seorang analis membuat UKE hipotesis yang menggunakan input yang lebih sedikit dan menghasilkan output paling tidak sama atau lebih

banyak dibanding UKE yang tidak efisien, sehingga UKE hipotesis tersebut akan memiliki efisiensi yang sempurna jika menggunakan bobot input dan bobot output dari UKE yang tidak efisien. Pendekatan tersebut memberi arah strategis bagi manajer untuk meningkatkan efisiensi suatu UKE yang tidak efisien melalui pengenalan terhadap input yang terlalu banyak digunakan serta output produksinya terlalu rendah. Sehingga seorang manajer tidak hanya mengetahui UKE yang tidak efisien, tetapi ia juga mengetahui seberapa besar tingkat input dan output harus disesuaikan agar dapat memiliki efisiensi yang tinggi.

3. DEA menyediakan matriks efisiensi silang. Efisiensi silang UKE A terhadap UKE B merupakan rasio dari output tertimbang dibagi input tertimbang yang dihitung dengan menggunakan tingkat input dan output UKE A dan bobot input dan output UKE B. Analisis efisiensi silang dapat membantu seorang manajer untuk mengenali UKE yang efisien tetapi menggunakan kombinasi input dan menghasilkan kombinasi output yang sangat berbeda dengan UKE lain. UKE tersebut sering disebut sebagai *maverick* (menyimpang, unik).

5.3.4. Keterbatasan DEA (*Data Envelopment Analysis*)

Meskipun untuk menghitung efisiensi relatif memiliki banyak kelebihan dibanding analisis rasio parsial dan analisis regresi, DEA memiliki beberapa keterbatasan.

- 1) DEA mensyaratkan semua input dan output harus spesifik dan dapat diukur (demikian pula untuk analisis rasio dan regresi). Kesalahan dalam

memasukkan input dan output yang valid akan memberikan hasil yang bias. Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan UKE yang pada kenyataannya tidak efisien menjadi nampak efisien, ataupun sebaliknya. Seperti halnya pada metode pengukuran efisiensi lainnya, DEA harus disusun dengan benar.

- 2) DEA berasumsi bahwa setiap unit input atau output identik dengan unit lain dalam tipe yang sama.
- 3) Dalam bentuk dasarnya DEA berasumsi adanya *constant return to scale* (CRTS). CRTS menyatakan bahwa perubahan proposional pada semua tingkat input akan menghasilkan perubahan proposional yang sama pada tingkat output. Ini merupakan asumsi yang penting, sebab asumsi ini memungkinkan semua UKE diukur dan dibandingkan terhadap unit *isoquant*, walaupun pada kenyataannya hal tersebut tidak selalu (jarang) terjadi.
- 4) Bobot input dan bobot output yang dihasilkan oleh DEA tidak dapat ditafsirkan dalam nilai ekonomi, meskipun koefisien tersebut memiliki formulasi matematik yang sama. Tetapi hal ini bukan merupakan kendala yang serius, sebab DEA bertujuan mengukur efisiensi teknis relatif.

BAB VI

ANALISIS DATA

6.1. Diskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk pencatatan dari Biro Pusat Statistik yaitu Laporan Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Data dan Informasi Kemiskinan menurut kabupaten/kota tahun 1999 dan 2002.

Variabel data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Input

- Pengeluaran pembangunan sektor pendidikan adalah pengeluaran/belanja pembangunan pemerintah pada sektor pendidikan, kebudayaan nasional, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tercermin dalam realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 1999/2000 dan 2002. Tahun anggaran 1999/2000 disamakan dengan tahun kalender melalui metode interpolasi sehingga menjadi tahun 1999.
- Pengeluaran/belanja pembangunan sektor kesehatan adalah besarnya pengeluaran pembangunan pemerintah daerah pada sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja yang tercermin dalam realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 1999/2000 dan 2002. Tahun anggaran 1999/2000 disamakan dengan tahun kalender melalui metode interpolasi sehingga menjadi tahun 1999.

2. Data Output

- Angka Harapan Hidup merupakan lama hidup yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1999 dan 2002.
- Angka Melek Huruf merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis huruf Latin atau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih, data yang digunakan tahun 1999 dan 2002.
- Rata-rata Lama Sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani, data yang digunakan tahun 1999 dan 2002.

6.2. Analisa Data

Pengukuran efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dilakukan dengan metode non parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA). DEA WIN merupakan program yang digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tersebut.

6.2.1. Tingkat Efisiensi

6.2.1.1. Pengeluaran Pendidikan

Hasil empiris pengukuran tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 1999 dan 2002 menggunakan metode DEA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Tingkat Efisiensi Pengeluaran Pendidikan
Tahun 1999 dan 2002

Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)		Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)	
	1999	2002		1999	2002
Kab. Cilacap	3,04	28,36	Kab. Kudus	7,17	27,96
Kab. Banyumas	4,56	21,86	Kab. Jepara	6,06	4,41
Kab. Purbalingga	4,16	20,23	Kab. Demak	7,77	-
Kab. Banjarnegara	3,93	24,16	Kab. Semarang	7,48	25,92
Kab. Kebumen	3,75	25,05	Kab. Temanggung	13,45	28,80
Kab. Purworejo	6,41	46,13	Kab. Kendal	7,94	2,87
Kab. Wonosobo	8,26	33,28	Kab. Batang	6,65	18,61
Kab. Magelang	6,34	44,41	Kab. Pekalongan	8,04	14,72
Kab. Boyolali	7,71	100	Kab. Pemalang	4,39	17,04
Kab. Klaten	5,23	33,50	Kab. Tegal	2,37	12,99
Kab. Sukoharjo	9,04	38,51	Kab. Brebes	6,33	7,30
Kab. Wonogiri	3,58	28,53	Kota Magelang	13,35	88,82
Kab. Karanganyar	6,19	49,34	Kota Surakarta	8,96	54,33
Kab. Sragen	7,36	53,84	Kota Salatiga	100	99,93
Kab. Grobogan	4,90	11,93	Kota Semarang	4,94	38,06
Kab. Blora	4,78	7,43	Kota Pekalongan	19,65	22,18
Kab. Rembang	9,40	22,96	Kota Tegal	9,29	20,40
Kab. Pati	6,25	14,84			

Sumber: BPS, diolah

Hasil perhitungan dengan teknik *Data Envelopment Analysis* (DEA) dapat dilihat dari tabel 6.1. Tabel diatas menunjukkan kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mencapai efisiensi sempurna (100%) pada tahun 1999 adalah Kota Salatiga. Sedangkan pada tahun 2002, Kabupaten Boyolali telah mencapai efisiensi sempurna (100%). Ini berarti bahwa Kabupaten Boyolali dan Kota Salatiga mampu memanfaatkan pengeluarannya dengan optimal.

Perubahan yang sangat drastis pada Kabupaten Boyolali di tahun 2002, dimana pada tahun 1999 tingkat efisiensinya hanya sebesar 8,88% (tidak efisien). Perubahan ini dikarenakan terjadinya penurunan pada tingkat output yaitu rata-rata lama sekolah (6,2 tahun) dan angka melek huruf (81,4%). Penurunan tingkat output dikarenakan masih banyaknya anak putus sekolah. Banyak orangtua yang memandang pendidikan tidak penting, disamping itu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang amat memprihatinkan turut mendorong anak-anak putus sekolah. Sedangkan pada tahun 2002 Kota Salatiga mengalami sedikit penurunan menjadi 99,93%. Kabupaten/kota lainnya tingkat efisiensinya cenderung belum efisien. Ini berarti pemerintah daerah di masing-masing kabupaten/kota belum dapat mengoptimalkan pengeluaran pemerintah khususnya di sektor pendidikan dengan baik.

6.2.1.2 Pengeluaran Kesehatan

Hasil empiris pengukuran tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 1999 dan 2002 dengan menggunakan metode DEA dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2
Tingkat Efisiensi Pengeluaran Kesehatan
Tahun 1999 dan 2002

Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)		Kabupaten/Kota	Efisiensi (%)	
	1999	2002		1999	2002
Kab. Cilacap	1,60	10,22	Kab. Kudus	11,82	20,22
Kab. Banyumas	4,39	42,03	Kab. Jepara	5,61	3,07
Kab. Purbalingga	7,12	7,39	Kab. Demak	6,38	-
Kab. Banjarnegara	13,04	21,12	Kab. Semarang	6,07	8,16
Kab. Kebumen	12,62	23,47	Kab. Temanggung	23,87	10,56
Kab. Purworejo	10,23	40,82	Kab. Kendal	5,47	18,68
Kab. Wonosobo	17,41	7,45	Kab. Batang	12,48	19,51
Kab. Magelang	9,27	36,67	Kab. Pekalongan	14,74	46,57
Kab. Boyolali	11,25	28,82	Kab. Pemasang	3,17	24,60
Kab. Klaten	10,07	24,12	Kab. Tegal	1,23	5,41
Kab. Sukoharjo	25,89	20,24	Kab. Brebes	4,16	16,54
Kab. Wonogiri	4,70	28,88	Kota Magelang	32,81	24,83
Kab. Karanganyar	9,61	68,84	Kota Surakarta	12,24	100
Kab. Sragen	31,92	35,97	Kota Salatiga	100	7,22
Kab. Grobogan	5,66	8,95	Kota Semarang	2,98	9,69
Kab. Blora	4,82	11,60	Kota Pekalongan	34,18	33,20
Kab. Rembang	8,83	9,79	Kota Tegal	14,25	5,44
Kab. Pati	8,06				

Sumber : BPS, diolah

Tabel 6.2 menunjukkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program DEA WIN. Kabupaten/kota yang mampu mencapai efisiensi terbaik pada tahun 1999 adalah Kota Salatiga. Sedangkan pada tahun 2002 kabupaten/kota yang telah mencapai efisiensi terbaik adalah Kota Surakarta. Ini berarti bahwa kedua Kota di Jawa Tengah ini yaitu Kota Salatiga dan Kota Surakarta telah mampu mengalokasikan pengeluaran kesehatannya dengan optimal. Besarnya efisiensi pada dua tahun ini (1999 dan 2002) berfluktuasi, hal ini terlihat di tahun 2002 Kota Salatiga tingkat efisiensinya hanya sebesar 7,22% (belum efisien), padahal pada tahun 1999 tingkat efisiensinya telah sempurna (100%). Perubahan ini dikarenakan inefisiensi atau kurang tepatnya prioritas program di dalam pembiayaan kesehatan. Meskipun di tahun 2002 pengeluaran untuk kesehatan meningkat dari tahun 1999 belum dapat menjamin kecukupan pembiayaan

kesehatan yang diperlukan. Peran masyarakat juga sangat penting dalam pembangunan kesehatan. Kesadaran akan pentingnya hidup sehat perlu juga di tanamkan dalam pemikiran masyarakat, agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal yang sama juga dialami Kota Surakarta namun kota ini mengalami peningkatan efisiensi. Pada tahun 1999 tingkat efisiensi Kota Surakarta hanya sebesar 10,39% (belum efisien) dan pada tahun 2002 meningkat drastis hingga 100 % (efisien). Peningkatan efisiensi di Kota Surakarta terjadi karena di keluarkannya UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sehingga pemerintah daerah khususnya di Kota Surakarta dapat mengelola anggaran kesehatannya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Tingkat efisiensi kabupaten/kota lainnya masih cenderung belum efisien. Bahkan di Tahun 1999, Kabupaten Tegal tingkat efisiensinya hanya sebesar 1,23% (efisiensi terendah) walaupun pada tahun 2002 terjadi peningkatan sebesar 5,41% namun masih belum dikategorikan efisien. Hal yang sama juga terjadi pada kabupaten/kota lainnya, ini berarti bahwa pemerintah di masing-masing daerah belum dapat mengalokasikan pengeluaran kesehatannya dengan optimal.

6.2.2. Penyebab Inefisiensi Dan Cara Mengatasinya

Dengan menggunakan program DEA, dapat ditunjukkan ketidakefisienan suatu unit kegiatan ekonomi, sekaligus dapat merekomendasikan bagaimana cara meningkatkan tingkat efisiensinya. Untuk meningkatkan tingkat efisiensi yang ditunjukkan dengan angka 100 %, maka dapat diketahui input mana saja yang

belum efisien penggunaannya dan output mana saja yang harus ditingkatkan. Yang dimaksud dengan efisien adalah menghasilkan suatu nilai output yang maksimum dengan sejumlah input tertentu, atau dengan input minimum dapat menghasilkan output tertentu.

6.2.2.1. Mengatasi Inefisiensi dengan Meminimumkan Input

A. Pengeluaran Pendidikan

Agar tingkat efisiensi pada kabupaten/kota di Jawa tengah (kecuali Kab. Boyolali dan Kota Salatiga) meningkat maka penggunaan input pada kab/kota tersebut harus mengacu pada kab/kota lain yang telah efisien. Tabel 6.3 menunjukkan bagaimana solusinya meningkatkan efisiensi pada kabupaten/kota yang belum efisien. Bila kab/kota itu efisien, pada kolom *achieved* menunjukkan angka 100%, dan pada kolom *to gain* (pengurangan) adalah sebanyak 0 %. Karena jumlah dari kolom *achieved* dan *to gain* adalah 100%. Demikian pula untuk kolom aktual dan target, nilainya harus sama.

Tabel 6.3
 Aktual, Target Dan Efisiensi Yang Dicapai
 Dengan Meminimumkan Input
 di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 1999

Kab/Kota	Input	Aktual	Target	To Gain	Achieved
Kab. Tegal	Pengeluaran Pendidikan	6658,8	157,7	97,6%	2,4%
Kab. Cilacap	Pengeluaran Pendidikan	5229,3	159,0	97,0%	3,0%
Kab. Wonogiri	Pengeluaran Pendidikan	4024,8	144,3	96,4%	3,6%
Kab. Kebumen	Pengeluaran Pendidikan	4390,1	164,7	96,2%	3,8%
Kab. Banjarnegara	Pengeluaran Pendidikan	4122,7	162,2	96,1%	3,9%
Kab. Purbalingga	Pengeluaran Pendidikan	3912,5	162,8	95,8%	4,2%
Kab. Pemalang	Pengeluaran Pendidikan	3536,7	155,4	95,6%	4,4%
Kab. Banyumas	Pengeluaran Pendidikan	3776,5	172,2	95,4%	4,6%
Kab. Blora	Pengeluaran Pendidikan	2928,8	139,9	95,2%	4,8%
Kab. Grobogan	Pengeluaran Pendidikan	3298,4	161,6	95,1%	4,9%
Kota Semarang	Pengeluaran Pendidikan	3575,9	176,7	95,1%	4,9%
Kab. Klaten	Pengeluaran Pendidikan	2929,1	153,1	94,8%	5,2%
Kab. Jepara	Pengeluaran Pendidikan	2597,6	156,9	94,0%	6,0%
Kab. Karanganyar	Pengeluaran Pendidikan	2387,5	147,9	93,8%	6,2%
Kab. Pati	Pengeluaran Pendidikan	2417,3	151,1	93,8%	6,2%
Kab. Brebes	Pengeluaran Pendidikan	2474,3	156,7	93,7%	6,3%
Kab. Magelang	Pengeluaran Pendidikan	2566,7	162,8	93,7%	6,3%
Kab. Purworejo	Pengeluaran Pendidikan	2541,2	163,0	93,6%	6,4%
Kab. Batang	Pengeluaran Pendidikan	2435,2	162,0	93,9%	6,7%
Kab. Kudus	Pengeluaran Pendidikan	2338,0	167,7	92,8%	7,2%
Kab. Sragen	Pengeluaran Pendidikan	1837,5	135,2	92,6%	7,4%
Kab. Semarang	Pengeluaran Pendidikan	2256,0	168,8	92,5%	7,5%
Kab. Boyolali	Pengeluaran Pendidikan	1992,5	153,7	92,3%	7,7%
Kab. Demak	Pengeluaran Pendidikan	2168,2	168,4	92,2%	7,8%
Kab. Kendal	Pengeluaran Pendidikan	2005,4	159,2	92,1%	7,9%
Kab. Pekalongan	Pengeluaran Pendidikan	1978,7	159,0	92,0%	8,0%
Kab. Wonosobo	Pengeluaran Pendidikan	1977,2	163,3	91,7%	8,3%
Kota Surakarta	Pengeluaran Pendidikan	1957,2	175,4	91,0%	9,0%
Kab. Sukoharjo	Pengeluaran Pendidikan	1753,9	158,6	91,0%	9,0%
Kota Tegal	Pengeluaran Pendidikan	1758,1	163,3	90,7%	9,3%
Kab. Rembang	Pengeluaran Pendidikan	1703,1	160,1	90,6%	9,4%
Kab. Temanggung	Pengeluaran Pendidikan	1277,1	171,8	86,5%	13,5%
Kota Magelang	Pengeluaran Pendidikan	1303,7	176,4	86,5%	13,5%
Kota Pekalongan	Pengeluaran Pendidikan	863,1	169,6	80,4%	19,6%
Kota Salatiga	Pengeluaran Pendidikan	180,7	180,7	0,0%	100,00%

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat besarnya efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 1999 rata-rata belum efisien, dominan tingkat efisiensinya di bawah 10%. Pada Kabupaten Tegal, tingkat efisiensi pengeluarannya sebesar 2,4%, artinya agar menjadi efisien maka pengeluaran pendidikannya harus dikurangi

sebanyak 97,6%. Tampak pada kolom aktual dan kolom target menunjukkan angka yang berbeda, dimana nilai pada kolom aktual secara nominal lebih besar daripada nilai target. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Kabupaten Tegal melakukan pemborosan dalam mengalokasikan pengeluaran pendidikannya.

Hal yang serupa juga harus dilakukan oleh setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan yang di capai 3,0% sehingga untuk menjadi efisien harus mengurangi pengeluaran pendidikannya sebesar 97,0%. Kabupaten Wonogiri tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan yang dicapai 3,6%, maka untuk menjadi efisien harus mengurangi pengeluaran pendidikannya sebanyak 96,4%.

Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, Kabupaten Brebes, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Batang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kota Pekalongan untuk mencapai tingkat efisiensi 100% harus melakukan pengurangan yang cukup besar pada pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan di masing-masing daerah.

Tabel 6.4
 Aktual, Target Dan Efisiensi Yang Dicapai
 Dengan Meminimumkan Input
 di Kab/Kota Jawa Tengah Tahun 2002

Kab/Kota	Input	Aktual	Target	To Gain	Achieved
Kab. Kendal	Pengeluaran Pendidikan	41067,6	1180,5	97,1%	2,9%
Kab. Jepara	Pengeluaran Pendidikan	26265,0	1159,2	95,6%	4,4%
Kab. Brebes	Pengeluaran Pendidikan	14800,0	1080,6	92,6%	7,3%
Kab. Blora	Pengeluaran Pendidikan	14450,0	1073,9	92,7%	7,4%
Kab. Grobogan	Pengeluaran Pendidikan	9661,7	1152,5	88,1%	11,9%
Kab. Tegal	Pengeluaran Pendidikan	8491,2	1103,2	87,0%	13,0%
Kab. Pekalongan	Pengeluaran Pendidikan	7658,8	1127,2	85,3%	14,7%
Kab. Pati	Pengeluaran Pendidikan	7849,6	1164,5	85,2%	14,8%
Kab. Pemasang	Pengeluaran Pendidikan	6426,0	1095,2	83,0%	17,0%
Kab. Batang	Pengeluaran Pendidikan	6078,5	1131,2	81,4%	18,6%
Kab. Purbalingga	Pengeluaran Pendidikan	5847,3	1183,2	79,8%	20,2%
Kota Tegal	Pengeluaran Pendidikan	6160,0	1256,6	79,6%	20,4%
Kab. Banyumas	Pengeluaran Pendidikan	5461,6	1193,8	78,1%	21,9%
Kota Pekalongan	Pengeluaran Pendidikan	5814,9	1289,7	77,8%	22,2%
Kab. Rembang	Pengeluaran Pendidikan	4973,7	1141,9	77,0%	23,0%
Kab. Banjarnegara	Pengeluaran Pendidikan	4538,0	1096,6	75,8%	24,2%
Kab. Kebumen	Pengeluaran Pendidikan	4552,5	1140,5	74,9%	25,1%
Kab. Semarang	Pengeluaran Pendidikan	4550,2	1179,2	74,1%	25,9%
Kab. Kudus	Pengeluaran Pendidikan	4227,1	1181,9	72,0%	28,0%
Kab. Cilacap	Pengeluaran Pendidikan	4088,0	1159,2	71,6%	28,4%
Kab. Wonogiri	Pengeluaran Pendidikan	3614,3	1031,3	71,5%	28,5%
Kab. Temanggung	Pengeluaran Pendidikan	4237,2	1220,5	71,2%	28,8%
Kab. Wonobo	Pengeluaran Pendidikan	3407,0	1133,9	66,7%	33,3%
Kab. Klaten	Pengeluaran Pendidikan	3602,9	1207,0	66,5%	33,5%
Kota Semarang	Pengeluaran Pendidikan	4343,9	1653,4	61,9%	38,1%
Kab. Sukoharjo	Pengeluaran Pendidikan	3392,1	1306,2	61,5%	38,5%
Kab. Magelang	Pengeluaran Pendidikan	2670,0	1185,9	55,6%	44,4%
Kab. Purworejo	Pengeluaran Pendidikan	2556,0	1179,2	53,9%	46,1%
Kab. Karanganyar	Pengeluaran Pendidikan	2345,7	1157,4	50,7%	49,3%
Kab. Sragen	Pengeluaran Pendidikan	1863,7	1003,3	46,2%	53,8%
Kota Surakarta	Pengeluaran Pendidikan	2982,4	1620,3	45,7%	54,3%
Kota Magelang	Pengeluaran Pendidikan	1824,2	1620,3	11,2%	88,8%
Kota Salatiga	Pengeluaran Pendidikan	1571,8	1570,7	0,1%	99,9%
Kab. Boyolali	Pengeluaran Pendidikan	1091,2	1091,2	0,0%	100%

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan tabel 6.4 tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan pada tahun 2002 meningkat dari tahun sebelumnya (1999). Pada Kabupaten Kendal tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan yang dicapai 2,87% agar menjadi efisien (100%) maka harus mengurangi pengalokasian pengeluaran pendidikannya sebesar 97,1%. Perbedaan nilai nominal antara aktual dan target begitu besar yang berarti

bahwa dalam pengalokasian pengeluaran pemerintah terjadi pemborosan sehingga menjadi tidak efisien. Kabupaten Jepara efisiensi pengeluaran pendidikan yang dicapai sebesar 4,4% agar efisien maka harus mengurangi penggunaan input sebesar 95,6%.

Hal yang serupa juga harus dilakukan oleh setiap daerah, Kabupaten Brebes, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Purbalingga, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta untuk mencapai tingkat efisiensi 100% harus melakukan pengurangan yang cukup besar pada pengalokasian pengeluaran pendidikannya. Sedangkan Kota Magelang dan Kota Salatiga relatif baik mencapai tingkat efisiensinya 88,8% dan 99,9% namun agar menjadi efisien (100%) harus tetap mengurangi pengalokasian pengeluaran pendidikannya.

B. Pengeluaran Kesehatan

Tabel 6.5
Aktual, Target Dan Efisiensi Yang Dicapai
Dengan Meminimumkan Input
di Kab/Kota Jateng Tahun 1999

Kab/Kota	Input	Aktual	Target	To Gain	Achieved
Kab. Tegal	Pengeluaran Kesehatan	4484,5	55,2	98,8%	1,2%
Kab. Cilacap	Pengeluaran Kesehatan	3552,8	56,9	98,4%	1,6%
Kota Semarang	Pengeluaran Kesehatan	1993,0	59,4	97,0%	3,0%
Kab. Pemasang	Pengeluaran Kesehatan	1723,9	54,6	96,8%	3,2%
Kab. Brebes	Pengeluaran Kesehatan	1286,5	53,6	95,8%	4,2%
Kab. Banyumas	Pengeluaran Kesehatan	1312,8	57,6	95,6%	4,4%
Kab. Wonogiri	Pengeluaran Kesehatan	1280,9	60,2	95,3%	4,7%
Kab. Blora	Pengeluaran Kesehatan	1228,0	59,1	95,2%	4,8%
Kab. Kendal	Pengeluaran Kesehatan	1000,0	54,7	94,5%	5,5%
Kab. Jepara	Pengeluaran Kesehatan	1050,3	58,9	94,4%	5,6%
Kab. Grobogan	Pengeluaran Kesehatan	1013,7	57,4	94,3%	5,7%
Kab. Semarang	Pengeluaran Kesehatan	984,2	59,7	93,9%	6,1%
Kab. Demak	Pengeluaran Kesehatan	911,4	58,1	93,6%	6,4%
Kab. Purbalingga	Pengeluaran Kesehatan	801,0	57,0	92,9%	7,1%
Kab. Pati	Pengeluaran Kesehatan	754,4	60,6	92,0%	8,0%
Kab. Rembang	Pengeluaran Kesehatan	651,4	57,5	91,2%	8,8%
Kab. Magelang	Pengeluaran Kesehatan	620,4	57,5	90,7%	9,3%
Kab. Karanganyar	Pengeluaran Kesehatan	617,2	59,3	90,4%	9,6%
Kab. Klaten	Pengeluaran Kesehatan	580,4	58,5	89,9%	10,1%
Kab. Purworejo	Pengeluaran Kesehatan	560,1	57,3	89,8%	10,2%
Kab. Boyolali	Pengeluaran Kesehatan	522,1	58,7	88,8%	11,2%
Kab. Kudus	Pengeluaran Kesehatan	485,4	57,4	88,2%	11,8%
Kota Surakarta	Pengeluaran Kesehatan	490,0	60,0	87,8%	12,2%
Kab. Batang	Pengeluaran Kesehatan	461,8	57,6	87,5%	12,5%
Kab. Kebumen	Pengeluaran Kesehatan	450,4	56,9	87,4%	12,6%
Kab. Banjarnegara	Pengeluaran Kesehatan	437,3	57,0	87,0%	13,0%
Kota Tegal	Pengeluaran Kesehatan	395,5	56,3	85,8%	14,2%
Kab. Pekalongan	Pengeluaran Kesehatan	381,6	56,3	85,3%	14,7%
Kab. Wonosobo	Pengeluaran Kesehatan	328,9	57,3	82,6%	17,4%
Kab. Temanggung	Pengeluaran Kesehatan	250,6	59,8	76,1%	23,9%
Kab. Sukoharjo	Pengeluaran Kesehatan	225,8	58,5	74,1%	25,9%
Kab. Sragen	Pengeluaran Kesehatan	187,7	59,9	68,1%	31,9%
Kota Magelang	Pengeluaran Kesehatan	178,2	58,5	67,2%	32,8%
Kota Pekalongan	Pengeluaran Kesehatan	168,5	57,6	65,8%	34,2%
Kota Salatiga	Pengeluaran Kesehatan	58,8	58,8	0,0%	100,00%

Sumber : BPS, diolah

Tabel 6.5 menunjukkan bagaimana solusinya meningkatkan efisiensi pada kabupaten/kota yang belum efisien. Bila kab/kota itu efisien, pada kolom *achieved* menunjukkan angka 100%, dan pada kolom *to gain* (pengurangan) adalah

sebanyak 0 %. Karena jumlah dari kolom *achieved* dan *to gain* adalah 100%. Demikian pula untuk kolom aktual dan target, nilainya harus sama.

Mengacu pada Tabel 6.5, tingkat efisiensi pengeluaran kesehatan pada tahun 1999 cenderung sangat tidak efisien. Hal ini terlihat dari tingkat efisiensi di masing-masing daerah mayoritas kurang dari 10%. Kabupaten Tegal tingkat efisiensi pengeluaran kesehatannya hanya mencapai 1,2%. Agar menjadi efisien (100%) harus pengurangi pengalokasian pengeluaran kesehatan sebesar 98,8%. Pengurangan yang sangat besar ini akan meningkatkan efisiensi hingga 100%. Ini berarti telah terjadi pemborosan dalam mengalokasikan pengeluaran kesehatan pada daerah ini. Kabupaten Cilacap efisiensi pengeluaran kesehatan yang dicapai hanya sebesar 1,6% maka agar tingkat efisiensinya sempurna harus melakukan pengurangan pada penggunaan inputnya yaitu sebesar 98,4%.

Sama juga halnya dengan kabupaten/kota lainnya, Kota Semarang, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Magelang dan Kota Pekalongan harus melakukan pengurangan yang besar

dalam mengalokasikan pengeluarannya di masing-masing daerah agar tingkat efisiensinya menjadi 100 % (sempurna).

Tabel 6.6
Aktual, Target Dan Efisiensi Yang Dicapai
Dengan Meminimumkan Input
di Kab/Kota Jateng Tahun 2002

Kab/Kota	Input	Aktual	Target	To Gain	Achieved
Kab. Jepara	Pengeluaran Kesehatan	18445,9	566,6	96,9%	3,1%
Kab. Pati	Pengeluaran Kesehatan	11354,4	586,8	94,8%	5,2%
Kab. Tegal	Pengeluaran Kesehatan	9913,5	535,8	94,6%	5,4%
Kota Tegal	Pengeluaran Kesehatan	9955,1	541,5	94,6%	5,4%
Kota Salatiga	Pengeluaran Kesehatan	7871,9	568,2	92,8%	7,2%
Kab. Purbalingga	Pengeluaran Kesehatan	7399,3	547,2	92,6%	7,4%
Kab. Wonosobo	Pengeluaran Kesehatan	7445,0	554,5	92,6%	7,4%
Kab. Semarang	Pengeluaran Kesehatan	7075,0	577,1	91,8%	8,2%
Kab. Grobogan	Pengeluaran Kesehatan	6157,5	551,2	91,0%	9,0%
Kota Semarang	Pengeluaran Kesehatan	5879,0	569,8	90,3%	9,7%
Kab. Rembang	Pengeluaran Kesehatan	5669,0	555,3	90,2%	9,8%
Kab. Cilacap	Pengeluaran Kesehatan	5369,6	548,8	89,8%	10,2%
Kab. Temanggung	Pengeluaran Kesehatan	5470,6	577,9	89,4%	10,6%
Kab. Blora	Pengeluaran Kesehatan	4905,5	569,0	88,4%	11,6%
Kab. Brebes	Pengeluaran Kesehatan	3146,5	520,5	83,5%	16,5%
Kab. Kendal	Pengeluaran Kesehatan	2816,3	526,1	81,3%	18,7%
Kab. Batang	Pengeluaran Kesehatan	2850,5	556,1	80,5%	19,5%
Kab. Kudus	Pengeluaran Kesehatan	2730,3	552,0	79,8%	20,2%
Kab. Sukoharjo	Pengeluaran Kesehatan	2771,3	560,9	79,8%	20,2%
Kab. Banjarnegara	Pengeluaran Kesehatan	2595,0	548,0	78,9%	21,1%
Kab. Kebumen	Pengeluaran Kesehatan	2331,1	547,2	76,5%	23,5%
Kab. Klaten	Pengeluaran Kesehatan	2342,7	565,0	75,9%	24,1%
Kab. Pemasang	Pengeluaran Kesehatan	2145,0	527,7	75,4%	24,6%
Kota Magelang	Pengeluaran Kesehatan	2258,6	560,9	75,2%	24,8%
Kab. Boyolali	Pengeluaran Kesehatan	1954,8	563,4	71,2%	28,8%
Kab. Wonogiri	Pengeluaran Kesehatan	2006,6	579,5	71,1%	28,9%
Kota Pekalongan	Pengeluaran Kesehatan	1672,5	555,3	66,8%	33,2%
Kab. Sragen	Pengeluaran Kesehatan	1609,0	578,7	64,0%	36,0%
Kab. Magelang	Pengeluaran Kesehatan	1518,8	556,9	63,3%	36,7%
Kab. Purworejo	Pengeluaran Kesehatan	1348,3	550,4	59,2%	40,8%
Kab. Banyumas	Pengeluaran Kesehatan	1321,2	555,3	58,0%	42,0%
Kab. Pekalongan	Pengeluaran Kesehatan	1157,5	539,1	53,4%	46,6%
Kab. Karanganyar	Pengeluaran Kesehatan	844,3	581,2	31,2%	68,8%
Kota Surakarta	Pengeluaran Kesehatan	575,5	575,5	0,0%	100,0%

Sumber : BPS, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat, tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan pada tahun 2002 meningkat dari tahun sebelumnya (1999). Kota Surakarta merupakan daerah yang mampu mengalokasikan pengeluaran

kesehatannya secara baik, ini terlihat dari efisiensi yang dicapai yaitu sebesar 100%. Sama halnya dengan tahun 1999 daerah yang tidak efisien pengeluaran kesehatannya untuk mencapai efisien yang sempurna harus mengurangi pengalokasian pengeluaran kesehatannya di masing-masing daerah. Seperti di Kabupaten Karanganyar tingkat efisiensinya mencapai 68,8% cukup efisien namun untuk menjadi efisien sebesar 100% tentunya harus melakukan pengurangan pada pengalokasian pengeluaran kesehatannya sebesar 31,2%.

6.2.2.2. Mengatasi Inefisiensi dengan Memaksimumkan Output

Untuk mengatasi inefisiensi tidak hanya dapat dilakukan dengan meminimumkan input tetapi dapat juga dilakukan dengan memaksimumkan outputnya. Dalam pembahasan ini, agar suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) menjadi efisien (100%) maka dapat diselesaikan dengan meningkatkan output dengan input tertentu.

A. Pengeluaran Pendidikan

Beda halnya dalam mengatasi inefisiensi suatu Unit Kegiatan Ekonomi (UKE) dengan memaksimumkan Output jika dibandingkan dengan meminimumkan input. Dalam memaksimumkan output, untuk kabupaten/kota yang belum efisien nilai pada kolom target lebih besar dari pada nilai pada kolom aktual. Ini menandakan bahwa berapa besar tingkat output yang harus dimaksimumkan agar suatu UKE tersebut menjadi efisien.

Tabel 6.7
Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai
Dengan Memaksimumkan Output
Pada Sektor Pendidikan Tahun 1999

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Tegal	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	342,7	1,6%
	2. Angka Melek Huruf	83,5	3526,4	2,4%
Kab. Cilacap	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,4	269,1	2,0%
	2. Angka Melek Huruf	84,2	2769,3	3,0%
Kab. Wonogiri	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	207,1	2,6%
	2. Angka Melek Huruf	87,2	2131,5	3,8%
Kab. Kebumen	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,9	225,9	2,6%
	2. Angka Melek Huruf	87,2	2324,9	3,8%
Kab. Banjarnegara	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	212,2	2,6%
	2. Angka Melek Huruf	85,9	2183,3	3,9%
Kab. Purbalingga	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,3	201,4	2,6%
	2. Angka Melek Huruf	86,2	2072,0	4,2%
Kab. Pemasang	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,2	182,0	2,9%
	2. Angka Melek Huruf	82,3	1872,9	4,4%
Kab. Banyumas	1. Rata-Rata Lama Sekolah	6,4	194,4	3,3%
	2. Angka Melek Huruf	91,2	1999,9	4,6%
Kab. Blora	1. Rata-Rata Lama Sekolah	4,8	150,7	3,2%
	2. Angka Melek Huruf	74,1	1551,0	4,8%
Kab. Grobogan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	169,7	3,3%
	2. Angka Melek Huruf	85,6	1746,8	4,9%
Kota Semarang	1. Rata-Rata Lama Sekolah	8,7	184,0	4,7%
	2. Angka Melek Huruf	93,6	1893,7	4,9%
Kab. Klaten	1. Rata-Rata Lama Sekolah	6,7	150,7	4,4%
	2. Angka Melek Huruf	81,1	1551,2	5,2%
Kab. Jepara	1. Rata-Rata Lama Sekolah	6,0	133,7	4,5%
	2. Angka Melek Huruf	83,1	1375,6	6,0%
Kab. Karanganyar	1. Rata-Rata Lama Sekolah	6,1	122,9	5,0%
	2. Angka Melek Huruf	78,3	1264,4	6,2%
Kab. Pati	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	124,4	4,5%
	2. Angka Melek Huruf	80,0	1280,2	6,2%
Kab. Brebes	1. Rata-Rata Lama Sekolah	4,8	127,3	3,8%
	2. Angka Melek Huruf	83,0	1310,4	6,3%
Kab. Magelang	1. Rata-Rata Lama Sekolah	6,3	132,1	4,8%
	2. Angka Melek Huruf	86,2	1359,3	6,3%
Kab. Purworejo	1. Rata-Rata Lama Sekolah	6,3	130,8	4,8%
	2. Angka Melek Huruf	86,3	1345,8	6,4%
Kab. Batang	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,1	125,3	4,1%
	2. Angka Melek Huruf	85,8	1289,6	6,7%
Kab. Kudus	1. Rata-Rata Lama Sekolah	6,9	120,3	5,7%
	2. Angka Melek Huruf	88,8	1238,1	7,2%
Kab. Sragen	1. Rata-Rata Lama Sekolah	5,3	94,6	5,6%
	2. Angka Melek Huruf	71,6	973,1	7,4%
Kab. Semarang	1. Rata-Rata Lama Sekolah	6,6	116,1	5,7%
	2. Angka Melek Huruf	89,4	1194,7	7,5%

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Boyolali	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,2	102,5	6,0%
	2.Angka Melek Huruf	81,4	1055,2	7,7%
Kab. Demak	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,1	111,6	5,5%
	2.Angka Melek Huruf	89,2	1148,2	7,8%
Kab. Kendal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,4	103,2	5,2%
	2.Angka Melek Huruf	84,3	1062,0	7,9%
Kab. Pekalongan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,3	101,8	5,2%
	2.Angka Melek Huruf	84,2	1047,9	8,0%
Kab. Wonosobo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,4	101,8	5,3%
	2.Angka Melek Huruf	86,5	1047,1	8,3%
Kota Surakarta	1.Rata-Rata Lama Sekolah	8,9	100,7	8,8%
	2.Angka Melek Huruf	92,9	1036,5	9,0%
Kab. Sukoharjo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,4	90,3	8,2%
	2.Angka Melek Huruf	84,0	928,8	9,0%
Kota Tegal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,6	90,5	7,3%
	2.Angka Melek Huruf	86,5	931,0	9,3%
Kab. Rembang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,9	87,6	6,7%
	2.Angka Melek Huruf	84,8	901,9	9,4%
Kab. Temanggung	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	65,7	8,5%
	2.Angka Melek Huruf	91,0	676,3	13,5%
Kota Magelang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	9,0	67,1	13,4%
	2.Angka Melek Huruf	93,4	690,4	13,5%
Kota Pekalongan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,1	44,4	16,0%
	2.Angka Melek Huruf	89,8	457,1	19,6%
Kota Salatiga	1.Rata-Rata Lama Sekolah	9,3	9,3	100,0%
	2.Angka Melek Huruf	95,7	95,7	100,0%

Sumber : BPS, diolah

Tingkat efisiensi dengan meminimumkan input dan memaksimalkan output mempunyai nilai efisiensi yang sama. Yang membedakan hanyalah pada perubahan yang harus dilakukan baik pada input ataupun pada output. Dalam pembahasan ini, untuk mencapai efisiensi yang sempurna (100%) maka output UKE yang belum efisien harus ditingkatkan.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, jumlah output yang harus dimaksimalkan pada tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah cenderung tinggi. Kabupaten/kota yang efisiensi pengeluarannya sempurna pada tahun 1999 hanya pada Kota Salatiga. Ini berarti Kota Salatiga mampu mengalokasikan pengeluaran pendidikannya dengan baik. Di Kabupaten Tegal, efisiensi yang

dicapai pada rata-rata lama sekolah sebesar 1,6% dan angka melek huruf sebesar 2,4% untuk meningkatkan efisiensi menjadi 100% maka harus meningkatkan outputnya yaitu pada rata-rata lama sekolah sebesar 342,7 % dan angka melek huruf sebesar 3526,4%. Sama halnya pada Kabupaten Cilacap, efisiensi yang dicapai pada rata-rata lama sekolah sebesar 2,0% dan angka melek huruf sebesar 3,0%, artinya agar efisiensi pengeluaran pendidikan meningkat maka harus meningkatkan rata-rata lama sekolah sebesar 269,1% dan angka melek huruf sebesar 2769,3%.

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pati, Kabupaten Brebes, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Batang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kota Tegal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang dan Kota Pekalongan, agar efisiensi pengeluaran pendidikannya sempurna (100%), maka harus meningkatkan outputnya yang cukup tinggi nilainya.

Tabel 6.8
Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai
Dengan Memaksimumkan Output
Pada Sektor Pendidikan Tahun 2002

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Kendal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,5	248,4	2,6%
	2.Angka Melek Huruf	88,6	3082,2	2,9%
Kab. Jepara	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,5	158,9	4,1%
	2.Angka Melek Huruf	87,0	1971,2	4,4%
Kab. Brebes	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,0	89,5	5,6%
	2.Angka Melek Huruf	81,1	1110,8	7,3%
Kab. Blora	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,7	87,4	6,5%
	2.Angka Melek Huruf	86,5	1084,5	7,4%
Kab. Grobogan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,3	58,4	10,8%
	2.Angka Melek Huruf	86,5	725,1	11,9%
Kab. Tegal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	51,4	10,9%
	2.Angka Melek Huruf	82,8	637,3	13,0%
Kab. Pekalongan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	46,3	12,1%
	2.Angka Melek Huruf	84,6	574,8	14,7%
Kab. Pati	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,5	47,5	13,7%
	2.Angka Melek Huruf	87,4	589,1	14,8%
Kab. Pemalang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,4	38,9	13,9%
	2.Angka Melek Huruf	82,2	482,3	17,0%
Kab. Batang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,9	36,8	16,0%
	2.Angka Melek Huruf	84,9	456,2	18,6%
Kab. Purbalingga	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	35,4	15,8%
	2.Angka Melek Huruf	88,8	438,9	20,2%
Kota Tegal	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,6	37,3	20,4%
	2.Angka Melek Huruf	91,0	462,3	19,7%
Kab. Banyumas	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,3	33,0	19,1%
	2.Angka Melek Huruf	89,6	409,9	21,9%
Kota Pekalongan	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,8	35,2	22,2%
	2.Angka Melek Huruf	91,6	436,4	21,0%
Kab. Rembang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,8	30,1	19,3%
	2.Angka Melek Huruf	85,7	373,3	24,2%
Kab. Banjarnegara	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,3	27,4	19,3%
	2.Angka Melek Huruf	82,3	340,6	24,2%
Kab. Kebumen	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,2	27,5	22,5%
	2.Angka Melek Huruf	85,6	341,7	25,1%
Kab. Semarang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,8	27,5	24,7%
	2.Angka Melek Huruf	88,5	341,5	25,9%
Kab. Kudus	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,1	25,6	27,8%
	2.Angka Melek Huruf	88,7	317,3	28,0%
Kab. Cilacap	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,1	24,7	24,7%
	2.Angka Melek Huruf	87,0	306,8	28,4%
Kab. Wonogiri	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,9	21,9	27,0%
	2.Angka Melek Huruf	77,4	271,3	28,5%
Kab. Temanggung	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,3	25,6	24,6%
	2.Angka Melek Huruf	91,6	318,0	28,8%

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Wonosobo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	5,6	20,6	27,2%
	2.Angka Melek Huruf	85,1	255,7	33,3%
Kab. Klaten	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,3	21,8	33,5%
	2.Angka Melek Huruf	82,8	270,4	30,6%
Kota Semarang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	10,0	26,3	38,1%
	2.Angka Melek Huruf	95,5	326,0	29,3%
Kab. Sukoharjo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,9	20,5	38,5%
	2.Angka Melek Huruf	82,2	254,6	32,3%
Kab. Magelang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,0	16,1	43,3%
	2.Angka Melek Huruf	89,0	200,4	44,4%
Kab. Purworejo	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,1	15,5	45,9%
	2.Angka Melek Huruf	88,5	191,8	46,1%
Kab. Karanganyar	1.Rata-Rata Lama Sekolah	7,0	14,2	49,3%
	2.Angka Melek Huruf	78,9	176,0	44,8%
Kab. Sragen	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,0	11,3	53,2%
	2.Angka Melek Huruf	75,3	139,9	53,8%
Kota Surakarta	1.Rata-Rata Lama Sekolah	9,8	18,0	54,3%
	2.Angka Melek Huruf	94,6	223,8	42,3%
Kota Magelang	1.Rata-Rata Lama Sekolah	9,8	11,0	88,8%
	2.Angka Melek Huruf	95,6	136,9	69,8%
Kota Salatiga	1.Rata-Rata Lama Sekolah	9,5	9,5	99,9%
	2.Angka Melek Huruf	93,3	118,0	79,1%
Kota Boyolali	1.Rata-Rata Lama Sekolah	6,6	6,6	100,0%
	2.Angka Melek Huruf	81,9	81,9	100,0%

Sumber : BPS, diolah

Pada tahun 2002 efisiensi pengeluaran pendidikannya sempurna hanya pada Kota Boyolali. Ini dapat dilihat besarnya angka nominal pada kolom aktual sama dengan kolom target. Tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan pada tahun 2002 cenderung meningkat pada tahun 1999, ini berarti mulai pulihnya kebijakan-kebijakan pada setiap daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah.

Kota Salatiga pada tahun 2002 ini mengalami penurunan efisiensi, ini dikarenakan terjadinya penurunan output. Tingkat efisiensi pada rata-rata lama sekolah sebesar 99,9% dan angka melek huruf sebesar 79,1%. Agar efisiensi pengeluaran pendidikannya sempurna maka, Kota Salatiga harus meningkatkan outputnya yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 9,5% dan angka melek huruf sebesar 118,0%. Sama halnya dengan Kota Magelang agar efisiensi pengeluaran

pendidikannya menjadi 100% maka harus meningkatkan outputnya yaitu rata-rata lama sekolah sebesar 11,0% dan angka melek huruf sebesar 136,9%.

Kabupaten/kota lainnya yaitu, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Brebes, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Purbalingga, Kota Tegal, Kabupaten Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kota Surakarta agar efisiensi pengeluaran pendidikannya menjadi efisien, maka masing-masing daerah harus meningkatkan outputnya.

B. Pengeluaran Kesehatan

Tabel 6.9 menunjukkan solusi bagaimana meningkatkan efisiensi pada kabupaten/kota yang belum efisien dengan cara memaksimalkan output. Bila kabupaten/kota itu efisien, pada kolom *achieved* menunjukkan angka 100% dan pada kolom aktual dan target nilainya sama. Dan apabila kabupaten/kota tersebut tidak efisien maka nilai pada kolom aktual dan target berbeda, biasanya kolom target nilainya lebih besar dari pada kolom aktual. Ini menandakan bahwa berapa besar nilai output yang harus ditingkatkan agar kabupaten/kota tersebut menjadi efisien.

Tabel 6.9
Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai
Dengan Memaksimumkan Output
Pada Sektor Kesehatan Tahun 1999

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Tegal	Angka Harapan Hidup	65,2	5300,5	1,2%
Kab. Cilacap	Angka Harapan Hidup	67,2	4199,3	1,6%
Kota Semarang	Angka Harapan Hidup	70,2	2355,7	3,0%
Kab. Pemasang	Angka Harapan Hidup	64,5	2037,6	3,2%
Kab. Brebes	Angka Harapan Hidup	63,3	1520,7	4,2%
Kab. Banyumas	Angka Harapan Hidup	68,1	1551,7	4,4%
Kab. Wonogiri	Angka Harapan Hidup	71,1	1514,0	4,7%
Kab. Blora	Angka Harapan Hidup	69,9	1451,4	4,8%
Kab. Kendal	Angka Harapan Hidup	64,7	1182,0	5,5%
Kab. Jepara	Angka Harapan Hidup	69,6	1241,5	5,6%
Kab. Grobogan	Angka Harapan Hidup	67,8	1198,2	5,7%
Kab. Semarang	Angka Harapan Hidup	70,6	1163,4	6,1%
Kab. Demak	Angka Harapan Hidup	68,7	1077,3	6,4%
Kab. Purbalingga	Angka Harapan Hidup	67,4	946,8	7,1%
Kab. Pati	Angka Harapan Hidup	71,6	891,7	8,0%
Kab. Rembang	Angka Harapan Hidup	68,0	770,0	8,8%
Kab. Magelang	Angka Harapan Hidup	68,0	733,3	9,3%
Kab. Karanganyar	Angka Harapan Hidup	70,1	729,5	9,6%
Kab. Klaten	Angka Harapan Hidup	69,1	686,1	10,1%
Kab. Purworejo	Angka Harapan Hidup	67,7	662,0	10,2%
Kab. Boyolali	Angka Harapan Hidup	69,4	617,1	11,2%
Kab. Kudus	Angka Harapan Hidup	67,8	573,7	11,8%
Kota Surakarta	Angka Harapan Hidup	70,9	579,2	12,2%
Kab. Batang	Angka Harapan Hidup	68,1	545,9	12,5%
Kab. Kebumen	Angka Harapan Hidup	67,2	532,4	12,6%
Kab. Banjarnegara	Angka Harapan Hidup	67,4	516,9	13,0%
Kota Tegal	Angka Harapan Hidup	66,6	467,5	14,2%
Kab. Pekalongan	Angka Harapan Hidup	66,5	451,0	14,7%
Kab. Wonosobo	Angka Harapan Hidup	67,7	388,8	17,4%
Kab. Temanggung	Angka Harapan Hidup	70,7	296,2	23,9%
Kab. Sukoharjo	Angka Harapan Hidup	69,1	266,9	25,9%
Kab. Sragen	Angka Harapan Hidup	70,8	221,8	31,9%
Kota Magelang	Angka Harapan Hidup	69,1	210,6	32,8%
Kota Pekalongan	Angka Harapan Hidup	68,1	199,2	34,2%
Kota Salatiga	Angka Harapan Hidup	69,5	69,5	100,0%

Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat, tingkat efisiensi pengeluaran kesehatan pada tahun 1999 mayoritas tidak efisien hanya Kota Salatiga saja yang tingkat efisiensinya sempurna. Kabupaten Tegal efisiensi pengeluaran kesehatannya tidak efisien, untuk meningkatkan efisiensinya menjadi 100% maka harus meningkatkan outputnya yaitu angka harapan hidup sebesar 5300,5%.

Begitu juga Kabupaten Cilacap, efisiensi yang dicapainya hanya sebesar 1,6%. Agar efisiensi pengeluaran kesehatannya menjadi 100% maka Kabupaten Cilacap harus meningkatkan outputnya yaitu angka harapan hidup sebesar 4199,3%.

Kota Semarang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Kudus, Kota Surakarta, Kabupaten Batang, Kabupaten Kudus, Kabupaten Banjarnegara, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kota Magelang, dan Kota Pekalongan, agar efisiensi pengeluaran kesehatannya pada tahun 1999 menjadi efisien maka, masing-masing daerah harus meningkatkan outputnya sesuai dengan tingkatannya masing-masing.

Tabel 6.10
Aktual, Target dan Efisiensi Yang Dicapai
Dengan Memaksimumkan Output
Pada Sektor Kesehatan Tahun 2002

Kab/Kota	Output	Aktual	Target	Achieved
Kab. Jepara	Angka Harapan Hidup	70,0	2278,9	3,1%
Kab. Pati	Angka Harapan Hidup	72,5	1402,8	5,2%
Kab. Tegal	Angka Harapan Hidup	66,2	1224,8	5,4%
Kota Tegal	Angka Harapan Hidup	66,9	1229,9	5,4%
Kota Salatiga	Angka Harapan Hidup	70,2	972,5	7,2%
Kab. Purbalingga	Angka Harapan Hidup	67,6	914,1	7,4%
Kab. Wonosobo	Angka Harapan Hidup	68,5	919,8	7,4%
Kab. Semarang	Angka Harapan Hidup	71,3	874,1	8,2%
Kab. Grobogan	Angka Harapan Hidup	68,1	760,7	9,0%
Kota Semarang	Angka Harapan Hidup	70,4	726,3	9,7%
Kab. Rembang	Angka Harapan Hidup	68,6	700,4	9,8%
Kab. Cilacap	Angka Harapan Hidup	67,8	663,4	10,2%
Kab. Temanggung	Angka Harapan Hidup	71,4	675,9	10,6%
Kab. Blora	Angka Harapan Hidup	70,3	606,0	11,6%
Kab. Brebes	Angka Harapan Hidup	64,3	388,7	16,5%
Kab. Kendal	Angka Harapan Hidup	65,0	347,9	18,7%
Kab. Batang	Angka Harapan Hidup	68,7	352,2	19,5%
Kab. Kudus	Angka Harapan Hidup	68,2	337,3	20,2%
Kab. Sukoharjo	Angka Harapan Hidup	69,3	342,4	20,2%
Kab. Banjarnegara	Angka Harapan Hidup	67,7	320,6	21,1%
Kab. Kebumen	Angka Harapan Hidup	67,6	288,0	23,5%
Kab. Klaten	Angka Harapan Hidup	69,8	289,4	24,1%
Kab. Pemasang	Angka Harapan Hidup	65,2	265,0	24,6%
Kota Magelang	Angka Harapan Hidup	69,3	279,0	24,8%
Kab. Boyolali	Angka Harapan Hidup	69,6	241,5	28,8%
Kab. Wonogiri	Angka Harapan Hidup	71,6	247,9	28,9%
Kota Pekalongan	Angka Harapan Hidup	68,6	206,6	33,2%
Kab. Sragen	Angka Harapan Hidup	71,5	198,8	36,0%
Kab. Magelang	Angka Harapan Hidup	68,8	187,6	36,7%
Kab. Purworejo	Angka Harapan Hidup	68,0	166,6	40,8%
Kab. Banyumas	Angka Harapan Hidup	68,6	163,2	42,0%
Kab. Pekalongan	Angka Harapan Hidup	66,6	143,0	46,6%
Kab. Karanganyar	Angka Harapan Hidup	71,8	104,3	68,8%
Kota Surakarta	Angka Harapan Hidup	71,1	71,1	100,0%

Sumber : BPS, diolah

Dari tabel diatas dapat dilihat, tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan pada tahun 2002 meningkat dari tahun sebelumnya (1999). Kota Surakarta merupakan daerah yang mampu mengalokasikan pengeluaran kesehatannya secara optimal. Sama halnya dengan tahun 1999 daerah yang efisiensi pengeluaran kesehatannya belum efisien maka harus meningkatkan

outputnya yaitu angka harapan hidup di masing-masing daerah. Seperti di Kabupaten Karanganyar efisiensi pengeluaran kesehatannya sebesar 68,8%. Artinya Kabupaten Karanganyar harus meningkatkan outputnya yaitu angka harapan hidup sebesar 104,3% agar tingkat efisiensi pengeluaran kesehatannya menjadi sempurna yaitu sebesar 100%.



BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan program *Data Envelopment Analysis* (DEA) terhadap tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan dan kesehatan pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 1999 dan 2002 adalah sebagai berikut :

1. Tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan pada tahun 1999 di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah cenderung belum efisien. Tingkat efisiensi sempurna (100%) hanya pada Kota Salatiga, sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya rata-rata tingkat efisiensinya dibawah 50%.
2. Tahun 2002 tingkat efisiensi pengeluaran pendidikan meningkat dari tahun sebelumnya (1999), namun masih dikategorikan belum efisien. Hanya Kabupaten Boyolali yang tingkat efisiensinya terbaik (100%), kemudian Kota Salatiga 99,9%, Kota Magelang (88,8%), Kota Surakarta (54,3%) dan Kabupaten Sragen (53,8%). Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya tingkat efisiensinya di bawah 50%.
3. Tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan tahun 1999 di kabupaten/kota Jawa Tengah mayoritas belum efisien. Hanya Kota Salatiga saja yang tingkat efisiensinya terbaik (100%). Sedangkan tingkat efisiensi di 34 kabupaten/kota Jawa Tengah rata-rata dibawah 50%.

4. Tahun 2002 tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan sedikit membaik, terjadi peningkatan walaupun peningkatan tersebut tidak banyak. Kota Surakarta merupakan Kota yang tingkat efisiensi pengeluaran kesehatannya sempurna (100%), lalu kabupaten Karanganyar 68,84% dan untuk kabupaten/kota lainnya rata-rata tingkat efisiensinya di bawah 50%.

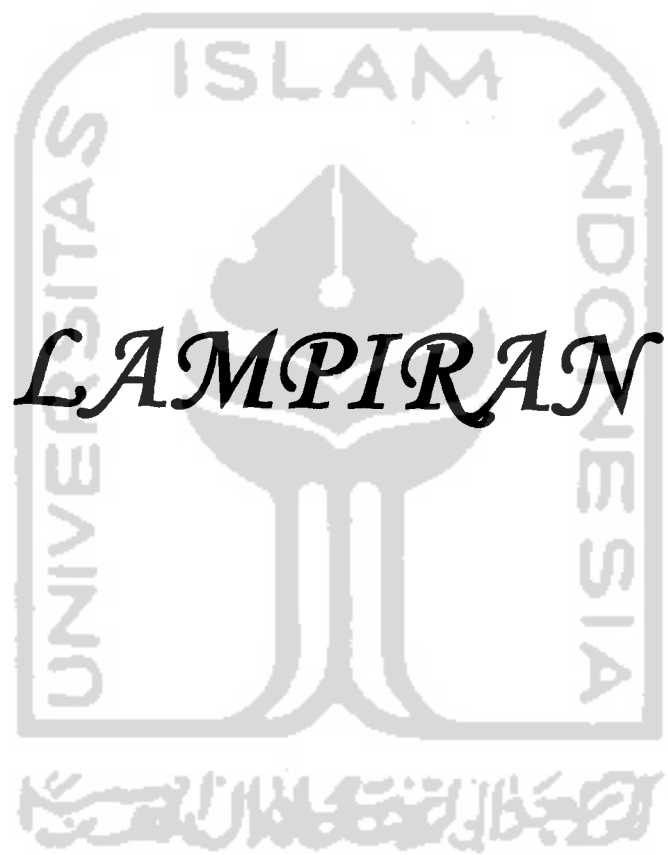
7.2. Implikasi

- 1) Perlunya monitoring dan evaluasi yang terus-menerus terhadap pengeluaran pemerintah daerah khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, sehingga pemborosan pengeluaran pemerintah daerah dapat dieliminir. Karena pengurangan pengalokasian pengeluaran pemerintah daerah yang tepat dapat meningkatkan tingkat efisiensi pada pengeluaran tersebut.
- 2) Dalam rangka peningkatan efisiensi, dukungan pemerintah di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah dan pihak-pihak yang terkait sangat diperlukan. Terutama dalam penyaluran dana untuk pengeluaran pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Pentingnya perencanaan yang matang dalam mengatur pengeluaran pemerintah di kabupaten/kota sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana yang akan sangat merugikan masyarakat di masing-masing daerah.
- 4) Untuk daerah yang belum efisien pengeluarannya baik di sektor pendidikan maupun kesehatan, hendaknya memperbaiki kinerja pemerintahannya. Hal ini dilakukan agar pengalokasian pengeluaran pemerintah di dua sektor tersebut dapat terealisasikan dengan sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, (1999), *“Modul Pelatihan Metodologi Penelitian Empiris Metode Kuantitatif Ekonomi dan Bisnis”*, Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
- Andrianus, Fery (2003), *“Analisis Pengeluaran Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1970-2000”*, *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Volume 1, No. 2, 124-140.
- BPS (berbagai tahun terbitan), *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*.
- _____, (berbagai tahun terbitan), *Data dan Informasi Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota*.
- _____, (2003), *Jawa Tengah Dalam Angka*.
- _____, (2002), *Pendapatan Regional Jawa Tengah*.
- Dumairy, Drs., M.A. (1997), *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar (1996), *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Cides, Jakarta.
- Kurnawangsih, Tri (2002), *“Efisiensi Unit-Unit Kegiatan Ekonomi Industri Logam Dasar Non Besi dan Baja (ISIC 372) Indonesia Tahun 1996 dan 1998”*, *Media Ekonomi*, Vol. 8, No. 3, 299-313.
- Kurnia, Akhmad Syakir, *“Model Pengukuran Kinerja dan Efisiensi Sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH)”*.

- Mangkoesoebroto, Guritno, Drs., Mec. (1993), *Ekonomi Publik*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta.
- Rustam, Rinaldi (2005), "Analisis Efisiensi Teknis Bank Devisa Nasional Dengan Menggunakan Metode Non Parametrik : Data Envelopment Analysis (DEA)", *Media Ekonomi*, Vol 11, No. 2, 173-188.
- Suparmoko, M.,Drs., Ph.D., MA. (2002), *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Sebayang, Asnita Frida (2005), "Kinerja Kebijakan Fiskal Daerah Di Indonesia Pasca Krisis", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No.3, 203-213.
- Todaro, P. Dan Stephen C. Smith (2003), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi ke delapan*, Erlangga, Jakarta.
- Tarigan, Antonius (2005), "Urgensi Penguatan Kekuangan Daerah Suatu Tinjauan Terhadap Regulasi Daerah dan Implikasinya Dalam Penyediaan Pelayanan Publik, *Perencanaan Pembangunan*, Edisi 04, Tahun IX, 46-53.
- Wahyudi, Noeroso, L., (2004), "Dampak Sosial Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah dan proyek Pembangunan Studi Kasus Sektor Pendidikan", *Bunga Rampai Hasil Penelitian*, 45-64.



Lampiran I. Data Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan (1999 dan 2002), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup

Tahun 1999

Kab/Kota	PP	PK	RLS	AMH	AHP
KB. CILACAP	5229,28	3552,82	5,4	84,2	67,2
KB. BANYUMAS	3776,48	1312,78	6,4	91,2	68,1
KB. PURBALINGGA	3912,53	801,04	5,3	86,2	67,4
KB. BANJARNEGARA	4122,67	437,31	5,6	85,9	67,4
KB. KEBUMEN	4390,07	450,42	5,9	87,2	67,2
KB. PURWOREJO	2541,22	560,05	6,3	86,3	67,7
KB. WONOSOBO	1977,47	328,92	5,4	86,5	67,7
KB. MAGELANG	2566,69	620,40	6,3	86,2	68
KB. BOYOLALI	1992,47	522,10	6,2	81,4	69,4
KB. KLATEN	2929,09	580,43	6,7	81,1	69,1
KB. SUKOHARJO	1753,92	225,78	7,4	84	69,1
KB. WONOGIRI	4024,82	1280,93	5,6	76,4	71,1
KB. KARANGANYAR	2387,49	617,23	6,1	78,3	70,1
KB. SRAGEN	1837,51	187,67	5,3	71,6	70,8
KB. GROBOGAN	3298,39	1013,70	5,6	85,6	67,8
KB. BLORA	2928,77	1227,97	4,8	74,1	69,9
KB. REMBANG	1703,12	651,44	5,9	84,8	68
KB. PATI	2417,32	754,40	5,6	80	71,6
KB. KUDUS	2337,98	485,36	6,9	88,8	67,8
KB. JEPARA	2597,60	1050,34	6	83,1	69,6
KB. DEMAK	2168,20	911,43	6,1	89,2	68,7
KB. SEMARANG	2256,02	984,25	6,6	89,4	70,6
KB. TEMANGGUNG	1277,13	250,56	5,6	91	70,7
KB. KENDAL	2005,37	999,99	5,4	84,3	64,7
KB. BATANG	2435,22	461,82	5,1	85,8	68,1
KB. PEKALONGAN	1978,72	381,60	5,3	84,2	66,5
KB. PEMALANG	3536,66	1723,91	5,2	82,3	64,5
KB. TEGAL	6658,81	4484,48	5,6	83,5	65,2
KB. BREBES	2474,33	1286,54	4,8	83	63,3
KT. MAGELANG	1303,68	178,16	9	93,4	69,1
KT. SURAKARTA	1957,17	489,99	8,9	92,9	70,9
KT. SALATIGA	180,71	58,80	9,3	95,7	69,5
KT. SEMARANG	3575,85	1992,99	8,7	93,6	70,2
KT. PEKALONGAN	863,08	168,55	7,1	89,8	68,1
KT. TEGAL	1758,06	395,55	6,6	86,5	66,6

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Keterangan:

- PP = Pengeluaran Pendidikan (Juta Rupiah)
- PK = Pengeluaran Kesehatan (Juta Rupiah)
- RLS = Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
- AMH = Angka Melek Huruf (%)
- AHP = Angka Harapan Hidup (Tahun)

Tahun 2002

Kab/Kota	PP	PK	RLS	AMH	AHP
KB. CILACAP	4088,00	5369,60	6,1	87,0	67,8
KB. BANYUMAS	5461,60	1321,23	6,3	89,6	68,6
KB. PURBALINGGA	5847,32	7399,32	5,6	88,8	67,6
KB. BANJARNEGARA	4538,00	2595,00	5,3	82,3	67,7
KB. KEBUMEN	4552,50	2331,15	6,2	85,6	67,6
KB. PURWOREJO	2555,99	1348,32	7,1	88,5	68,0
KB. WONOSOBO	3407,00	7445,00	5,6	85,1	68,5
KB. MAGELANG	2670,00	1518,81	7,0	89,0	68,8
KB. BOYOLALI	1091,25	1954,79	6,6	81,9	69,6
KB. KLATEN	3602,92	2342,72	7,3	82,8	69,8
KB. SUKOHARJO	3392,13	2771,27	7,9	82,2	69,3
KB. WONOGIRI	3614,27	2006,60	5,9	77,4	71,6
KB. KARANGANYAR	2345,72	844,25	7,0	78,9	71,8
KB. SRAGEN	1863,66	1609,00	6,0	75,3	71,5
KB. GROBOGAN	9661,65	6157,53	6,3	86,5	68,1
KB. BLORA	14450,00	4905,50	5,7	80,6	70,3
KB. REMBANG	4973,69	5669,00	5,8	85,7	68,6
KB. PATI	7889,62	11354,42	6,5	87,4	72,5
KB. KUDUS	4227,15	2730,27	7,1	88,7	68,2
KB. JEPARA	26265,03	18445,89	6,5	87,0	70,0
KB. SEMARANG	4550,18	7075,00	6,8	88,5	71,3
KB. TEMANGGUNG	4237,20	5470,60	6,3	91,6	71,4
KB. KENDAL	41067,56	2816,31	6,5	88,6	65,0
KB. BATANG	6078,50	2850,50	5,9	84,9	68,7
KB. PEKALONGAN	7658,75	1157,49	5,6	84,6	66,6
KB. PEMALANG	6426,00	2145,00	5,4	82,2	65,2
KB. TEGAL	8491,20	9913,50	5,6	82,8	66,2
KB. BREBES	14800,00	3146,50	5,0	81,1	64,3
KT. MAGELANG	1824,21	2258,65	9,8	95,6	69,3
KT. SURAKARTA	2982,40	575,50	9,8	94,6	71,1
KT. SALATIGA	1571,80	7871,85	9,5	93,3	70,2
KT. SEMARANG	4343,87	5878,96	10,0	95,5	70,4
KT. PEKALONGAN	5814,93	1672,49	7,8	91,6	68,6
KT. TEGAL	6160,05	9955,09	7,6	91,0	66,9

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Keterangan:

- PP = Pengeluaran Pendidikan (Juta Rupiah)
- PK = Pengeluaran Kesehatan (Juta Rupiah)
- RLS = Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
- AMH = Angka Melek Huruf (%)
- AHP = Angka Harapan Hidup (Tahun)

Lampiran II. Tabel Efisiensi Sektor Pendidikan Tahun 1999

Table of efficiencies (radial)

2.37 KB.TEGAL	3.04 KB.CILACAP	3.58 KB.WNGIRI
3.75 KB.KEBUMEN	3.93 KB.BJRNGAR	4.16 KB.PURBLGA
4.39 KB.PEMLNG	4.56 KB.BNYUMAS	4.78 KB.BLORA
4.90 KB.GROBOGA	4.94 KT.SMRG	5.23 KB.KLATEN
6.04 KB.JEPARA	6.19 KB.KRNGANY	6.25 KB.PATI
6.33 KB.BREBES	6.34 KB.MAGELNG	6.41 KB.PURWRJO
6.65 KB.BATANG	7.17 KB.KUDUS	7.36 KB.SRAGEN
7.48 KB.SMRG	7.71 KB.BOYOLAL	7.77 KB.DEMAK
7.94 KB.KENDAL	8.04 KB.PKLNGN	8.26 KB.WNSOBO
8.96 KT.SRKARTA	9.04 KB.SUKOHAJ	9.29 KT.TEGAL
9.40 KB.REMBANG	13.45 KB.TMANGGU	13.53 KT.MAGELNG
19.65 KT.PKLNGN	100.00 KT.SLTIGA	

Lampiran III. Table Peer Sektor Pendidikan dengan Meminimumkan Input Tahun 1999

Table of peer units

Peers for Unit KB.TEGAL efficiency 2.37% radial

KB.TEGAL		KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA	0.873
6658.8 -PP		157.7
5.6 +RLS		8.1
83.5 +AMH		83.5

Peers for Unit KB.CILACAP efficiency 3.04% radial

KB.CILACAP		KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA	0.880
5229.3 -PP		159.0
5.4 +RLS		8.2
84.2 +AMH		84.2

Peers for Unit KB.WNGIRI efficiency 3.58% radial

KB.WNGIRI		KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA	0.798
4024.8 -PP		144.3
5.6 +RLS		7.4
76.4 +AMH		76.4

Peers for Unit KB.KEBUMEN efficiency 3.75% radial

KB.KEBUMEN		KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA	0.911
4390.1 -PP		164.7
5.9 +RLS		8.5
87.2 +AMH		87.2

Peers for Unit KB.BJRNGARA efficiency 3.93% radial

KB.BJRNGAR		KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA	0.898
4122.7 -PP		162.2
5.6 +RLS		8.3
85.9 +AMH		85.9

Peers for Unit KB.PURBLGA efficiency	4.16% radial
KB.PURBLGA	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
3912.5 -PP	0.901
5.3 +RLS	162.8
86.2 +AMH	8.4
	86.2
Peers for Unit KB.PEMLNG efficiency	4.39% radial
KB.PEMLNG	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
3536.7 -PP	0.860
5.2 +RLS	155.4
82.3 +AMH	8.0
	82.3
Peers for Unit KB.BNYUMAS efficiency	4.56% radial
KB.BNYUMAS	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
3776.5 -PP	0.953
6.4 +RLS	172.2
91.2 +AMH	8.9
	91.2
Peers for Unit KB.BLORA efficiency	4.78% radial
KB.BLORA	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2928.8 -PP	0.774
4.8 +RLS	139.9
74.1 +AMH	7.2
	74.1
Peers for Unit KB.GROBOGAN efficiency	4.90% radial
KB.GROBOGA	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
3298.4 -PP	0.894
5.6 +RLS	161.6
85.6 +AMH	8.3
	85.6
Peers for Unit KT.SMRG efficiency	4.94% radial
KT.SMRG	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
3575.9 -PP	0.978
8.7 +RLS	176.7
93.6 +AMH	9.1
	93.6
Peers for Unit KB.KLATEN efficiency	5.23% radial
KB.KLATEN	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2929.1 -PP	0.847
6.7 +RLS	153.1
81.1 +AMH	7.9
	81.1
Peers for Unit KB.JEPARA efficiency	6.04% radial
KB.JEPARA	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2597.6 -PP	0.868
6.0 +RLS	156.9
83.1 +AMH	8.1
	83.1
Peers for Unit KB.KRNGANYAR efficiency	6.19% radial
KB.KRNGANY	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2387.5 -PP	0.818
6.1 +RLS	147.9
78.3 +AMH	7.6
	78.3
Peers for Unit KB.PATI efficiency	6.25% radial
KB.PATI	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2417.3 -PP	0.836
5.6 +RLS	151.1
80.0 +AMH	7.8
	80.0

Peers for Unit KB.BREBES efficiency	6.33% radial
KB.BREBES	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2474.3 -PP	0.867
4.8 +RLS	156.7
83.0 +AMH	8.1
83.0	83.0
Peers for Unit KB.MAGELNG efficiency	6.34% radial
KB.MAGELNG	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2566.7 -PP	0.901
6.3 +RLS	162.8
86.2 +AMH	8.4
86.2	86.2
Peers for Unit KB.PURWRJO efficiency	6.41% radial
KB.PURWRJO	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2541.2 -PP	0.902
6.3 +RLS	163.0
86.3 +AMH	8.4
86.3	86.3
Peers for Unit KB.BATANG efficiency	6.65% radial
KB.BATANG	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2435.2 -PP	0.897
5.1 +RLS	162.0
85.8 +AMH	8.3
85.8	85.8
Peers for Unit KB.KUDUS efficiency	7.17% radial
KB.KUDUS	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2338.0 -PP	0.928
6.9 +RLS	167.7
88.8 +AMH	8.6
88.8	88.8
Peers for Unit KB.SRAGEN efficiency	7.36% radial
KB.SRAGEN	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1837.5 -PP	0.748
5.3 +RLS	135.2
71.6 +AMH	7.0
71.6	71.6
Peers for Unit KB.SMRG efficiency	7.48% radial
KB.SMRG	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2256.0 -PP	0.934
6.6 +RLS	168.8
89.4 +AMH	8.7
89.4	89.4
Peers for Unit KB.BOYOLALI efficiency	7.71% radial
KB.BOYOLALI	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1992.5 -PP	0.851
6.2 +RLS	153.7
81.4 +AMH	7.9
81.4	81.4
Peers for Unit KB.DEMAK efficiency	7.77% radial
KB.DEMAK	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2168.2 -PP	0.932
6.1 +RLS	168.4
89.2 +AMH	8.7
89.2	89.2
Peers for Unit KB.KENDAL efficiency	7.94% radial
KB.KENDAL	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
2005.4 -PP	0.881
5.4 +RLS	159.2
84.3 +AMH	8.2
84.3	84.3

Peers for Unit KB.PKLNGN efficiency	8.04% radial
KB.PKLNGN	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1978.7 -PP	0.880
5.3 +RLS	159.0
84.2 +AMH	8.2
84.2	84.2
Peers for Unit KB.WNSOBO efficiency	8.26% radial
KB.WNSOBO	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1977.2 -PP	0.904
5.4 +RLS	163.3
86.5 +AMH	8.4
86.5	86.5
Peers for Unit KT.SRKARTA efficiency	8.96% radial
KT.SRKARTA	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1957.2 -PP	0.971
8.9 +RLS	175.4
92.9 +AMH	9.0
92.9	92.9
Peers for Unit KB.SUKOHAJO efficiency	9.04% radial
KB.SUKOHAJ	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1753.9 -PP	0.878
7.4 +RLS	158.6
84.0 +AMH	8.2
84.0	84.0
Peers for Unit KT.TEGAL efficiency	9.29% radial
KT.TEGAL	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1758.1 -PP	0.904
6.6 +RLS	163.3
86.5 +AMH	8.4
86.5	86.5
Peers for Unit KB.REMBANG efficiency	9.40% radial
KB.REMBANG	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1703.1 -PP	0.886
5.9 +RLS	160.1
84.8 +AMH	8.2
84.8	84.8
Peers for Unit KB.TMANGGUNG efficiency	13.45% radial
KB.TMANGGU	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1277.1 -PP	0.951
5.6 +RLS	171.8
91.0 +AMH	8.8
91.0	91.0
Peers for Unit KT.MAGELNG efficiency	13.53% radial
KT.MAGELNG	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1303.7 -PP	0.976
9.0 +RLS	176.4
93.4 +AMH	9.1
93.4	93.4
Peers for Unit KT.PKLNGN efficiency	19.65% radial
KT.PKLNGN	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
863.1 -PP	0.938
7.1 +RLS	169.6
89.8 +AMH	8.7
89.8	89.8
Peers for Unit KT.SLTIGA efficiency	100.00% radial
KT.SLTIGA	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
180.7 -PP	1.000
9.3 +RLS	180.7
95.7 +AMH	9.3
95.7	95.7

**Lampiran IV. Table Target Sektor Pendidikan dengan Meminimumkan Input
Tahun 1999**

Table of target values				
Targets for Unit KB.TEGAL efficiency 2.37% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	6658.8	157.7	97.6%	2.4%
+RLS	5.6	8.1	44.9%	69.0%
+AMH	83.5	83.5	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.CILACAP efficiency 3.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	5229.3	159.0	97.0%	3.0%
+RLS	5.4	8.2	51.5%	66.0%
+AMH	84.2	84.2	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.WNGIRI efficiency 3.58% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4024.8	144.3	96.4%	3.6%
+RLS	5.6	7.4	32.6%	75.4%
+AMH	76.4	76.4	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.KEBUMEN efficiency 3.75% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4390.1	164.7	96.2%	3.8%
+RLS	5.9	8.5	43.6%	69.6%
+AMH	87.2	87.2	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.BJRNGARA efficiency 3.93% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4122.7	162.2	96.1%	3.9%
+RLS	5.6	8.3	49.1%	67.1%
+AMH	85.9	85.9	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.PURBLGA efficiency 4.16% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3912.5	162.8	95.8%	4.2%
+RLS	5.3	8.4	58.1%	63.3%
+AMH	86.2	86.2	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.PEMLNG efficiency 4.39% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3536.7	155.4	95.6%	4.4%
+RLS	5.2	8.0	53.8%	65.0%
+AMH	82.3	82.3	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.BNYUMAS efficiency 4.56% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3776.5	172.2	95.4%	4.6%
+RLS	6.4	8.9	38.5%	72.2%
+AMH	91.2	91.2	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.BLORA efficiency 4.78% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2928.8	139.9	95.2%	4.8%
+RLS	4.8	7.2	50.0%	66.7%
+AMH	74.1	74.1	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.GROBOGAN efficiency 4.90% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3298.4	161.6	95.1%	4.9%
+RLS	5.6	8.3	48.5%	67.3%
+AMH	85.6	85.6	0.0%	100.0%
Targets for Unit KT.SMRG efficiency 4.94% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3575.9	176.7	95.1%	4.9%
+RLS	8.7	9.1	4.6%	95.6%
+AMH	93.6	93.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.KLATEN efficiency 5.23% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2929.1	153.1	94.8%	5.2%
+RLS	6.7	7.9	17.6%	85.0%
+AMH	81.1	81.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.JEPARA efficiency 6.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2597.6	156.9	94.0%	6.0%
+RLS	6.0	8.1	34.6%	74.3%
+AMH	83.1	83.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.KRNGANYAR efficiency 6.19% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2387.5	147.9	93.8%	6.2%
+RLS	6.1	7.6	24.7%	80.2%
+AMH	78.3	78.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PATI efficiency 6.25% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2417.3	151.1	93.8%	6.2%
+RLS	5.6	7.8	38.8%	72.0%
+AMH	80.0	80.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BREBES efficiency 6.33% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2474.3	156.7	93.7%	6.3%
+RLS	4.8	8.1	68.0%	59.5%
+AMH	83.0	83.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.MAGELNG efficiency 6.34% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2566.7	162.8	93.7%	6.3%
+RLS	6.3	8.4	33.0%	75.2%
+AMH	86.2	86.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PURWRJO efficiency 6.41% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2541.2	163.0	93.6%	6.4%
+RLS	6.3	8.4	33.1%	75.1%
+AMH	86.3	86.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BATANG efficiency 6.65% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2435.2	162.0	93.3%	6.7%
+RLS	5.1	8.3	63.5%	61.2%
+AMH	85.8	85.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.KUDUS efficiency 7.17% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2338.0	167.7	92.8%	7.2%
+RLS	6.9	8.6	25.1%	80.0%
+AMH	88.8	88.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.SRAGEN efficiency 7.36% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1837.5	135.2	92.6%	7.4%
+RLS	5.3	7.0	31.3%	76.2%
+AMH	71.6	71.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.SMRG efficiency 7.48% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2256.0	168.8	92.5%	7.5%
+RLS	6.6	8.7	31.6%	76.0%
+AMH	89.4	89.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BOYOLALI efficiency 7.71% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1992.5	153.7	92.3%	7.7%
+RLS	6.2	7.9	27.6%	78.4%
+AMH	81.4	81.4	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.DEMAK efficiency 7.77% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2168.2	168.4	92.2%	7.8%
+RLS	6.1	8.7	42.1%	70.4%
+AMH	89.2	89.2	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.KENDAL efficiency 7.94% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2005.4	159.2	92.1%	7.9%
+RLS	5.4	8.2	51.7%	65.9%
+AMH	84.3	84.3	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.PKLNGN efficiency 8.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1978.7	159.0	92.0%	8.0%
+RLS	5.3	8.2	54.4%	64.8%
+AMH	84.2	84.2	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.WNSOBO efficiency 8.26% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1977.2	163.3	91.7%	8.3%
+RLS	5.4	8.4	55.7%	64.2%
+AMH	86.5	86.5	0.0%	100.0%
Targets for Unit KT.SRKARTA efficiency 8.96% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1957.2	175.4	91.0%	9.0%
+RLS	8.9	9.0	1.4%	98.6%
+AMH	92.9	92.9	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.SUKOHAJO efficiency 9.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1753.9	158.6	91.0%	9.0%
+RLS	7.4	8.2	10.3%	90.7%
+AMH	84.0	84.0	0.0%	100.0%
Targets for Unit KT.TEGAL efficiency 9.29% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1758.1	163.3	90.7%	9.3%
+RLS	6.6	8.4	27.4%	78.5%
+AMH	86.5	86.5	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.REMBANG efficiency 9.40% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1703.1	160.1	90.6%	9.4%
+RLS	5.9	8.2	39.7%	71.6%
+AMH	84.8	84.8	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 13.45% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1277.1	171.8	86.5%	13.5%
+RLS	5.6	8.8	57.9%	63.3%
+AMH	91.0	91.0	0.0%	100.0%
Targets for Unit KT.MAGELNG efficiency 13.53% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1303.7	176.4	86.5%	13.5%
+RLS	9.0	9.1	0.8%	99.2%
+AMH	93.4	93.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.PKLNGN efficiency 19.65% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	863.1	169.6	80.4%	19.6%
+RLS	7.1	8.7	22.9%	81.4%
+AMH	89.8	89.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.SLTIGA efficiency 100.00% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	180.7	180.7	0.0%	100.0%
+RLS	9.3	9.3	0.0%	100.0%
+AMH	95.7	95.7	0.0%	100.0%



Lampiran V. Tabel Efisiensi Sektor Kesehatan Tahun 1999

Table of efficiencies (radial)

1.23 KB.TEGAL	1.60 KB.CILACAP	2.98 KT.SMRG
3.17 KB.PEMLNG	4.16 KB.BREBES	4.39 KB.BNYUMAS
4.70 KB.WNGIRI	4.82 KB.BLORA	5.47 KB.KENDAL
5.61 KB.JEPARA	5.66 KB.GROBOGA	6.07 KB.SMRG
6.38 KB.DEMAK	7.12 KB.PURBLGA	8.03 KB.PATI
8.83 KB.REMBANG	9.27 KB.MAGELNG	9.61 KB.KRNGANY
10.07 KB.KLATEN	10.23 KB.PURWRJO	11.25 KB.BOYOLAL
11.82 KB.KUDUS	12.24 KT.SRKARTA	12.48 KB.BATANG
12.62 KB.KEBUMEN	13.04 KB.BJRNGAR	14.25 KT.TEGAL
14.74 KB.PKLNGN	17.41 KB.WNSOBO	23.87 KB.TMANGGU
25.89 KB.SUKOHAJ	31.92 KB.SRAGEN	32.81 KT.MAGELNG
34.18 KT.PKLNGN	100.00 KT.SLTIGA	

Lampiran VI. Tabel Peer Sektor Kesehatan dengan Meminimumkan Input Tahun 1999

Table of peer units

Peers for Unit KB.TEGAL efficiency	1.23% radial
KB.TEGAL	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
4484.5 -PK	0.938
65.2 +AHP	55.2
	65.2
Peers for Unit KB.CILACAP efficiency	1.60% radial
KB.CILACAP	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
3552.8 -PK	0.967
67.2 +AHP	56.9
	67.2
Peers for Unit KT.SMRG efficiency	2.98% radial
KT.SMRG	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1993.0 -PK	1.010
70.2 +AHP	59.4
	70.2
Peers for Unit KB.PEMLNG efficiency	3.17% radial
KB.PEMLNG	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1723.9 -PK	0.928
64.5 +AHP	54.6
	64.5
Peers for Unit KB.BREBES efficiency	4.16% radial
KB.BREBES	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1286.5 -PK	0.911
63.3 +AHP	53.6
	63.3
Peers for Unit KB.BNYUMAS efficiency	4.39% radial
KB.BNYUMAS	KT.SLTIGA
ACTUAL	LAMBDA
1312.8 -PK	0.980
68.1 +AHP	57.6
	68.1

Peers for Unit	KB.WNGIRI	efficiency	4.70%	radial
	KB.WNGIRI	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	1.023	
	1280.9	-PK	60.2	
	71.1	+AHP	71.1	
Peers for Unit	KB.BLORA	efficiency	4.82%	radial
	KB.BLORA	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	1.006	
	1228.0	-PK	59.1	
	69.9	+AHP	69.9	
Peers for Unit	KB.KENDAL	efficiency	5.47%	radial
	KB.KENDAL	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	0.931	
	1000.0	-PK	54.7	
	64.7	+AHP	64.7	
Peers for Unit	KB.JEPARA	efficiency	5.61%	radial
	KB.JEPARA	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	1.001	
	1050.3	-PK	58.9	
	69.6	+AHP	69.6	
Peers for Unit	KB.GROBOGAN	efficiency	5.66%	radial
	KB.GROBOGA	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	0.976	
	1013.7	-PK	57.4	
	67.8	+AHP	67.8	
Peers for Unit	KB.SMRG	efficiency	6.07%	radial
	KB.SMRG	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	1.016	
	984.2	-PK	59.7	
	70.6	+AHP	70.6	
Peers for Unit	KB.DEMAK	efficiency	6.38%	radial
	KB.DEMAK	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	0.988	
	911.4	-PK	58.1	
	68.7	+AHP	68.7	
Peers for Unit	KB.PURBLGA	efficiency	7.12%	radial
	KB.PURBLGA	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	0.970	
	801.0	-PK	57.0	
	67.4	+AHP	67.4	
Peers for Unit	KB.PATI	efficiency	8.03%	radial
	KB.PATI	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	1.030	
	754.4	-PK	60.6	
	71.6	+AHP	71.6	
Peers for Unit	KB.REMBANG	efficiency	8.83%	radial
	KB.REMBANG	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	0.978	
	651.4	-PK	57.5	
	68.0	+AHP	68.0	
Peers for Unit	KB.MAGELNG	efficiency	9.27%	radial
	KB.MAGELNG	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	0.978	
	620.4	-PK	57.5	
	68.0	+AHP	68.0	

Peers for Unit KB.KRNGANYAR efficiency 9.61% radial
 KB.KRNGANYAR KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 1.009
 617.2 -PK 59.3
 70.1 +AHP 70.1

Peers for Unit KB.KLATEN efficiency 10.07% radial
 KB.KLATEN KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.994
 580.4 -PK 58.5
 69.1 +AHP 69.1

Peers for Unit KB.PURWRJO efficiency 10.23% radial
 KB.PURWRJO KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.974
 560.1 -PK 57.3
 67.7 +AHP 67.7

Peers for Unit KB.BOYOLALI efficiency 11.25% radial
 KB.BOYOLALI KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.999
 522.1 -PK 58.7
 69.4 +AHP 69.4

Peers for Unit KB.KUDUS efficiency 11.82% radial
 KB.KUDUS KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.976
 485.4 -PK 57.4
 67.8 +AHP 67.8

Peers for Unit KT.SRKARTA efficiency 12.24% radial
 KT.SRKARTA KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 1.020
 490.0 -PK 60.0
 70.9 +AHP 70.9

Peers for Unit KB.BATANG efficiency 12.48% radial
 KB.BATANG KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.980
 461.8 -PK 57.6
 68.1 +AHP 68.1

Peers for Unit KB.KEBUMEN efficiency 12.62% radial
 KB.KEBUMEN KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.967
 450.4 -PK 56.9
 67.2 +AHP 67.2

Peers for Unit KB.BJRNGARA efficiency 13.04% radial
 KB.BJRNGAR KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.970
 437.3 -PK 57.0
 67.4 +AHP 67.4

Peers for Unit KT.TEGAL efficiency 14.25% radial
 KT.TEGAL KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.958
 395.5 -PK 56.3
 66.6 +AHP 66.6

Peers for Unit KB.PKLNGN efficiency 14.74% radial
 KB.PKLNGN KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.957
 381.6 -PK 56.3
 66.5 +AHP 66.5

Peers for Unit KB.WNSOBO efficiency 17.41% radial
 KB.WNSOBO KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.974
 328.9 -PK 57.3
 67.7 +AHP 67.7

Peers for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 23.87% radial
 KB.TMANGGU KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 1.017
 250.6 -PK 59.8
 70.7 +AHP 70.7

Peers for Unit KB.SUKOHAJO efficiency 25.89% radial
 KB.SUKOHAJ KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.994
 225.8 -PK 58.5
 69.1 +AHP 69.1

Peers for Unit KB.SRAGEN efficiency 31.92% radial
 KB.SRAGEN KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 1.019
 187.7 -PK 59.9
 70.8 +AHP 70.8

Peers for Unit KT.MAGELNG efficiency 32.81% radial
 KT.MAGELNG KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.994
 178.2 -PK 58.5
 69.1 +AHP 69.1

Peers for Unit KT.PKLNGN efficiency 34.18% radial
 KT.PKLNGN KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 0.980
 168.5 -PK 57.6
 68.1 +AHP 68.1

Peers for Unit KT.SLTIGA efficiency 100.00% radial
 KT.SLTIGA KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 1.000
 58.8 -PK 58.8
 69.5 +AHP 69.5

Lampiran VII. Tabel Target Sektor Kesehatan dengan Meminimumkan Input Tahun 1999

Table of target values

Targets for Unit KB.TEGAL efficiency 1.23% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 4484.5 55.2 98.8% 1.2%
 +AHP 65.2 65.2 0.0% 100.0%

Targets for Unit KB.CILACAP efficiency 1.60% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 3552.8 56.9 98.4% 1.6%
 +AHP 67.2 67.2 0.0% 100.0%

Targets for Unit KT.SMRG efficiency 2.98% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 1993.0 59.4 97.0% 3.0%
 +AHP 70.2 70.2 0.0% 100.0%

Targets for Unit KB.PEMLNG efficiency 3.17% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 1723.9 54.6 96.8% 3.2%
 +AHP 64.5 64.5 0.0% 100.0%

Targets for Unit KB.BREBES efficiency 4.16% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1286.5	53.6	95.8%	4.2%
+AHP	63.3	63.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BNYUMAS efficiency 4.39% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1312.8	57.6	95.6%	4.4%
+AHP	68.1	68.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.WNGIRI efficiency 4.70% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1280.9	60.2	95.3%	4.7%
+AHP	71.1	71.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BLORA efficiency 4.82% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1228.0	59.1	95.2%	4.8%
+AHP	69.9	69.9	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.KENDAL efficiency 5.47% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1000.0	54.7	94.5%	5.5%
+AHP	64.7	64.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.JEPARA efficiency 5.61% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1050.3	58.9	94.4%	5.6%
+AHP	69.6	69.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.GROBOGAN efficiency 5.66% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1013.7	57.4	94.3%	5.7%
+AHP	67.8	67.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.SMRG efficiency 6.07% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	984.2	59.7	93.9%	6.1%
+AHP	70.6	70.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.DEMAK efficiency 6.38% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	911.4	58.1	93.6%	6.4%
+AHP	68.7	68.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PURBLGA efficiency 7.12% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	801.0	57.0	92.9%	7.1%
+AHP	67.4	67.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PATI efficiency 8.03% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	754.4	60.6	92.0%	8.0%
+AHP	71.6	71.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.REMBANG efficiency 8.83% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	651.4	57.5	91.2%	8.8%
+AHP	68.0	68.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.MAGELNG efficiency 9.27% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	620.4	57.5	90.7%	9.3%
+AHP	68.0	68.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.KRNGANYAR efficiency 9.61% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	617.2	59.3	90.4%	9.6%
+AHP	70.1	70.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.KLATEN efficiency 10.07% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	580.4	58.5	89.9%	10.1%
+AHP	69.1	69.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PURWRJO efficiency 10.23% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	560.1	57.3	89.8%	10.2%
+AHP	67.7	67.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BOYOLALI efficiency 11.25% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	522.1	58.7	88.8%	11.2%
+AHP	69.4	69.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.KUDUS efficiency 11.82% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	485.4	57.4	88.2%	11.8%
+AHP	67.8	67.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.SRKARTA efficiency 12.24% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	490.0	60.0	87.8%	12.2%
+AHP	70.9	70.9	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BATANG efficiency 12.48% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	461.8	57.6	87.5%	12.5%
+AHP	68.1	68.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.KEBUMEN efficiency 12.62% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	450.4	56.9	87.4%	12.6%
+AHP	67.2	67.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BJRNGARA efficiency 13.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	437.3	57.0	87.0%	13.0%
+AHP	67.4	67.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.TEGAL efficiency 14.25% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	395.5	56.3	85.8%	14.2%
+AHP	66.6	66.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PKLNGN efficiency 14.74% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	381.6	56.3	85.3%	14.7%
+AHP	66.5	66.5	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.WNSOBO efficiency 17.41% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	328.9	57.3	82.6%	17.4%
+AHP	67.7	67.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 23.87% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	250.6	59.8	76.1%	23.9%
+AHP	70.7	70.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.SUKOHAJO efficiency 25.89% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	225.8	58.5	74.1%	25.9%
+AHP	69.1	69.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.SRAGEN efficiency 31.92% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	187.7	59.9	68.1%	31.9%
+AHP	70.8	70.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.MAGELNG efficiency 32.81% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	178.2	58.5	67.2%	32.8%
+AHP	69.1	69.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.PKLNGN efficiency 34.18% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	168.5	57.6	65.8%	34.2%
+AHP	68.1	68.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.SLTIGA efficiency 100.00% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	58.8	58.8	0.0%	100.0%
+AHP	69.5	69.5	0.0%	100.0%



Lampiran VIII. Tabel Efisiensi Sektor Pendidikan Tahun 2002

Table of efficiencies (radial)

2.87	KB.KENDAL	4.41	KB.JEPARA	7.30	KB.BREBES
7.43	KB.BLORA	11.93	KB.GROBOGA	12.99	KB.TEGAL
14.72	KB.PKLNGN	14.84	KB.PATI	17.04	KB.PEMLNG
18.61	KB.BATANG	20.23	KB.PURBLGA	20.40	KT.TEGAL
21.86	KB.BNYUMAS	22.18	KT.PKLNGN	22.96	KB.REMBANG
24.16	KB.BNJRNGA	25.05	KB.KEBUMEN	25.92	KB.SMRG
27.96	KB.KUDUS	28.36	KB.CILACAP	28.53	KB.WNGIRI
28.80	KB.TMANGGU	33.28	KB.WNSB	33.50	KB.KLATEN
38.06	KT.SMRG	38.51	KB.SUKOHAR	44.41	KB.MAGELNG
46.13	KB.PURWRJO	49.34	KB.KRNGANY	53.84	KB.SRAGEN
54.33	KT.SRKARTA	88.82	KT.MAGELNG	99.93	KT.SLTIGA
100.00	KB.BOYOLAL				

Lampiran IX. Tabel Peer Sektor Pendidikan dengan Meminimumkan Input Tahun 2002

Table of peer units

Peers for Unit KB.KENDAL efficiency 2.87% radial

KB.KENDAL		KB.BOYOLAL
ACTUAL	LAMBDA	1.082
41067.6	-PP	1180.5
6.5	+RLS	7.1
88.6	+AMH	88.6

Peers for Unit KB.JEPARA efficiency 4.41% radial

KB.JEPARA		KB.BOYOLAL
ACTUAL	LAMBDA	1.062
26265.0	-PP	1159.2
6.5	+RLS	7.0
87.0	+AMH	87.0

Peers for Unit KB.BREBES efficiency 7.30% radial

KB.BREBES		KB.BOYOLAL
ACTUAL	LAMBDA	0.990
14800.0	-PP	1080.6
5.0	+RLS	6.5
81.1	+AMH	81.1

Peers for Unit KB.BLORA efficiency 7.43% radial

KB.BLORA		KB.BOYOLAL
ACTUAL	LAMBDA	0.984
14450.0	-PP	1073.9
5.7	+RLS	6.5
80.6	+AMH	80.6

Peers for Unit KB.GROBOGAN efficiency 11.93% radial

KB.GROBOGA		KB.BOYOLAL
ACTUAL	LAMBDA	1.056
9661.7	-PP	1152.5
6.3	+RLS	7.0
86.5	+AMH	86.5

Peers for Unit KB.TEGAL efficiency			12.99% radial
KB.TEGAL		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA		
8491.2	-PP	1.011	1103.2
5.6	+RLS		6.7
82.8	+AMH		82.8
Peers for Unit KB.PKLNGN efficiency			14.72% radial
KB.PKLNGN		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA		
7658.8	-PP	1.033	1127.2
5.6	+RLS		6.8
84.6	+AMH		84.6
Peers for Unit KB.PATI efficiency			14.84% radial
KB.PATI		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA		
7849.6	-PP	1.067	1164.5
6.5	+RLS		7.0
87.4	+AMH		87.4
Peers for Unit KB.PEMLNG efficiency			17.04% radial
KB.PEMLNG		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA		
6426.0	-PP	1.004	1095.2
5.4	+RLS		6.6
82.2	+AMH		82.2
Peers for Unit KB.BATANG efficiency			18.61% radial
KB.BATANG		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA		
6078.5	-PP	1.037	1131.2
5.9	+RLS		6.8
84.9	+AMH		84.9
Peers for Unit KB.PURBLGA efficiency			20.23% radial
KB.PURBLGA		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA		
5847.3	-PP	1.084	1183.2
5.6	+RLS		7.2
88.8	+AMH		88.8
Peers for Unit KT.TEGAL efficiency			20.40% radial
KT.TEGAL		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA		
6160.0	-PP	1.152	1256.6
7.6	+RLS		7.6
91.0	+AMH		94.3
Peers for Unit KB.BNYUMAS efficiency			21.86% radial
KB.BNYUMAS		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA		
5461.6	-PP	1.094	1193.8
6.3	+RLS		7.2
89.6	+AMH		89.6
Peers for Unit KT.PKLNGN efficiency			22.18% radial
KT.PKLNGN		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA		
5814.9	-PP	1.182	1289.7
7.8	+RLS		7.8
91.6	+AMH		96.8

Peers for Unit KB.REMBANG efficiency 22.96% radial
 KB.REMBANG KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA
 4973.7 -PP 1.046
 5.8 +RLS 1141.9
 85.7 +AMH 6.9
 85.7 85.7

Peers for Unit KB.BNJRNGARA efficiency 24.16% radial
 KB.BNJRNGA KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA
 4538.0 -PP 1.005
 5.3 +RLS 1096.6
 82.3 +AMH 6.6
 82.3 82.3

Peers for Unit KB.KEBUMEN efficiency 25.05% radial
 KB.KEBUMEN KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA
 4552.5 -PP 1.045
 6.2 +RLS 1140.5
 85.6 +AMH 6.9
 85.6 85.6

Peers for Unit KB.SMRG efficiency 25.92% radial
 KB.SMRG KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA
 4550.2 -PP 1.081
 6.8 +RLS 1179.2
 88.5 +AMH 7.1
 88.5 88.5

Peers for Unit KB.KUDUS efficiency 27.96% radial
 KB.KUDUS KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA
 4227.1 -PP 1.083
 7.1 +RLS 1181.9
 88.7 +AMH 7.1
 88.7 88.7

Peers for Unit KB.CILACAP efficiency 28.36% radial
 KB.CILACAP KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA
 4088.0 -PP 1.062
 6.1 +RLS 1159.2
 87.0 +AMH 7.0
 87.0 87.0

Peers for Unit KB.WNGIRI efficiency 28.53% radial
 KB.WNGIRI KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA
 3614.3 -PP 0.945
 5.9 +RLS 1031.3
 77.4 +AMH 6.2
 77.4 77.4

Peers for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 28.80% radial
 KB.TMANGGU KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA
 4237.2 -PP 1.118
 6.3 +RLS 1220.5
 91.6 +AMH 7.4
 91.6 91.6

Peers for Unit KB.WNSB efficiency 33.28% radial
 KB.WNSB KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA
 3407.0 -PP 1.039
 5.6 +RLS 1133.9
 85.1 +AMH 6.9
 85.1 85.1

Peers for Unit KB.KLATEN efficiency 33.50% radial
 KB.KLATEN KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.106
 3602.9 -PP 1207.0
 7.3 +RLS 7.3
 82.8 +AMH 90.6

Peers for Unit KT.SMRG efficiency 38.06% radial
 KT.SMRG KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.515
 4343.9 -PP 1653.4
 10.0 +RLS 10.0
 95.5 +AMH 124.1

Peers for Unit KB.SUKOHARJO efficiency 38.51% radial
 KB.SUKOHAR KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.197
 3392.1 -PP 1306.2
 7.9 +RLS 7.9
 82.2 +AMH 98.0

Peers for Unit KB.MAGELNG efficiency 44.41% radial
 KB.MAGELNG KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.087
 2670.0 -PP 1185.9
 7.0 +RLS 7.2
 89.0 +AMH 89.0

Peers for Unit KB.PURWRJO efficiency 46.13% radial
 KB.PURWRJO KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.081
 2556.0 -PP 1179.2
 7.1 +RLS 7.1
 88.5 +AMH 88.5

Peers for Unit KB.KRNGANYAR efficiency 49.34% radial
 KB.KRNGANY KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.061
 2345.7 -PP 1157.4
 7.0 +RLS 7.0
 78.9 +AMH 86.9

Peers for Unit KB.SRAGEN efficiency 53.84% radial
 KB.SRAGEN KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 0.919
 1863.7 -PP 1003.3
 6.0 +RLS 6.1
 75.3 +AMH 75.3

Peers for Unit KT.SRKARTA efficiency 54.33% radial
 KT.SRKARTA KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.485
 2982.4 -PP 1620.3
 9.8 +RLS 9.8
 94.6 +AMH 121.6

Peers for Unit KT.MAGELNG efficiency 88.82% radial
 KT.MAGELNG KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.485
 1824.2 -PP 1620.3
 9.8 +RLS 9.8
 95.6 +AMH 121.6

Peers for Unit KT.SLTIGA efficiency		99.93% radial
KT.SLTIGA	KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	1.439
1571.8	-PP	1570.7
9.5	+RLS	9.5
93.3	+AMH	117.9

Peers for Unit KB.BOYOLALI efficiency		100.00% radial
KB.BOYOLAL	KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	1.000
1091.2	-PP	1091.2
6.6	+RLS	6.6
81.9	+AMH	81.9

Lampiran X. Tabel Target Sektor Pendidikan dengan Meminimumkan Input Tahun 2002

Table of target values

Targets for Unit KB.KENDAL efficiency		2.87% radial		
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	41067.6	1180.5	97.1%	2.9%
+RLS	6.5	7.1	9.8%	91.0%
+AMH	88.6	88.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.JEPARA efficiency		4.41% radial		
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	26265.0	1159.2	95.6%	4.4%
+RLS	6.5	7.0	7.9%	92.7%
+AMH	87.0	87.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BREBES efficiency		7.30% radial		
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	14800.0	1080.6	92.7%	7.3%
+RLS	5.0	6.5	30.7%	76.5%
+AMH	81.1	81.1	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BLORA efficiency		7.43% radial		
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	14450.0	1073.9	92.6%	7.4%
+RLS	5.7	6.5	14.0%	87.8%
+AMH	80.6	80.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.GROBOGAN efficiency		11.93% radial		
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	9661.7	1152.5	88.1%	11.9%
+RLS	6.3	7.0	10.6%	90.4%
+AMH	86.5	86.5	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.TEGAL efficiency		12.99% radial		
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	8491.2	1103.2	87.0%	13.0%
+RLS	5.6	6.7	19.2%	83.9%
+AMH	82.8	82.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PKLNGN efficiency		14.72% radial		
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	7658.8	1127.2	85.3%	14.7%
+RLS	5.6	6.8	21.7%	82.1%
+AMH	84.6	84.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PATI efficiency 14.84% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	7849.6	1164.5	85.2%	14.8%
+RLS	6.5	7.0	8.4%	92.3%
+AMH	87.4	87.4	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PEMLNG efficiency 17.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	6426.0	1095.2	83.0%	17.0%
+RLS	5.4	6.6	22.7%	81.5%
+AMH	82.2	82.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BATANG efficiency 18.61% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	6078.5	1131.2	81.4%	18.6%
+RLS	5.9	6.8	16.0%	86.2%
+AMH	84.9	84.9	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PURBLGA efficiency 20.23% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	5847.3	1183.2	79.8%	20.2%
+RLS	5.6	7.2	27.8%	78.3%
+AMH	88.8	88.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.TEGAL efficiency 20.40% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	6160.0	1256.6	79.6%	20.4%
+RLS	7.6	7.6	0.0%	100.0%
+AMH	91.0	94.3	3.6%	96.5%

Targets for Unit KB.BNYUMAS efficiency 21.86% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	5461.6	1193.8	78.1%	21.9%
+RLS	6.3	7.2	14.6%	87.3%
+AMH	89.6	89.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.PKLNGN efficiency 22.18% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	5814.9	1289.7	77.8%	22.2%
+RLS	7.8	7.8	0.0%	100.0%
+AMH	91.6	96.8	5.7%	94.6%

Targets for Unit KB.REMBANG efficiency 22.96% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4973.7	1141.9	77.0%	23.0%
+RLS	5.8	6.9	19.1%	84.0%
+AMH	85.7	85.7	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BNJRNGARA efficiency 24.16% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4538.0	1096.6	75.8%	24.2%
+RLS	5.3	6.6	25.1%	79.9%
+AMH	82.3	82.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.KEBUMEN efficiency 25.05% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4552.5	1140.5	74.9%	25.1%
+RLS	6.2	6.9	11.3%	89.9%
+AMH	85.6	85.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.SMRG efficiency 25.92% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4550.2	1179.2	74.1%	25.9%
+RLS	6.8	7.1	4.9%	95.3%
+AMH	88.5	88.5	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.KUDUS efficiency 27.96% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4227.1	1181.9	72.0%	28.0%
+RLS	7.1	7.1	0.7%	99.3%
+AMH	88.7	88.7	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.CILACAP efficiency 28.36% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4088.0	1159.2	71.6%	28.4%
+RLS	6.1	7.0	14.9%	87.0%
+AMH	87.0	87.0	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.WNGIRI efficiency 28.53% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3614.3	1031.3	71.5%	28.5%
+RLS	5.9	6.2	5.7%	94.6%
+AMH	77.4	77.4	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 28.80% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4237.2	1220.5	71.2%	28.8%
+RLS	6.3	7.4	17.2%	85.3%
+AMH	91.6	91.6	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.WNSB efficiency 33.28% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3407.0	1133.9	66.7%	33.3%
+RLS	5.6	6.9	22.5%	81.7%
+AMH	85.1	85.1	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.KLATEN efficiency 33.50% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3602.9	1207.0	66.5%	33.5%
+RLS	7.3	7.3	0.0%	100.0%
+AMH	82.8	90.6	9.4%	91.4%
Targets for Unit KT.SMRG efficiency 38.06% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4343.9	1653.4	61.9%	38.1%
+RLS	10.0	10.0	0.0%	100.0%
+AMH	95.5	124.1	29.9%	77.0%
Targets for Unit KB.SUKOHARJO efficiency 38.51% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3392.1	1306.2	61.5%	38.5%
+RLS	7.9	7.9	0.0%	100.0%
+AMH	82.2	98.0	19.3%	83.9%
Targets for Unit KB.MAGELNG efficiency 44.41% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2670.0	1185.9	55.6%	44.4%
+RLS	7.0	7.2	2.5%	97.6%
+AMH	89.0	89.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PURWRJO efficiency 46.13% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2556.0	1179.2	53.9%	46.1%
+RLS	7.1	7.1	0.4%	99.6%
+AMH	88.5	88.5	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.KRNGANYAR efficiency 49.34% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2345.7	1157.4	50.7%	49.3%
+RLS	7.0	7.0	0.0%	100.0%
+AMH	78.9	86.9	10.1%	90.8%
Targets for Unit KB.SRAGEN efficiency 53.84% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1863.7	1003.3	46.2%	53.8%
+RLS	6.0	6.1	1.1%	98.9%
+AMH	75.3	75.3	0.0%	100.0%
Targets for Unit KT.SRKARTA efficiency 54.33% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2982.4	1620.3	45.7%	54.3%
+RLS	9.8	9.8	0.0%	100.0%
+AMH	94.6	121.6	28.6%	77.8%
Targets for Unit KT.MAGELNG efficiency 88.82% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1824.2	1620.3	11.2%	88.8%
+RLS	9.8	9.8	0.0%	100.0%
+AMH	95.6	121.6	27.2%	78.6%
Targets for Unit KT.SLTIGA efficiency 99.93% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1571.8	1570.7	0.1%	99.9%
+RLS	9.5	9.5	0.0%	100.0%
+AMH	93.3	117.9	26.4%	79.1%
Targets for Unit KB.BOYOLALI efficiency 100.00% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1091.2	1091.2	0.0%	100.0%
+RLS	6.6	6.6	0.0%	100.0%
+AMH	81.9	81.9	0.0%	100.0%



 PT. PERSADA KAWANAN

Lampiran XI. Tabel Efisiensi Sektor Kesehatan Tahun 2002

Table of efficiencies (radial)

3.07 KB.JEPARA	5.17 KB.PATI	5.41 KB.TEGAL
5.44 KT.TEGAL	7.22 KT.SLTIGA	7.39 KB.PURBLGA
7.45 KB.WNSB	8.16 KB.SMRG	8.95 KB.GROBOGA
9.69 KT.SMRG	9.79 KB.REMBANG	10.22 KB.CILACAP
10.56 KB.TMANGGU	11.60 KB.BLORA	16.54 KB.BREBES
18.68 KB.KENDAL	19.51 KB.BATANG	20.22 KB.KUDUS
20.24 KB.SUKOHAR	21.12 KB.BNJRNGA	23.47 KB.KEBUMEN
24.12 KB.KLATEN	24.60 KB.PEMLNG	24.83 KT.MAGELNG
28.82 KB.BOYOLAL	28.88 KB.WNGIRI	33.20 KT.PKLNGN
35.97 KB.SRAGEN	36.67 KB.MAGELNG	40.82 KB.PURWRJO
42.03 KB.BNYUMAS	46.57 KB.PKLNGN	68.84 KB.KRNGANY
100.00 KT.SRKARTA		

Lampiran XII. Tabel Peer Sektor Kesehatan dengan Meminimumkan Input Tahun 2002

Table of peer units

Peers for Unit KB.JEPARA efficiency 3.07% radial

KB.JEPARA	KT.SRKARTA
ACTUAL	LAMBDA
18445.9 -PK	0.985
70.0 +AHP	566.6
	70.0

Peers for Unit KB.PATI efficiency 5.17% radial

KB.PATI	KT.SRKARTA
ACTUAL	LAMBDA
11354.4 -PK	1.020
72.5 +AHP	586.8
	72.5

Peers for Unit KB.TEGAL efficiency 5.41% radial

KB.TEGAL	KT.SRKARTA
ACTUAL	LAMBDA
9913.5 -PK	0.931
66.2 +AHP	535.8
	66.2

Peers for Unit KT.TEGAL efficiency 5.44% radial

KT.TEGAL	KT.SRKARTA
ACTUAL	LAMBDA
9955.1 -PK	0.941
66.9 +AHP	541.5
	66.9

Peers for Unit KT.SLTIGA efficiency 7.22% radial

KT.SLTIGA	KT.SRKARTA
ACTUAL	LAMBDA
7871.9 -PK	0.987
70.2 +AHP	568.2
	70.2

Peers for Unit KB.PURBLGA efficiency		7.39% radial
KB.PURBLGA	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.951
7399.3 -PK		547.2
67.6 +AHP		67.6
Peers for Unit KB.WNSB efficiency		7.45% radial
KB.WNSB	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.963
7445.0 -PK		554.5
68.5 +AHP		68.5
Peers for Unit KB.SMRG efficiency		8.16% radial
KB.SMRG	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	1.003
7075.0 -PK		577.1
71.3 +AHP		71.3
Peers for Unit KB.GROBOGAN efficiency		8.95% radial
KB.GROBOGAN	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.958
6157.5 -PK		551.2
68.1 +AHP		68.1
Peers for Unit KT.SMRG efficiency		9.69% radial
KT.SMRG	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.990
5879.0 -PK		569.8
70.4 +AHP		70.4
Peers for Unit KB.REMBANG efficiency		9.79% radial
KB.REMBANG	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.965
5669.0 -PK		555.3
68.6 +AHP		68.6
Peers for Unit KB.CILACAP efficiency		10.22% radial
KB.CILACAP	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.954
5369.6 -PK		548.8
67.8 +AHP		67.8
Peers for Unit KB.TMANGGUNG efficiency		10.56% radial
KB.TMANGGU	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	1.004
5470.6 -PK		577.9
71.4 +AHP		71.4
Peers for Unit KB.BLORA efficiency		11.60% radial
KB.BLORA	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.989
4905.5 -PK		569.0
70.3 +AHP		70.3
Peers for Unit KB.BREBES efficiency		16.54% radial
KB.BREBES	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.904
3146.5 -PK		520.5
64.3 +AHP		64.3

Peers for Unit KB.KENDAL efficiency		18.68% radial
KB.KENDAL	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.914
2816.3 -PK		526.1
65.0 +AHP		65.0
Peers for Unit KB.BATANG efficiency		19.51% radial
KB.BATANG	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.966
2850.5 -PK		556.1
68.7 +AHP		68.7
Peers for Unit KB.KUDUS efficiency		20.22% radial
KB.KUDUS	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.959
2730.3 -PK		552.0
68.2 +AHP		68.2
Peers for Unit KB.SUKOHARJO efficiency		20.24% radial
KB.SUKOHAR	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.975
2771.3 -PK		560.9
69.3 +AHP		69.3
Peers for Unit KB.BNJRNGARA efficiency		21.12% radial
KB.BNJRNGA	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.952
2595.0 -PK		548.0
67.7 +AHP		67.7
Peers for Unit KB.KEBUMEN efficiency		23.47% radial
KB.KEBUMEN	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.951
2331.1 -PK		547.2
67.6 +AHP		67.6
Peers for Unit KB.KLATEN efficiency		24.12% radial
KB.KLATEN	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.982
2342.7 -PK		565.0
69.8 +AHP		69.8
Peers for Unit KB.PEMLNG efficiency		24.60% radial
KB.PEMLNG	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.917
2145.0 -PK		527.7
65.2 +AHP		65.2
Peers for Unit KT.MAGELNG efficiency		24.83% radial
KT.MAGELNG	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.975
2258.6 -PK		560.9
69.3 +AHP		69.3
Peers for Unit KB.BOYOLALI efficiency		28.82% radial
KB.BOYOLALI	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.979
1954.8 -PK		563.4
69.6 +AHP		69.6

Peers for Unit KB.WNGIRI efficiency		28.88% radial
KB.WNGIRI	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	1.007
2006.6 -PK		579.5
71.6 +AHP		71.6
Peers for Unit KT.PKLNGN efficiency		33.20% radial
KT.PKLNGN	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.965
1672.5 -PK		555.3
68.6 +AHP		68.6
Peers for Unit KB.SRAGEN efficiency		35.97% radial
KB.SRAGEN	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	1.006
1609.0 -PK		578.7
71.5 +AHP		71.5
Peers for Unit KB.MAGELNG efficiency		36.67% radial
KB.MAGELNG	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.968
1518.8 -PK		556.9
68.8 +AHP		68.8
Peers for Unit KB.PURWRJO efficiency		40.82% radial
KB.PURWRJO	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.956
1348.3 -PK		550.4
68.0 +AHP		68.0
Peers for Unit KB.BNYUMAS efficiency		42.03% radial
KB.BNYUMAS	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.965
1321.2 -PK		555.3
68.6 +AHP		68.6
Peers for Unit KB.PKLNGN efficiency		46.57% radial
KB.PKLNGN	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	0.937
1157.5 -PK		539.1
66.6 +AHP		66.6
Peers for Unit KB.KRNGANYAR efficiency		68.84% radial
KB.KRNGANY	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	1.010
844.3 -PK		581.2
71.8 +AHP		71.8
Peers for Unit KT.SRKARTA efficiency		100.00% radial
KT.SRKARTA	KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	1.000
575.5 -PK		575.5
71.1 +AHP		71.1

**Lampiran XIII. Tabel Target Sektor Kesehatan dengan
Meminimumkan Input Tahun 2002**

Table of target values				
Targets for Unit KB.JEPARA efficiency 3.07% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	18445.9	566.6	96.9%	3.1%
+AHP	70.0	70.0	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.PATI efficiency 5.17% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	11354.4	586.8	94.8%	5.2%
+AHP	72.5	72.5	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.TEGAL efficiency 5.41% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	9913.5	535.8	94.6%	5.4%
+AHP	66.2	66.2	0.0%	100.0%
Targets for Unit KT.TEGAL efficiency 5.44% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	9955.1	541.5	94.6%	5.4%
+AHP	66.9	66.9	0.0%	100.0%
Targets for Unit KT.SLTIGA efficiency 7.22% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	7871.9	568.2	92.8%	7.2%
+AHP	70.2	70.2	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.PURBLGA efficiency 7.39% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	7399.3	547.2	92.6%	7.4%
+AHP	67.6	67.6	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.WNSB efficiency 7.45% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	7445.0	554.5	92.6%	7.4%
+AHP	68.5	68.5	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.SMRG efficiency 8.16% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	7075.0	577.1	91.8%	8.2%
+AHP	71.3	71.3	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.GROBOGAN efficiency 8.95% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	6157.5	551.2	91.0%	9.0%
+AHP	68.1	68.1	0.0%	100.0%
Targets for Unit KT.SMRG efficiency 9.69% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	5879.0	569.8	90.3%	9.7%
+AHP	70.4	70.4	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.REMBANG efficiency 9.79% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	5669.0	555.3	90.2%	9.8%
+AHP	68.6	68.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.CILACAP efficiency 10.22% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	5369.6	548.8	89.8%	10.2%
+AHP	67.8	67.8	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 10.56% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	5470.6	577.9	89.4%	10.6%
+AHP	71.4	71.4	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.BLORA efficiency 11.60% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	4905.5	569.0	88.4%	11.6%
+AHP	70.3	70.3	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.BREBES efficiency 16.54% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	3146.5	520.5	83.5%	16.5%
+AHP	64.3	64.3	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.KENDAL efficiency 18.68% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2816.3	526.1	81.3%	18.7%
+AHP	65.0	65.0	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.BATANG efficiency 19.51% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2850.5	556.1	80.5%	19.5%
+AHP	68.7	68.7	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.KUDUS efficiency 20.22% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2730.3	552.0	79.8%	20.2%
+AHP	68.2	68.2	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.SUKOHARJO efficiency 20.24% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2771.3	560.9	79.8%	20.2%
+AHP	69.3	69.3	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.BNJRNGARA efficiency 21.12% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2595.0	548.0	78.9%	21.1%
+AHP	67.7	67.7	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.KEBUMEN efficiency 23.47% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2331.1	547.2	76.5%	23.5%
+AHP	67.6	67.6	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.KLATEN efficiency 24.12% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2342.7	565.0	75.9%	24.1%
+AHP	69.8	69.8	0.0%	100.0%
Targets for Unit KB.PEMLNG efficiency 24.60% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2145.0	527.7	75.4%	24.6%
+AHP	65.2	65.2	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.MAGELNG efficiency 24.83% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2258.6	560.9	75.2%	24.8%
+AHP	69.3	69.3	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BOYOLALI efficiency 28.82% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1954.8	563.4	71.2%	28.8%
+AHP	69.6	69.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.WNGIRI efficiency 28.88% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2006.6	579.5	71.1%	28.9%
+AHP	71.6	71.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.PKLNGN efficiency 33.20% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1672.5	555.3	66.8%	33.2%
+AHP	68.6	68.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.SRAGEN efficiency 35.97% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1609.0	578.7	64.0%	36.0%
+AHP	71.5	71.5	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.MAGELNG efficiency 36.67% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1518.8	556.9	63.3%	36.7%
+AHP	68.8	68.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PURWRJO efficiency 40.82% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1348.3	550.4	59.2%	40.8%
+AHP	68.0	68.0	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.BNYUMAS efficiency 42.03% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1321.2	555.3	58.0%	42.0%
+AHP	68.6	68.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.PKLNGN efficiency 46.57% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1157.5	539.1	53.4%	46.6%
+AHP	66.6	66.6	0.0%	100.0%

Targets for Unit KB.KRNGANYAR efficiency 68.84% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	844.3	581.2	31.2%	68.8%
+AHP	71.8	71.8	0.0%	100.0%

Targets for Unit KT.SRKARTA efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	575.5	575.5	0.0%	100.0%
+AHP	71.1	71.1	0.0%	100.0%

Lampiran XIV. Tabel Peer Sektor Pendidikan dengan Memaksimumkan Output Tahun 1999

Table of peer units			
Peers for Unit KB.TEGAL		efficiency	2.37% radial
KB.TEGAL		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	36.848	
6658.8	-PP	6658.8	
5.6	+RLS	342.7	
83.5	+AMH	3526.4	
Peers for Unit KB.CILACAP		efficiency	3.04% radial
KB.CILACAP		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	28.937	
5229.3	-PP	5229.3	
5.4	+RLS	269.1	
84.2	+AMH	2769.3	
Peers for Unit KB.WNGIRI		efficiency	3.58% radial
KB.WNGIRI		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	22.272	
4024.8	-PP	4024.8	
5.6	+RLS	207.1	
76.4	+AMH	2131.5	
Peers for Unit KB.KEBUMEN		efficiency	3.75% radial
KB.KEBUMEN		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	24.293	
4390.1	-PP	4390.1	
5.9	+RLS	225.9	
87.2	+AMH	2324.9	
Peers for Unit KB.BJRNGARA		efficiency	3.93% radial
KB.BJRNGAR		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	22.814	
4122.7	-PP	4122.7	
5.6	+RLS	212.2	
85.9	+AMH	2183.3	
Peers for Unit KB.PURBLGA		efficiency	4.16% radial
KB.PURBLGA		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	21.651	
3912.5	-PP	3912.5	
5.3	+RLS	201.4	
86.2	+AMH	2072.0	
Peers for Unit KB.PEMLNG		efficiency	4.39% radial
KB.PEMLNG		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	19.571	
3536.7	-PP	3536.7	
5.2	+RLS	182.0	
82.3	+AMH	1872.9	
Peers for Unit KB.BNYUMAS		efficiency	4.56% radial
KB.BNYUMAS		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	20.898	
3776.5	-PP	3776.5	
6.4	+RLS	194.4	
91.2	+AMH	1999.9	
Peers for Unit KB.BLORA		efficiency	4.78% radial
KB.BLORA		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	16.207	
2928.8	-PP	2928.8	
4.8	+RLS	150.7	
74.1	+AMH	1551.0	

Peers for Unit KB.GROBOGAN efficiency			4.90% radial
KB.GROBOGA		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	18.252	
3298.4	-PP	3298.4	
5.6	+RLS	169.7	
85.6	+AMH	1746.8	
Peers for Unit KT.SMRG efficiency			4.94% radial
KT.SMRG		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	19.788	
3575.9	-PP	3575.9	
8.7	+RLS	184.0	
93.6	+AMH	1893.7	
Peers for Unit KB.KLATEN efficiency			5.23% radial
KB.KLATEN		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	16.209	
2929.1	-PP	2929.1	
6.7	+RLS	150.7	
81.1	+AMH	1551.2	
Peers for Unit KB.JEPARA efficiency			6.04% radial
KB.JEPARA		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	14.374	
2597.6	-PP	2597.6	
6.0	+RLS	133.7	
83.1	+AMH	1375.6	
Peers for Unit KB.KRNGANYAR efficiency			6.19% radial
KB.KRNGANY		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	13.212	
2387.5	-PP	2387.5	
6.1	+RLS	122.9	
78.3	+AMH	1264.4	
Peers for Unit KB.PATI efficiency			6.25% radial
KB.PATI		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	13.377	
2417.3	-PP	2417.3	
5.6	+RLS	124.4	
80.0	+AMH	1280.2	
Peers for Unit KB.BREBES efficiency			6.33% radial
KB.BREBES		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	13.692	
2474.3	-PP	2474.3	
4.8	+RLS	127.3	
83.0	+AMH	1310.4	
Peers for Unit KB.MAGELNG efficiency			6.34% radial
KB.MAGELNG		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	14.203	
2566.7	-PP	2566.7	
6.3	+RLS	132.1	
86.2	+AMH	1359.3	
Peers for Unit KB.PURWRJO efficiency			6.41% radial
KB.PURWRJO		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	14.062	
2541.2	-PP	2541.2	
6.3	+RLS	130.8	
86.3	+AMH	1345.8	
Peers for Unit KB.BATANG efficiency			6.65% radial
KB.BATANG		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	13.476	
2435.2	-PP	2435.2	
5.1	+RLS	125.3	
85.8	+AMH	1289.6	

Peers for Unit KB.KUDUS efficiency			7.17% radial
KB.KUDUS		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	12.938	
2338.0	-PP	2338.0	
6.9	+RLS	120.3	
88.8	+AMH	1238.1	
Peers for Unit KB.SRAGEN efficiency			7.36% radial
KB.SRAGEN		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	10.168	
1837.5	-PP	1837.5	
5.3	+RLS	94.6	
71.6	+AMH	973.1	
Peers for Unit KB.SMRG efficiency			7.48% radial
KB.SMRG		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	12.484	
2256.0	-PP	2256.0	
6.6	+RLS	116.1	
89.4	+AMH	1194.7	
Peers for Unit KB.BOYOLALI efficiency			7.71% radial
KB.BOYOLAL		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	11.026	
1992.5	-PP	1992.5	
6.2	+RLS	102.5	
81.4	+AMH	1055.2	
Peers for Unit KB.DEMAK efficiency			7.77% radial
KB.DEMAK		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	11.998	
2168.2	-PP	2168.2	
6.1	+RLS	111.6	
89.2	+AMH	1148.2	
Peers for Unit KB.KENDAL efficiency			7.94% radial
KB.KENDAL		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	11.097	
2005.4	-PP	2005.4	
5.4	+RLS	103.2	
84.3	+AMH	1062.0	
Peers for Unit KB.PKLNGN efficiency			8.04% radial
KB.PKLNGN		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	10.950	
1978.7	-PP	1978.7	
5.3	+RLS	101.8	
84.2	+AMH	1047.9	
Peers for Unit KB.WNSOBO efficiency			8.26% radial
KB.WNSOBO		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	10.941	
1977.2	-PP	1977.2	
5.4	+RLS	101.8	
86.5	+AMH	1047.1	
Peers for Unit KT.SRKARTA efficiency			8.96% radial
KT.SRKARTA		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	10.830	
1957.2	-PP	1957.2	
8.9	+RLS	100.7	
92.9	+AMH	1036.5	
Peers for Unit KB.SUKOHAJO efficiency			9.04% radial
KB.SUKOHAJ		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	9.706	
1753.9	-PP	1753.9	
7.4	+RLS	90.3	
84.0	+AMH	928.8	

Peers for Unit KT.TEGAL efficiency 9.29% radial
 KT.TEGAL KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 9.729
 1758.1 -PP 1758.1
 6.6 +RLS 90.5
 86.5 +AMH 931.0

Peers for Unit KB.REMBANG efficiency 9.40% radial
 KB.REMBANG KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 9.425
 1703.1 -PP 1703.1
 5.9 +RLS 87.6
 84.8 +AMH 901.9

Peers for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 13.45% radial
 KB.TMANGGU KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 7.067
 1277.1 -PP 1277.1
 5.6 +RLS 65.7
 91.0 +AMH 676.3

Peers for Unit KT.MAGELNG efficiency 13.53% radial
 KT.MAGELNG KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 7.214
 1303.7 -PP 1303.7
 9.0 +RLS 67.1
 93.4 +AMH 690.4

Peers for Unit KT.PKLNGN efficiency 19.65% radial
 KT.PKLNGN KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 4.776
 863.1 -PP 863.1
 7.1 +RLS 44.4
 89.8 +AMH 457.1

Peers for Unit KT.SLTIGA efficiency 100.00% radial
 KT.SLTIGA KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 1.000
 180.7 -PP 180.7
 9.3 +RLS 9.3
 95.7 +AMH 95.7

Lampiran XV. Tabel Target Sektor Pendidikan dengan Memaksimumkan Output Tahun 1999

Table of target values

Targets for Unit KB.TEGAL efficiency 2.37% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	6658.8	6658.8	0.0%	100.0%
+RLS	5.6	342.7	6019.4%	1.6%
+AMH	83.5	3526.4	4123.2%	2.4%

Targets for Unit KB.CILACAP efficiency 3.04% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	5229.3	5229.3	0.0%	100.0%
+RLS	5.4	269.1	4883.7%	2.0%
+AMH	84.2	2769.3	3189.0%	3.0%

Targets for Unit KB.WNGIRI efficiency 3.58% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4024.8	4024.8	0.0%	100.0%
+RLS	5.6	207.1	3598.8%	2.7%
+AMH	76.4	2131.5	2689.9%	3.6%

Targets for Unit KB.KEBUMEN efficiency 3.75% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4390.1	4390.1	0.0%	100.0%
+RLS	5.9	225.9	3729.3%	2.6%
+AMH	87.2	2324.9	2566.2%	3.8%
Targets for Unit KB.BJRNGARA efficiency 3.93% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4122.7	4122.7	0.0%	100.0%
+RLS	5.6	212.2	3688.7%	2.6%
+AMH	85.9	2183.3	2441.6%	3.9%
Targets for Unit KB.PURBLGA efficiency 4.16% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3912.5	3912.5	0.0%	100.0%
+RLS	5.3	201.4	3699.1%	2.6%
+AMH	86.2	2072.0	2303.7%	4.2%
Targets for Unit KB.PEMLNG efficiency 4.39% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3536.7	3536.7	0.0%	100.0%
+RLS	5.2	182.0	3400.2%	2.9%
+AMH	82.3	1872.9	2175.7%	4.4%
Targets for Unit KB.BNYUMAS efficiency 4.56% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3776.5	3776.5	0.0%	100.0%
+RLS	6.4	194.4	2936.7%	3.3%
+AMH	91.2	1999.9	2092.9%	4.6%
Targets for Unit KB.BLORA efficiency 4.78% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2928.8	2928.8	0.0%	100.0%
+RLS	4.8	150.7	3040.1%	3.2%
+AMH	74.1	1551.0	1993.1%	4.8%
Targets for Unit KB.GROBOGAN efficiency 4.90% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3298.4	3298.4	0.0%	100.0%
+RLS	5.6	169.7	2931.2%	3.3%
+AMH	85.6	1746.8	1940.6%	4.9%
Targets for Unit KT.SMRG efficiency 4.94% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3575.9	3575.9	0.0%	100.0%
+RLS	8.7	184.0	2015.2%	4.7%
+AMH	93.6	1893.7	1923.2%	4.9%
Targets for Unit KB.KLATEN efficiency 5.23% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2929.1	2929.1	0.0%	100.0%
+RLS	6.7	150.7	2149.9%	4.4%
+AMH	81.1	1551.2	1812.7%	5.2%
Targets for Unit KB.JEPARA efficiency 6.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2597.6	2597.6	0.0%	100.0%
+RLS	6.0	133.7	2128.0%	4.5%
+AMH	83.1	1375.6	1555.4%	6.0%
Targets for Unit KB.KRNGANYAR efficiency 6.19% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2387.5	2387.5	0.0%	100.0%
+RLS	6.1	122.9	1914.2%	5.0%
+AMH	78.3	1264.4	1514.8%	6.2%

Targets for Unit KB.PATI efficiency 6.25% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2417.3	2417.3	0.0%	100.0%
+RLS	5.6	124.4	2121.5%	4.5%
+AMH	80.0	1280.2	1500.2%	6.2%
Targets for Unit KB.BREBES efficiency 6.33% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2474.3	2474.3	0.0%	100.0%
+RLS	4.8	127.3	2552.9%	3.8%
+AMH	83.0	1310.4	1478.7%	6.3%
Targets for Unit KB.MAGELNG efficiency 6.34% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2566.7	2566.7	0.0%	100.0%
+RLS	6.3	132.1	1996.7%	4.8%
+AMH	86.2	1359.3	1476.9%	6.3%
Targets for Unit KB.PURWRJO efficiency 6.41% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2541.2	2541.2	0.0%	100.0%
+RLS	6.3	130.8	1975.9%	4.8%
+AMH	86.3	1345.8	1459.4%	6.4%
Targets for Unit KB.BATANG efficiency 6.65% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2435.2	2435.2	0.0%	100.0%
+RLS	5.1	125.3	2357.4%	4.1%
+AMH	85.8	1289.6	1403.1%	6.7%
Targets for Unit KB.KUDUS efficiency 7.17% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2338.0	2338.0	0.0%	100.0%
+RLS	6.9	120.3	1643.8%	5.7%
+AMH	88.8	1238.1	1294.3%	7.2%
Targets for Unit KB.SRAGEN efficiency 7.36% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1837.5	1837.5	0.0%	100.0%
+RLS	5.3	94.6	1684.2%	5.6%
+AMH	71.6	973.1	1259.1%	7.4%
Targets for Unit KB.SMRG efficiency 7.48% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2256.0	2256.0	0.0%	100.0%
+RLS	6.6	116.1	1659.1%	5.7%
+AMH	89.4	1194.7	1236.4%	7.5%
Targets for Unit KB.BOYOLALI efficiency 7.71% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1992.5	1992.5	0.0%	100.0%
+RLS	6.2	102.5	1553.9%	6.0%
+AMH	81.4	1055.2	1196.3%	7.7%
Targets for Unit KB.DEMAK efficiency 7.77% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2168.2	2168.2	0.0%	100.0%
+RLS	6.1	111.6	1729.2%	5.5%
+AMH	89.2	1148.2	1187.3%	7.8%
Targets for Unit KB.KENDAL efficiency 7.94% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2005.4	2005.4	0.0%	100.0%
+RLS	5.4	103.2	1811.2%	5.2%
+AMH	84.3	1062.0	1159.8%	7.9%

Targets for Unit KB.PKLNGN efficiency 8.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1978.7	1978.7	0.0%	100.0%
+RLS	5.3	101.8	1821.4%	5.2%
+AMH	84.2	1047.9	1144.5%	8.0%

Targets for Unit KB.WNSOBO efficiency 8.26% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1977.2	1977.2	0.0%	100.0%
+RLS	5.4	101.8	1784.3%	5.3%
+AMH	86.5	1047.1	1110.5%	8.3%

Targets for Unit KT.SRKARTA efficiency 8.96% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1957.2	1957.2	0.0%	100.0%
+RLS	8.9	100.7	1031.7%	8.8%
+AMH	92.9	1036.5	1015.7%	9.0%

Targets for Unit KB.SUKOHAJO efficiency 9.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1753.9	1753.9	0.0%	100.0%
+RLS	7.4	90.3	1119.8%	8.2%
+AMH	84.0	928.8	1005.8%	9.0%

Targets for Unit KT.TEGAL efficiency 9.29% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1758.1	1758.1	0.0%	100.0%
+RLS	6.6	90.5	1270.9%	7.3%
+AMH	86.5	931.0	976.3%	9.3%

Targets for Unit KB.REMBANG efficiency 9.40% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1703.1	1703.1	0.0%	100.0%
+RLS	5.9	87.6	1385.6%	6.7%
+AMH	84.8	901.9	963.6%	9.4%

Targets for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 13.45% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1277.1	1277.1	0.0%	100.0%
+RLS	5.6	65.7	1073.7%	8.5%
+AMH	91.0	676.3	643.2%	13.5%

Targets for Unit KT.MAGELNG efficiency 13.53% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1303.7	1303.7	0.0%	100.0%
+RLS	9.0	67.1	645.5%	13.4%
+AMH	93.4	690.4	639.2%	13.5%

Targets for Unit KT.PKLNGN efficiency 19.65% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	863.1	863.1	0.0%	100.0%
+RLS	7.1	44.4	525.6%	16.0%
+AMH	89.8	457.1	409.0%	19.6%

Targets for Unit KT.SLTIGA efficiency 100.00% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	180.7	180.7	0.0%	100.0%
+RLS	9.3	9.3	0.0%	100.0%
+AMH	95.7	95.7	0.0%	100.0%

Lampiran XVI. Tabel Peer Sektor Kesehatan dengan Memaksimumkan Output Tahun 1999

Table of peer units			
Peers for Unit KB.TEGAL		efficiency	1.23% radial
KB.TEGAL		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	76.267	
4484.5	-PK	4484.5	
65.2	+AHP	5300.5	
Peers for Unit KB.CILACAP			1.60% radial
KB.CILACAP		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	60.422	
3552.8	-PK	3552.8	
67.2	+AHP	4199.3	
Peers for Unit KT.SMRG			2.98% radial
KT.SMRG		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	33.894	
1993.0	-PK	1993.0	
70.2	+AHP	2355.7	
Peers for Unit KB.PEMLNG			3.17% radial
KB.PEMLNG		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	29.318	
1723.9	-PK	1723.9	
64.5	+AHP	2037.6	
Peers for Unit KB.BREBES			4.16% radial
KB.BREBES		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	21.880	
1286.5	-PK	1286.5	
63.3	+AHP	1520.7	
Peers for Unit KB.BNYUMAS			4.39% radial
KB.BNYUMAS		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	22.326	
1312.8	-PK	1312.8	
68.1	+AHP	1551.7	
Peers for Unit KB.WNGIRI			4.70% radial
KB.WNGIRI		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	21.785	
1280.9	-PK	1280.9	
71.1	+AHP	1514.0	
Peers for Unit KB.BLORA			4.82% radial
KB.BLORA		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	20.884	
1228.0	-PK	1228.0	
69.9	+AHP	1451.4	
Peers for Unit KB.KENDAL			5.47% radial
KB.KENDAL		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	17.007	
1000.0	-PK	1000.0	
64.7	+AHP	1182.0	
Peers for Unit KB.JEPARA			5.61% radial
KB.JEPARA		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	17.863	
1050.3	-PK	1050.3	
69.6	+AHP	1241.5	

Peers for Unit KB.GROBOGAN efficiency			5.66% radial
KB.GROBOGA		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	17.240	
1013.7	-PK	1013.7	
67.8	+AHP	1198.2	
Peers for Unit KB.SMRG efficiency			6.07% radial
KB.SMRG		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	16.739	
984.2	-PK	984.2	
70.6	+AHP	1163.4	
Peers for Unit KB.DEMAK efficiency			6.38% radial
KB.DEMAK		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	15.501	
911.4	-PK	911.4	
68.7	+AHP	1077.3	
Peers for Unit KB.PURBLGA efficiency			7.12% radial
KB.PURBLGA		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	13.623	
801.0	-PK	801.0	
67.4	+AHP	946.8	
Peers for Unit KB.PATI efficiency			8.03% radial
KB.PATI		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	12.830	
754.4	-PK	754.4	
71.6	+AHP	891.7	
Peers for Unit KB.REMBANG efficiency			8.83% radial
KB.REMBANG		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	11.079	
651.4	-PK	651.4	
68.0	+AHP	770.0	
Peers for Unit KB.MAGELNG efficiency			9.27% radial
KB.MAGELNG		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	10.551	
620.4	-PK	620.4	
68.0	+AHP	733.3	
Peers for Unit KB.KRNGANYAR efficiency			9.61% radial
KB.KRNGANY		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	10.497	
617.2	-PK	617.2	
70.1	+AHP	729.5	
Peers for Unit KB.KLATEN efficiency			10.07% radial
KB.KLATEN		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	9.871	
580.4	-PK	580.4	
69.1	+AHP	686.1	
Peers for Unit KB.PURWRJO efficiency			10.23% radial
KB.PURWRJO		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	9.525	
560.1	-PK	560.0	
67.7	+AHP	662.0	
Peers for Unit KB.BOYOLALI efficiency			11.25% radial
KB.BOYOLAL		KT.SLTIGA	
ACTUAL	LAMBDA	8.879	
522.1	-PK	522.1	
69.4	+AHP	617.1	

Peers for Unit	KB.KUDUS	efficiency	11.82%	radial
	KB.KUDUS	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	8.254	
	485.4	-PK	485.4	
	67.8	+AHP	573.7	
Peers for Unit	KT.SRKARTA	efficiency	12.24%	radial
	KT.SRKARTA	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	8.333	
	490.0	-PK	490.0	
	70.9	+AHP	579.2	
Peers for Unit	KB.BATANG	efficiency	12.48%	radial
	KB.BATANG	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	7.854	
	461.8	-PK	461.8	
	68.1	+AHP	545.9	
Peers for Unit	KB.KEBUMEN	efficiency	12.62%	radial
	KB.KEBUMEN	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	7.660	
	450.4	-PK	450.4	
	67.2	+AHP	532.4	
Peers for Unit	KB.BJRNGARA	efficiency	13.04%	radial
	KB.BJRNGAR	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	7.437	
	437.3	-PK	437.3	
	67.4	+AHP	516.9	
Peers for Unit	KT.TEGAL	efficiency	14.25%	radial
	KT.TEGAL	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	6.727	
	395.5	-PK	395.6	
	66.6	+AHP	467.5	
Peers for Unit	KB.PKLNGN	efficiency	14.74%	radial
	KB.PKLNGN	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	6.490	
	381.6	-PK	381.6	
	66.5	+AHP	451.0	
Peers for Unit	KB.WNSOBO	efficiency	17.41%	radial
	KB.WNSOBO	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	5.594	
	328.9	-PK	328.9	
	67.7	+AHP	388.8	
Peers for Unit	KB.TMANGGUNG	efficiency	23.87%	radial
	KB.TMANGGU	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	4.261	
	250.6	-PK	250.6	
	70.7	+AHP	296.2	
Peers for Unit	KB.SUKOHAJO	efficiency	25.89%	radial
	KB.SUKOHAJ	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	3.840	
	225.8	-PK	225.8	
	69.1	+AHP	266.9	
Peers for Unit	KB.SRAGEN	efficiency	31.92%	radial
	KB.SRAGEN	KT.SLTIGA		
	ACTUAL	LAMBDA	3.192	
	187.7	-PK	187.7	
	70.8	+AHP	221.8	

Peers for Unit KT.MAGELNG efficiency 32.81% radial
 KT.MAGELNG KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 3.030
 178.2 -PK 178.2
 69.1 +AHP 210.6

Peers for Unit KT.PKLNGN efficiency 34.18% radial
 KT.PKLNGN KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 2.866
 168.5 -PK 168.5
 68.1 +AHP 199.2

Peers for Unit KT.SLTIGA efficiency 100.00% radial
 KT.SLTIGA KT.SLTIGA
 ACTUAL LAMBDA 1.000
 58.8 -PK 58.8
 69.5 +AHP 69.5

Lampiran XVII. Tabel Target Sektor Kesehatan dengan Memaksimumkan Output Tahun 1999

Table of target values

Targets for Unit KB.TEGAL efficiency 1.23% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 4484.5 4484.5 0.0% 100.0%
 +AHP 65.2 5300.5 8029.7% 1.2%

Targets for Unit KB.CILACAP efficiency 1.60% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 3552.8 3552.8 0.0% 100.0%
 +AHP 67.2 4199.3 6149.0% 1.6%

Targets for Unit KT.SMRG efficiency 2.98% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 1993.0 1993.0 0.0% 100.0%
 +AHP 70.2 2355.7 3255.6% 3.0%

Targets for Unit KB.PEMLNG efficiency 3.17% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 1723.9 1723.9 0.0% 100.0%
 +AHP 64.5 2037.6 3059.1% 3.2%

Targets for Unit KB.BREBES efficiency 4.16% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 1286.5 1286.5 0.0% 100.0%
 +AHP 63.3 1520.7 2302.3% 4.2%

Targets for Unit KB.BNYUMAS efficiency 4.39% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 1312.8 1312.8 0.0% 100.0%
 +AHP 68.1 1551.7 2178.5% 4.4%

Targets for Unit KB.WNGIRI efficiency 4.70% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 1280.9 1280.9 0.0% 100.0%
 +AHP 71.1 1514.0 2029.4% 4.7%

Targets for Unit KB.BLORA efficiency 4.82% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 1228.0 1228.0 0.0% 100.0%
 +AHP 69.9 1451.4 1976.4% 4.8%

Targets for Unit KB.KENDAL efficiency 5.47% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 1000.0 1000.0 0.0% 100.0%
 +AHP 64.7 1182.0 1726.8% 5.5%

Targets for Unit KB.JEPARA efficiency 5.61% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1050.3	1050.3	0.0%	100.0%
+AHP	69.6	1241.5	1683.7%	5.6%
Targets for Unit KB.GROBOGAN efficiency 5.66% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1013.7	1013.7	0.0%	100.0%
+AHP	67.8	1198.2	1667.2%	5.7%
Targets for Unit KB.SMRG efficiency 6.07% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	984.2	984.2	0.0%	100.0%
+AHP	70.6	1163.4	1547.8%	6.1%
Targets for Unit KB.DEMAK efficiency 6.38% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	911.4	911.4	0.0%	100.0%
+AHP	68.7	1077.3	1468.1%	6.4%
Targets for Unit KB.PURBLGA efficiency 7.12% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	801.0	801.0	0.0%	100.0%
+AHP	67.4	946.8	1304.8%	7.1%
Targets for Unit KB.PATI efficiency 8.03% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	754.4	754.4	0.0%	100.0%
+AHP	71.6	891.7	1145.4%	8.0%
Targets for Unit KB.REMBANG efficiency 8.83% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	651.4	651.4	0.0%	100.0%
+AHP	68.0	770.0	1032.3%	8.8%
Targets for Unit KB.MAGELNG efficiency 9.27% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	620.4	620.4	0.0%	100.0%
+AHP	68.0	733.3	978.4%	9.3%
Targets for Unit KB.KRNGANYAR efficiency 9.61% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	617.2	617.2	0.0%	100.0%
+AHP	70.1	729.5	940.7%	9.6%
Targets for Unit KB.KLATEN efficiency 10.07% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	580.4	580.4	0.0%	100.0%
+AHP	69.1	686.1	892.8%	10.1%
Targets for Unit KB.PURWRJO efficiency 10.23% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	560.1	560.0	0.0%	100.0%
+AHP	67.7	662.0	877.8%	10.2%
Targets for Unit KB.BOYOLALI efficiency 11.25% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	522.1	522.1	0.0%	100.0%
+AHP	69.4	617.1	789.2%	11.2%
Targets for Unit KB.KUDUS efficiency 11.82% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	485.4	485.4	0.0%	100.0%
+AHP	67.8	573.7	746.1%	11.8%
Targets for Unit KT.SRKARTA efficiency 12.24% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	490.0	490.0	0.0%	100.0%
+AHP	70.9	579.2	716.9%	12.2%

Targets for Unit KB.BATANG efficiency 12.48% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	461.8	461.8	0.0%	100.0%
+AHP	68.1	545.9	701.6%	12.5%

Targets for Unit KB.KEBUMEN efficiency 12.62% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	450.4	450.4	0.0%	100.0%
+AHP	67.2	532.4	692.2%	12.6%

Targets for Unit KB.BJRNGARA efficiency 13.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	437.3	437.3	0.0%	100.0%
+AHP	67.4	516.9	666.9%	13.0%

Targets for Unit KT.TEGAL efficiency 14.25% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	395.5	395.6	0.0%	100.0%
+AHP	66.6	467.5	602.0%	14.2%

Targets for Unit KB.PKLNGN efficiency 14.74% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	381.6	381.6	0.0%	100.0%
+AHP	66.5	451.0	578.3%	14.7%

Targets for Unit KB.WNSOBO efficiency 17.41% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	328.9	328.9	0.0%	100.0%
+AHP	67.7	388.8	474.3%	17.4%

Targets for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 23.87% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	250.6	250.6	0.0%	100.0%
+AHP	70.7	296.2	318.9%	23.9%

Targets for Unit KB.SUKOHAJO efficiency 25.89% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	225.8	225.8	0.0%	100.0%
+AHP	69.1	266.9	286.2%	25.9%

Targets for Unit KB.SRAGEN efficiency 31.92% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	187.7	187.7	0.0%	100.0%
+AHP	70.8	221.8	213.3%	31.9%

Targets for Unit KT.MAGELNG efficiency 32.81% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	178.2	178.2	0.0%	100.0%
+AHP	69.1	210.6	204.7%	32.8%

Targets for Unit KT.PKLNGN efficiency 34.18% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	168.5	168.5	0.0%	100.0%
+AHP	68.1	199.2	192.5%	34.2%

Targets for Unit KT.SLTIGA efficiency 100.00% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	58.8	58.8	0.0%	100.0%
+AHP	69.5	69.5	0.0%	100.0%

Lampiran XVIII. Tabel Peer Sektor Pendidikan dengan Memaksimumkan Output tahun 2002

Table of peer units			
Peers for Unit KB.KENDAL efficiency			2.87% radial
KB.KENDAL		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	37.634	
41067.6	-PP	41067.6	
6.5	+RLS	248.4	
88.6	+AMH	3082.2	
Peers for Unit KB.JEPARA efficiency			4.41% radial
KB.JEPARA		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	24.069	
26265.0	-PP	26265.0	
6.5	+RLS	158.9	
87.0	+AMH	1971.2	
Peers for Unit KB.BREBES efficiency			7.30% radial
KB.BREBES		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	13.562	
14800.0	-PP	14800.0	
5.0	+RLS	89.5	
81.1	+AMH	1110.8	
Peers for Unit KB.BLORA efficiency			7.43% radial
KB.BLORA		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	13.242	
14450.0	-PP	14450.0	
5.7	+RLS	87.4	
80.6	+AMH	1084.5	
Peers for Unit KB.GROBOGAN efficiency			11.93% radial
KB.GROBOGA		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	8.854	
9661.7	-PP	9661.6	
6.3	+RLS	58.4	
86.5	+AMH	725.1	
Peers for Unit KB.TEGAL efficiency			12.99% radial
KB.TEGAL		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	7.781	
8491.2	-PP	8491.2	
5.6	+RLS	51.4	
82.8	+AMH	637.3	
Peers for Unit KB.PKLNGN efficiency			14.72% radial
KB.PKLNGN		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	7.018	
7658.8	-PP	7658.8	
5.6	+RLS	46.3	
84.6	+AMH	574.8	
Peers for Unit KB.PATI efficiency			14.84% radial
KB.PATI		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	7.193	
7849.6	-PP	7849.6	
6.5	+RLS	47.5	
87.4	+AMH	589.1	
Peers for Unit KB.PEMLNG efficiency			17.04% radial
KB.PEMLNG		KB.BOYOLAL	
ACTUAL	LAMBDA	5.889	
6426.0	-PP	6426.0	
5.4	+RLS	38.9	
82.2	+AMH	482.3	

Peers for Unit KB.BATANG efficiency 18.61% radial
 KB.BATANG KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 5.570
 6078.5 -PP 6078.5
 5.9 +RLS 36.8
 84.9 +AMH 456.2

Peers for Unit KB.PURBLGA efficiency 20.23% radial
 KB.PURBLGA KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 5.358
 5847.3 -PP 5847.3
 5.6 +RLS 35.4
 88.8 +AMH 438.9

Peers for Unit KT.TEGAL efficiency 20.40% radial
 KT.TEGAL KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 5.645
 6160.0 -PP 6160.0
 7.6 +RLS 37.3
 91.0 +AMH 462.3

Peers for Unit KB.BNYUMAS efficiency 21.86% radial
 KB.BNYUMAS KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 5.005
 5461.6 -PP 5461.6
 6.3 +RLS 33.0
 89.6 +AMH 409.9

Peers for Unit KT.PKLNGN efficiency 22.18% radial
 KT.PKLNGN KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 5.329
 5814.9 -PP 5814.9
 7.8 +RLS 35.2
 91.6 +AMH 436.4

Peers for Unit KB.REMBANG efficiency 22.96% radial
 KB.REMBANG KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 4.558
 4973.7 -PP 4973.7
 5.8 +RLS 30.1
 85.7 +AMH 373.3

Peers for Unit KB.BNJRNGARA efficiency 24.16% radial
 KB.BNJRNGA KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 4.159
 4538.0 -PP 4538.0
 5.3 +RLS 27.4
 82.3 +AMH 340.6

Peers for Unit KB.KEBUMEN efficiency 25.05% radial
 KB.KEBUMEN KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 4.172
 4552.5 -PP 4552.5
 6.2 +RLS 27.5
 85.6 +AMH 341.7

Peers for Unit KB.SMRG efficiency 25.92% radial
 KB.SMRG KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 4.170
 4550.2 -PP 4550.2
 6.8 +RLS 27.5
 88.5 +AMH 341.5

Peers for Unit KB.KUDUS efficiency 27.96% radial
 KB.KUDUS KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 3.874
 4227.1 -PP 4227.1
 7.1 +RLS 25.6
 88.7 +AMH 317.3

Peers for Unit	KB.CILACAP	efficiency	28.36%	radial
KB.CILACAP		KB.BOYOLAL		
ACTUAL	LAMBDA	3.746		
4088.0	-PP	4088.0		
6.1	+RLS	24.7		
87.0	+AMH	306.8		
Peers for Unit	KB.WNGIRI	efficiency	28.53%	radial
KB.WNGIRI		KB.BOYOLAL		
ACTUAL	LAMBDA	3.312		
3614.3	-PP	3614.3		
5.9	+RLS	21.9		
77.4	+AMH	271.3		
Peers for Unit	KB.TMANGGUNG	efficiency	28.80%	radial
KB.TMANGGU		KB.BOYOLAL		
ACTUAL	LAMBDA	3.883		
4237.2	-PP	4237.2		
6.3	+RLS	25.6		
91.6	+AMH	318.0		
Peers for Unit	KB.WNSB	efficiency	33.28%	radial
KB.WNSB		KB.BOYOLAL		
ACTUAL	LAMBDA	3.122		
3407.0	-PP	3407.0		
5.6	+RLS	20.6		
85.1	+AMH	255.7		
Peers for Unit	KB.KLATEN	efficiency	33.50%	radial
KB.KLATEN		KB.BOYOLAL		
ACTUAL	LAMBDA	3.302		
3602.9	-PP	3602.9		
7.3	+RLS	21.8		
82.8	+AMH	270.4		
Peers for Unit	KT.SMRG	efficiency	38.06%	radial
KT.SMRG		KB.BOYOLAL		
ACTUAL	LAMBDA	3.981		
4343.9	-PP	4343.9		
10.0	+RLS	26.3		
95.5	+AMH	326.0		
Peers for Unit	KB.SUKOHARJO	efficiency	38.51%	radial
KB.SUKOHAR		KB.BOYOLAL		
ACTUAL	LAMBDA	3.108		
3392.1	-PP	3392.1		
7.9	+RLS	20.5		
82.2	+AMH	254.6		
Peers for Unit	KB.MAGELNG	efficiency	44.41%	radial
KB.MAGELNG		KB.BOYOLAL		
ACTUAL	LAMBDA	2.447		
2670.0	-PP	2670.0		
7.0	+RLS	16.1		
89.0	+AMH	200.4		
Peers for Unit	KB.PURWRJO	efficiency	46.13%	radial
KB.PURWRJO		KB.BOYOLAL		
ACTUAL	LAMBDA	2.342		
2556.0	-PP	2556.0		
7.1	+RLS	15.5		
88.5	+AMH	191.8		
Peers for Unit	KB.KRNGANYAR	efficiency	49.34%	radial
KB.KRNGANY		KB.BOYOLAL		
ACTUAL	LAMBDA	2.150		
2345.7	-PP	2345.7		
7.0	+RLS	14.2		
78.9	+AMH	176.0		

Peers for Unit KB.SRAGEN efficiency 53.84% radial
 KB.SRAGEN KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.708
 1863.7 -PP 1863.7
 6.0 +RLS 11.3
 75.3 +AMH 139.9

Peers for Unit KT.SRKARTA efficiency 54.33% radial
 KT.SRKARTA KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 2.733
 2982.4 -PP 2982.4
 9.8 +RLS 18.0
 94.6 +AMH 223.8

Peers for Unit KT.MAGELNG efficiency 88.82% radial
 KT.MAGELNG KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.672
 1824.2 -PP 1824.2
 9.8 +RLS 11.0
 95.6 +AMH 136.9

Peers for Unit KT.SLTIGA efficiency 99.93% radial
 KT.SLTIGA KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.440
 1571.8 -PP 1571.8
 9.5 +RLS 9.5
 93.3 +AMH 118.0

Peers for Unit KB.BOYOLALI efficiency 100.00% radial
 KB.BOYOLAL KB.BOYOLAL
 ACTUAL LAMBDA 1.000
 1091.2 -PP 1091.2
 6.6 +RLS 6.6
 81.9 +AMH 81.9

Lampiran XIX. Tabel Target Sektor Pendidikan dengan Memaksimumkan Output Tahun 2002

Table of target values

Targets for Unit KB.KENDAL efficiency 2.87% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PP 41067.6 41067.6 0.0% 100.0%
 +RLS 6.5 248.4 3721.2% 2.6%
 +AMH 88.6 3082.2 3378.8% 2.9%

Targets for Unit KB.JEPARA efficiency 4.41% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PP 26265.0 26265.0 0.0% 100.0%
 +RLS 6.5 158.9 2343.9% 4.1%
 +AMH 87.0 1971.2 2165.8% 4.4%

Targets for Unit KB.BREBES efficiency 7.30% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PP 14800.0 14800.0 0.0% 100.0%
 +RLS 5.0 89.5 1690.2% 5.6%
 +AMH 81.1 1110.8 1269.6% 7.3%

Targets for Unit KB.BLORA efficiency 7.43% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PP 14450.0 14450.0 0.0% 100.0%
 +RLS 5.7 87.4 1433.2% 6.5%
 +AMH 80.6 1084.5 1245.5% 7.4%

Targets for Unit KB.GROBOGAN efficiency 11.93% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	9661.7	9661.6	0.0%	100.0%
+RLS	6.3	58.4	827.5%	10.8%
+AMH	86.5	725.1	738.3%	11.9%

Targets for Unit KB.TEGAL efficiency 12.99% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	8491.2	8491.2	0.0%	100.0%
+RLS	5.6	51.4	817.1%	10.9%
+AMH	82.8	637.3	669.7%	13.0%

Targets for Unit KB.PKLNGN efficiency 14.72% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	7658.8	7658.8	0.0%	100.0%
+RLS	5.6	46.3	727.2%	12.1%
+AMH	84.6	574.8	579.4%	14.7%

Targets for Unit KB.PATI efficiency 14.84% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	7849.6	7849.6	0.0%	100.0%
+RLS	6.5	47.5	630.4%	13.7%
+AMH	87.4	589.1	574.1%	14.8%

Targets for Unit KB.PEMLNG efficiency 17.04% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	6426.0	6426.0	0.0%	100.0%
+RLS	5.4	38.9	619.7%	13.9%
+AMH	82.2	482.3	486.7%	17.0%

Targets for Unit KB.BATANG efficiency 18.61% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	6078.5	6078.5	0.0%	100.0%
+RLS	5.9	36.8	523.1%	16.0%
+AMH	84.9	456.2	437.3%	18.6%

Targets for Unit KB.PURBLGA efficiency 20.23% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	5847.3	5847.3	0.0%	100.0%
+RLS	5.6	35.4	531.5%	15.8%
+AMH	88.8	438.9	394.2%	20.2%

Targets for Unit KT.TEGAL efficiency 20.40% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	6160.0	6160.0	0.0%	100.0%
+RLS	7.6	37.3	390.2%	20.4%
+AMH	91.0	462.3	408.0%	19.7%

Targets for Unit KB.BNYUMAS efficiency 21.86% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	5461.6	5461.6	0.0%	100.0%
+RLS	6.3	33.0	424.3%	19.1%
+AMH	89.6	409.9	357.5%	21.9%

Targets for Unit KT.PKLNGN efficiency 22.18% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	5814.9	5814.9	0.0%	100.0%
+RLS	7.8	35.2	350.9%	22.2%
+AMH	91.6	436.4	376.4%	21.0%

Targets for Unit KB.REMBANG efficiency 22.96% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4973.7	4973.7	0.0%	100.0%
+RLS	5.8	30.1	418.6%	19.3%
+AMH	85.7	373.3	335.6%	23.0%

Targets for Unit KB.BNJRNGARA efficiency 24.16% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4538.0	4538.0	0.0%	100.0%
+RLS	5.3	27.4	417.9%	19.3%
+AMH	82.3	340.6	313.8%	24.2%

Targets for Unit KB.KEBUMEN efficiency 25.05% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4552.5	4552.5	0.0%	100.0%
+RLS	6.2	27.5	344.1%	22.5%
+AMH	85.6	341.7	299.1%	25.1%

Targets for Unit KB.SMRG efficiency 25.92% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4550.2	4550.2	0.0%	100.0%
+RLS	6.8	27.5	304.7%	24.7%
+AMH	88.5	341.5	285.9%	25.9%

Targets for Unit KB.KUDUS efficiency 27.96% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4227.1	4227.1	0.0%	100.0%
+RLS	7.1	25.6	260.1%	27.8%
+AMH	88.7	317.3	257.7%	28.0%

Targets for Unit KB.CILACAP efficiency 28.36% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4088.0	4088.0	0.0%	100.0%
+RLS	6.1	24.7	305.3%	24.7%
+AMH	87.0	306.8	252.7%	28.4%

Targets for Unit KB.WNGIRI efficiency 28.53% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3614.3	3614.3	0.0%	100.0%
+RLS	5.9	21.9	270.5%	27.0%
+AMH	77.4	271.3	250.5%	28.5%

Targets for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 28.80% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4237.2	4237.2	0.0%	100.0%
+RLS	6.3	25.6	306.8%	24.6%
+AMH	91.6	318.0	247.2%	28.8%

Targets for Unit KB.WNSB efficiency 33.28% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3407.0	3407.0	0.0%	100.0%
+RLS	5.6	20.6	268.0%	27.2%
+AMH	85.1	255.7	200.5%	33.3%

Targets for Unit KB.KLATEN efficiency 33.50% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3602.9	3602.9	0.0%	100.0%
+RLS	7.3	21.8	198.5%	33.5%
+AMH	82.8	270.4	226.6%	30.6%

Targets for Unit KT.SMRG efficiency 38.06% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	4343.9	4343.9	0.0%	100.0%
+RLS	10.0	26.3	162.7%	38.1%
+AMH	95.5	326.0	241.4%	29.3%

Targets for Unit KB.SUKOHARJO efficiency 38.51% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	3392.1	3392.1	0.0%	100.0%
+RLS	7.9	20.5	159.7%	38.5%
+AMH	82.2	254.6	209.7%	32.3%

Targets for Unit KB.MAGELNG efficiency 44.41% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2670.0	2670.0	0.0%	100.0%
+RLS	7.0	16.1	130.7%	43.3%
+AMH	89.0	200.4	125.2%	44.4%

Targets for Unit KB.PURWRJO efficiency 46.13% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2556.0	2556.0	0.0%	100.0%
+RLS	7.1	15.5	117.7%	45.9%
+AMH	88.5	191.8	116.8%	46.1%

Targets for Unit KB.KRNGANYAR efficiency 49.34% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2345.7	2345.7	0.0%	100.0%
+RLS	7.0	14.2	102.7%	49.3%
+AMH	78.9	176.0	123.1%	44.8%

Targets for Unit KB.SRAGEN efficiency 53.84% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1863.7	1863.7	0.0%	100.0%
+RLS	6.0	11.3	87.9%	53.2%
+AMH	75.3	139.9	85.8%	53.8%

Targets for Unit KT.SRKARTA efficiency 54.33% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	2982.4	2982.4	0.0%	100.0%
+RLS	9.8	18.0	84.1%	54.3%
+AMH	94.6	223.8	136.6%	42.3%

Targets for Unit KT.MAGELNG efficiency 88.82% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1824.2	1824.2	0.0%	100.0%
+RLS	9.8	11.0	12.6%	88.8%
+AMH	95.6	136.9	43.2%	69.8%

Targets for Unit KT.SLTIGA efficiency 99.93% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1571.8	1571.8	0.0%	100.0%
+RLS	9.5	9.5	0.1%	99.9%
+AMH	93.3	118.0	26.4%	79.1%

Targets for Unit KB.BOYOLALI efficiency 100.00% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PP	1091.2	1091.2	0.0%	100.0%
+RLS	6.6	6.6	0.0%	100.0%
+AMH	81.9	81.9	0.0%	100.0%

Lampiran XX. Tabel Peer Sektor Kesehatan dengan Memaksimumkan Output Tahun 2002

Table of peer units			
Peers for Unit KB.JEPARA efficiency			3.07% radial
KB.JEPARA		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	32.052	
18445.9	-PK	18445.9	
70.0	+AHP	2278.9	
Peers for Unit KB.PATI efficiency			5.17% radial
KB.PATI		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	19.730	
11354.4	-PK	11354.4	
72.5	+AHP	1402.8	
Peers for Unit KB.TEGAL efficiency			5.41% radial
KB.TEGAL		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	17.226	
9913.5	-PK	9913.5	
66.2	+AHP	1224.8	
Peers for Unit KT.TEGAL efficiency			5.44% radial
KT.TEGAL		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	17.298	
9955.1	-PK	9955.1	
66.9	+AHP	1229.9	
Peers for Unit KT.SLTIGA efficiency			7.22% radial
KT.SLTIGA		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	13.678	
7871.9	-PK	7871.8	
70.2	+AHP	972.5	
Peers for Unit KB.PURBLGA efficiency			7.39% radial
KB.PURBLGA		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	12.857	
7399.3	-PK	7399.3	
67.6	+AHP	914.1	
Peers for Unit KB.WNSB efficiency			7.45% radial
KB.WNSB		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	12.937	
7445.0	-PK	7445.0	
68.5	+AHP	919.8	
Peers for Unit KB.SMRG efficiency			8.16% radial
KB.SMRG		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	12.294	
7075.0	-PK	7075.0	
71.3	+AHP	874.1	
Peers for Unit KB.GROBOGAN efficiency			8.95% radial
KB.GROBOGA		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	10.699	
6157.5	-PK	6157.5	
68.1	+AHP	760.7	
Peers for Unit KT.SMRG efficiency			9.69% radial
KT.SMRG		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	10.215	
5879.0	-PK	5879.0	
70.4	+AHP	726.3	
Peers for Unit KB.REMBANG efficiency			9.79% radial
KB.REMBANG		KT.SRKARTA	
ACTUAL	LAMBDA	9.851	
5669.0	-PK	5669.0	
68.6	+AHP	700.4	

Peers for Unit	KB.CILACAP	efficiency	10.22%	radial
	KB.CILACAP	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	9.330	
	5369.6	-PK	5369.6	
	67.8	+AHP	663.4	
Peers for Unit	KB.TMANGGUNG	efficiency	10.56%	radial
	KB.TMANGGU	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	9.506	
	5470.6	-PK	5470.6	
	71.4	+AHP	675.9	
Peers for Unit	KB.BLORA	efficiency	11.60%	radial
	KB.BLORA	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	8.524	
	4905.5	-PK	4905.5	
	70.3	+AHP	606.0	
Peers for Unit	KB.BREBES	efficiency	16.54%	radial
	KB.BREBES	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	5.467	
	3146.5	-PK	3146.5	
	64.3	+AHP	388.7	
Peers for Unit	KB.KENDAL	efficiency	18.68%	radial
	KB.KENDAL	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	4.894	
	2816.3	-PK	2816.3	
	65.0	+AHP	347.9	
Peers for Unit	KB.BATANG	efficiency	19.51%	radial
	KB.BATANG	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	4.953	
	2850.5	-PK	2850.5	
	68.7	+AHP	352.2	
Peers for Unit	KB.KUDUS	efficiency	20.22%	radial
	KB.KUDUS	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	4.744	
	2730.3	-PK	2730.3	
	68.2	+AHP	337.3	
Peers for Unit	KB.SUKOHARJO	efficiency	20.24%	radial
	KB.SUKOHAR	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	4.815	
	2771.3	-PK	2771.3	
	69.3	+AHP	342.4	
Peers for Unit	KB.BNJRNGARA	efficiency	21.12%	radial
	KB.BNJRNGA	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	4.509	
	2595.0	-PK	2595.0	
	67.7	+AHP	320.6	
Peers for Unit	KB.KEBUMEN	efficiency	23.47%	radial
	KB.KEBUMEN	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	4.051	
	2331.1	-PK	2331.2	
	67.6	+AHP	288.0	
Peers for Unit	KB.KLATEN	efficiency	24.12%	radial
	KB.KLATEN	KT.SRKARTA		
	ACTUAL	LAMBDA	4.071	
	2342.7	-PK	2342.7	
	69.8	+AHP	289.4	

Peers for Unit	KB.PEMLNG	efficiency	24.60%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	3.727	
	2145.0	-PK	2145.0	
	65.2	+AHP	265.0	
Peers for Unit	KT.MAGELNG	efficiency	24.83%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	3.925	
	2258.6	-PK	2258.6	
	69.3	+AHP	279.0	
Peers for Unit	KB.BOYOLALI	efficiency	28.82%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	3.397	
	1954.8	-PK	1954.8	
	69.6	+AHP	241.5	
Peers for Unit	KB.WNGIRI	efficiency	28.88%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	3.487	
	2006.6	-PK	2006.6	
	71.6	+AHP	247.9	
Peers for Unit	KT.PKLNGN	efficiency	33.20%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	2.906	
	1672.5	-PK	1672.5	
	68.6	+AHP	206.6	
Peers for Unit	KB.SRAGEN	efficiency	35.97%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	2.796	
	1609.0	-PK	1609.0	
	71.5	+AHP	198.8	
Peers for Unit	KB.MAGELNG	efficiency	36.67%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	2.639	
	1518.8	-PK	1518.8	
	68.8	+AHP	187.6	
Peers for Unit	KB.PURWRJO	efficiency	40.82%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	2.343	
	1348.3	-PK	1348.3	
	68.0	+AHP	166.6	
Peers for Unit	KB.BNYUMAS	efficiency	42.03%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	2.296	
	1321.2	-PK	1321.2	
	68.6	+AHP	163.2	
Peers for Unit	KB.PKLNGN	efficiency	46.57%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	2.011	
	1157.5	-PK	1157.5	
	66.6	+AHP	143.0	
Peers for Unit	KB.KRNGANYAR	efficiency	68.84%	radial
	KT.SRKARTA			
	ACTUAL	LAMBDA	1.467	
	844.3	-PK	844.3	
	71.8	+AHP	104.3	

Peers for Unit KT.SRKARTA efficiency 100.00% radial
 KT.SRKARTA KT.SRKARTA
 ACTUAL LAMBDA 1.000
 575.5 -PK 575.5
 71.1 +AHP 71.1

Lampiran XXI. Tabel Target Sektor Kesehatan dengan Memaximumkan Output Tahun 2002

Table of target values

Targets for Unit KB.JEPARA efficiency 3.07% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 18445.9 18445.9 0.0% 100.0%
 +AHP 70.0 2278.9 3155.6% 3.1%

Targets for Unit KB.PATI efficiency 5.17% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 11354.4 11354.4 0.0% 100.0%
 +AHP 72.5 1402.8 1834.9% 5.2%

Targets for Unit KB.TEGAL efficiency 5.41% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 9913.5 9913.5 0.0% 100.0%
 +AHP 66.2 1224.8 1750.1% 5.4%

Targets for Unit KT.TEGAL efficiency 5.44% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 9955.1 9955.1 0.0% 100.0%
 +AHP 66.9 1229.9 1738.4% 5.4%

Targets for Unit KT.SLTIGA efficiency 7.22% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 7871.9 7871.8 0.0% 100.0%
 +AHP 70.2 972.5 1285.4% 7.2%

Targets for Unit KB.PURBLGA efficiency 7.39% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 7399.3 7399.3 0.0% 100.0%
 +AHP 67.6 914.1 1252.3% 7.4%

Targets for Unit KB.WNSB efficiency 7.45% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 7445.0 7445.0 0.0% 100.0%
 +AHP 68.5 919.8 1242.8% 7.4%

Targets for Unit KB.SMRG efficiency 8.16% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 7075.0 7075.0 0.0% 100.0%
 +AHP 71.3 874.1 1125.9% 8.2%

Targets for Unit KB.GROBOGAN efficiency 8.95% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 6157.5 6157.5 0.0% 100.0%
 +AHP 68.1 760.7 1017.1% 9.0%

Targets for Unit KT.SMRG efficiency 9.69% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 5879.0 5879.0 0.0% 100.0%
 +AHP 70.4 726.3 931.7% 9.7%

Targets for Unit KB.REMBANG efficiency 9.79% radial
 VARIABLE ACTUAL TARGET TO GAIN ACHIEVED
 -PK 5669.0 5669.0 0.0% 100.0%
 +AHP 68.6 700.4 921.0% 9.8%

Targets for Unit KB.CILACAP efficiency 10.22% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	5369.6	5369.6	0.0%	100.0%
+AHP	67.8	663.4	878.4%	10.2%

Targets for Unit KB.TMANGGUNG efficiency 10.56% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	5470.6	5470.6	0.0%	100.0%
+AHP	71.4	675.9	846.6%	10.6%

Targets for Unit KB.BLORA efficiency 11.60% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	4905.5	4905.5	0.0%	100.0%
+AHP	70.3	606.0	762.1%	11.6%

Targets for Unit KB.BREBES efficiency 16.54% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	3146.5	3146.5	0.0%	100.0%
+AHP	64.3	388.7	504.6%	16.5%

Targets for Unit KB.KENDAL efficiency 18.68% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2816.3	2816.3	0.0%	100.0%
+AHP	65.0	347.9	435.3%	18.7%

Targets for Unit KB.BATANG efficiency 19.51% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2850.5	2850.5	0.0%	100.0%
+AHP	68.7	352.2	412.6%	19.5%

Targets for Unit KB.KUDUS efficiency 20.22% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2730.3	2730.3	0.0%	100.0%
+AHP	68.2	337.3	394.6%	20.2%

Targets for Unit KB.SUKOHARJO efficiency 20.24% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2771.3	2771.3	0.0%	100.0%
+AHP	69.3	342.4	394.0%	20.2%

Targets for Unit KB.BNJRNARA efficiency 21.12% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2595.0	2595.0	0.0%	100.0%
+AHP	67.7	320.6	373.6%	21.1%

Targets for Unit KB.KEBUMEN efficiency 23.47% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2331.1	2331.2	0.0%	100.0%
+AHP	67.6	288.0	326.0%	23.5%

Targets for Unit KB.KLATEN efficiency 24.12% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2342.7	2342.7	0.0%	100.0%
+AHP	69.8	289.4	314.7%	24.1%

Targets for Unit KB.PEMLNG efficiency 24.60% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2145.0	2145.0	0.0%	100.0%
+AHP	65.2	265.0	306.4%	24.6%

Targets for Unit KT.MAGELNG efficiency 24.83% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2258.6	2258.6	0.0%	100.0%
+AHP	69.3	279.0	302.7%	24.8%

Targets for Unit KB.BOYOLALI efficiency 28.82% radial

VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1954.8	1954.8	0.0%	100.0%
+AHP	69.6	241.5	247.0%	28.8%

Targets for Unit KB.WNGIRI efficiency 28.88% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	2006.6	2006.6	0.0%	100.0%
+AHP	71.6	247.9	246.2%	28.9%
Targets for Unit KT.PKLNGN efficiency 33.20% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1672.5	1672.5	0.0%	100.0%
+AHP	68.6	206.6	201.2%	33.2%
Targets for Unit KB.SRAGEN efficiency 35.97% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1609.0	1609.0	0.0%	100.0%
+AHP	71.5	198.8	178.0%	36.0%
Targets for Unit KB.MAGELNG efficiency 36.67% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1518.8	1518.8	0.0%	100.0%
+AHP	68.8	187.6	172.7%	36.7%
Targets for Unit KB.PURWRJO efficiency 40.82% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1348.3	1348.3	0.0%	100.0%
+AHP	68.0	166.6	145.0%	40.8%
Targets for Unit KB.BNYUMAS efficiency 42.03% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1321.2	1321.2	0.0%	100.0%
+AHP	68.6	163.2	137.9%	42.0%
Targets for Unit KB.PKLNGN efficiency 46.57% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	1157.5	1157.5	0.0%	100.0%
+AHP	66.6	143.0	114.7%	46.6%
Targets for Unit KB.KRNGANYAR efficiency 68.84% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	844.3	844.3	0.0%	100.0%
+AHP	71.8	104.3	45.3%	68.8%
Targets for Unit KT.SRKARTA efficiency 100.00% radial				
VARIABLE	ACTUAL	TARGET	TO GAIN	ACHIEVED
-PK	575.5	575.5	0.0%	100.0%
+AHP	71.1	71.1	0.0%	100.0%

Logo of Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) featuring a central emblem with a crescent moon and star, surrounded by the university's name in Indonesian and Arabic script.